



FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
UNTUK MENDAPATKAN
OPINI WTP DARI BPK

Buku ini berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Mendapatkan Opini WTP Dari BPK (Survey Pada Pemerintah Daerah di Wilayah Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat)".

Bertujuan untuk menguji baik secara simultan maupun parsial pengaruh seberapa besar Penerapan SAP, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kaitannya dalam mendapatkan Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Sampling dilakukan pada 10 daerah Kabupaten dan Kota di lingkungan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat serta Provinsi Jawa Barat dengan Unit Analisis pada Bagian Akuntansi yang berhubungan dengan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



Dr. Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA. memulai pekerjaan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan pada Februari 1983, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, dan BPKP Pusat. Diperbantukan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sejak Tahun 2005 sampai 2013 sebagai Auditor Ahli Madya serta berbagai jabatan struktural, yaitu Kepala Bagian Administrasi dan Tata Usaha Pengaduan, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Evaluasi Laporan dan Hasil Pengawasan serta terakhir sebagai pejabat eselon IIA menjadi Inspektur Wilayah III. Pernah pula diperbantukan pada Yayasan Purna Bakti sebagai Staf Ahli dan Direktur Umum pada PT. Selaras Griya Adigunatama (pengelola Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang). Sejak tahun 2007 sampai sekarang, pengajar/widyaiswara tidak tetap pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri.

Sejak Agustus 2013 sampai sekarang sebagai Dosen IPDN dengan spesifikasi pada Bidang Keuangan, Audit dan Akuntansi Pemerintah Pusat/Daerah. Sejak Oktober 2018 sampai dengan September 2021 menjabat sebagai Kepala Pusat Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IPDN. Menjabat sebagai Staf Ahli Sekjen DPD RI priode 2019 sampai 2021. Sejak September 2021 sampai sekarang, menjabat sebagai Ketua Satuan Pengawas Intern (Ketua SPI). Aktif sebagai pembicara/ narasumber pada acara pelatihan, seminar, dan workshop tingkat nasional, internasional, dan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah.

ISBN-978-623-6157-95-4



9 786236 157954



Komp. GBA Barat Blok C-4 No. 7 Bandung
Email: penerbit@cendekiapress.com
Website: www.cendekiapress.com

DR. DADANG SUWANDA, SE., MM., M.Ak., Ak., CA.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENDAPATKAN WTP DARI BPK



FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
UNTUK MENDAPATKAN
OPINI WTP DARI BPK

(Survey pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
serta Wilayah Badan Koordinasi Pemerintahan dan
Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat)

Dr. DADANG SUWANDA, SE., MM., M.Ak., Ak., CA.



Dr. DADANG SUWANDA, SE., MM., M.Ak., Ak., CA.

**FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
UNTUK MENDAPATKAN OPINI WTP
DARI BPK**

Survey pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
serta Wilayah Badan Koordinasi Pemerintahan dan
Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat

The logo for Cendekia Press, featuring the word "Cendekia" in a stylized, serif font with a decorative flourish underneath.

Penerbit CV Cendekia Press Bandung

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK
MENDAPATKAN OPINI WTP DARI BPK**

Copyright © 2022 Dadang Suwanda

ISBN 978 623 6157 95 4

Penulis : Dr. Dadang Suwanda, SE., MM., M.Ak., Ak., CA.

Editor : Yudi Prihanto Santoso, SE.

Desain Sampul : Nur Naillah

Cetakan pertama, Pebruari 2022

Penerbit **CV CENDEKIA PRESS**

NIB: 8120107982776

Komp. GBA West Blok C-4 No. 7 Bandung

Anggota IKAPI

Semua hak dilindungi oleh Penulis, dan hak penerbitan di CV Cendekia Press. Dilarang memperbanyak artikel ini dalam bentuk apa pun dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini dengan lancar.

Buku ini berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Mendapatkan Opini WTP Dari BPK (Survey Pada Pemerintah Daerah di Wilayah Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat)”.

Buku ini merupakan lanjutan dari tesis penulis pada Program Suti Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama di Bandung tahun 2013.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan penulis dalam pengetahuan dan pengulasan buku ini. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun sehingga dapat menjadi sebagai acuan dalam penelitian karya-karya ilmiah selanjutnya. Akhir kata, semoga, buku ini dapat berguna bagi yang membutuhkan dan dapat menjadi amal ibadah bagi kita semua.

Bandung, Pebruari 2022

Dr. Dadang Suwanda, SE., MM., M.Ak., Ak., CA.

READING COPY

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	10
1. Rumusan Masalah	11
2. Maksud dan Tujuan	11
C. Kegunaan Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	13
A. Kajian Pustaka	13
1. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah	13
2. Pengertian Laporan Keuangan.	15
3. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).	28
4. Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	24
5. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	26

6.	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).	27
7.	Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	31
B.	Tinjauan Penelitian Terdahulu	45
C.	Kerangka Pemikiran	58
D.	Hipotesis	62
BAB III	BAHAN/OBJEK DAN METODE PENELITIAN	65
A.	Bahan/Objek Penelitian	65
B.	Operasionalisasi Variabel Penelitian	61
C.	Jenis dan Sumber Data Penelitian	71
D.	Teknik Pengumpulan Data	71
E.	Teknik Pengambilan Sampel	77
F.	Metode Analisis	78
G.	Rancangan Uji Hipotesis	79
	Uji Validitas dan Reliabilitas	79
H.	Rancangan Implikasi Hasil Penelitian	80
	Pengujian Hipotesis	85
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	89
A.	Hasil Penelitian	89
1.	Gambaran Umum	89
2.	Karakteristik Responden	92
3.	Uji Validitas Dan Reliabilitas	94
4.	Hasil Analisis Deskriptif	97
5.	Hasil Analisis Verifikatif	132
6.	Pengujian Hipotesis	140
B.	Pembahasan	146
1.	Opini WTP	146
2.	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	147
3.	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	148
4.	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	148
5.	Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI)	149
6.	Komitmen Organisasi.	149
7.	Pemanfaatan Teknologi Informasi.	150

8. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	151
9. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	152
10. Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	153
11. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	153
12. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	154
13. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Opini WTP.	155
14. Pengaruh Secara Simultan Pengaruh Penerapan SAP, Kualitas SDM, Implementasi SPI, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	155
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	157
A. Kesimpulan	157
B. Keterbatasan Penelitian	159
C. Saran	159
D. Implikasi penelitian	160
DAFTAR PUSTAKA	163
GLOSARIUM	169
INDEKS	171
TENTANG PENULIS	173

READING COPY

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008-2013	5
Tabel 2.1	Daftar Peneliti terdahulu	53
Tabel 3.1	Daftar Operasional Variabel	70
Tabel 4.1.	Jenis Kelamin Responden	92
Tabel 4.2.	Umur Responden	93
Tabel 4.3.	Pendidikan Responden	93
Tabel 4.4	Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	94
Tabel 4.5	Kesesuaian Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	98
Tabel 4.6	Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures)	98
Tabel 4.7	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	98
Tabel 4.8	Deskripsi Variabel Opini WTP di Lingkungan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat	199
Tabel 4.9	Laporan keuangan yang dihasilkan dapat diuji kembali	100
Tabel 4.10	Laporan keuangan yang dihasilkan memiliki nilai predictive	100
Tabel 4.11	Laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan waktu yang direncanakan	101

Tabel 4.12. Laporan keuangan yang dihasilkan sudah lengkap	101
Tabel 4.13. Laporan keuangan yang dihasilkan dibuat dengan jujur	102
Tabel 4.14. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat diverifikasi	102
Tabel 4.15 Prinsip netralitas tercermin dengan baik dalam laporan keuangan	103
Tabel 4.16 Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai alat pembandingan dengan periode sebelumnya	103
Tabel 4.17 Para pengguna laporan keuangan memahami laporan keuangan yang dihasilkan.	103
Tabel 4.18 Deskriptif Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	104
Tabel 4.19 Semua transaksi sudah dicatat dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan	105
Tabel 4.20 Praktek standar dalam SAP dalam pencatatan transaksi keuangan sudah diterapkan dengan baik	106
Tabel 4.21 SAP sudah digunakan untuk menyediakan informasi dan mengambil keputusan secara terkomputerisasi	106
Tabel 4.22 SAP dirancang secara berjenjang dan dimulai dari sumber data dari daerah	107
Tabel 4.23 SAP dapat mempermudah perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah pusat	107
Tabel 4.24 Sistem akuntansi yang digunakan sudah memenuhi SAP	108
Tabel 4.25 Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya	108
Tabel 4.26 Pembuatan Laporan Keuangan Dilaporkan Secara Periodik	109
Tabel 4.27 Sumber daya pendukung memiliki peran dan tanggung jawab sebagai fungsi akuntansi	109
Tabel 4.28 Data Deskripsi Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	110

Tabel 4.29	Latar belakang pendidikan sudah sesuai dengan bidang pekerjaannya	111
Tabel 4.30	Setiap pegawai memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas mengenai tugasnya	112
Tabel 4.31	Sumber daya pendukung memiliki peran dan tanggung jawab sebagai fungsi akuntansi	112
Tabel 4.32	Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai sub bagian keuangan/akuntansi ditetapkan secara jelas	113
Tabel 4.33	Uraian tugas sub bagian keuangan/akuntansi sesuai dengan fungsi akuntansi	113
Tabel 4.34	Sub bagian keuangan atau akuntansi memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup.	114
Tabel 4.35	Pelatihan diberikan kepada pegawai untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas	114
Tabel 4.36	Pegawai mampu menyusun LKPD sesuai dengan SAP	115
Tabel 4.37	Deskripsi Variabel Kualitas SDM	115
Tabel 4.38	Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran telah dibuatkan Standard Operating Procedure (SOP)	117
Tabel 4.39	Adanya pemisahan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan transaksi	117
Tabel 4.40	Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.	118
Tabel 4.41	Terdapat tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku	118
Tabel 4.42	Pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab	118
Tabel 4.43	Terdapat langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer	119
Tabel 4.44	Deskripsi Variabel Implementasi Sistem Pengendalian Intern	120
Tabel 4.45	Terdapat rasa kebanggaan terhadap organisasi atau lembaga kepada orang lain	121

Tabel 4.46	Terdapat kesamaan nilai-nilai pribadi dengan nilai-nilai organisasi	122
Tabel 4.47	Terdapat kebanggaan telah menjadi bagian dari organisasi	122
Tabel 4.48	Bersedia untuk bekerja lebih keras demi kesuksesan organisasi	123
Tabel 4.49	Bersedia untuk menerima tugas apa saja dalam mewujudkan loyalitas terhadap organisasi atau lembaga.	123
Tabel 4.50	Organisasi atau lembaga dapat dijadikan sebagai inspirasi cara mencapai kerja.	124
Tabel 4.51	Bersedia untuk lebih memilih organisasi sendiri daripada organisasi lain.	124
Tabel 4.52	Mengakui bahwa organisasi atau lembaga merupakan tempat kerja yang terbaik	125
Tabel 4.53	Memiliki kepedulian terhadap kepentingan atau nasib organisasi	125
Tabel 4.54	Deskripsi Variabel Komitmen Organisasi	126
Tabel 4.55	Sub bagian keuangan/ akuntansi memiliki software aplikasi untuk melaksanakan tugas seperti Microsoft Excel, MYOB dan sebagainya.	127
Tabel 4.56	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara terkomputerisasi	128
Tabel 4.57	Pengolahan Data Transaksi Keuangan Menggunakan Software Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	128
Tabel 4.58	Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi	129
Tabel 4.59	Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur	129
Tabel 4.60	Peralatan yang using atau rusak didata dan segera diperbaiki tepat pada waktunya	130
Tabel 4.61	Terdapat sistem keamanan komputer (antivirus) yang diperbaiki secara teratur	130
Tabel 4.62	Deskripsi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi	131

Tabel 4.63	Pengujian Koefisien Korelasi antar Variabel	132
Tabel 4.64	Pengujian Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan	132
Tabel 4.65	Uji Pengaruh Simultan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan	137
Tabel 4.66	Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan	138
Tabel 4.67	Pengujian Pengaruh Kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah Terhadap Opini WTP	139
Tabel 4.68	Uji Pengaruh Kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah terhadap Opini WTP	140
Tabel 4.69	Hasil Uji Parsial Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)	141
Tabel 4.70	Hasil Uji Parsial Variabel Kualitas SDM (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)	141
Tabel 4.71	Hasil Uji Parsial Variabel Implementasi Sistem Pengendalian Intern (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)	142
Tabel 4.72	Hasil Uji Parsial Variabel Komitmen Organisasi (X4) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)	143
Tabel 4.73	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)	144
Tabel 4.74	Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan Kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah terhadap Opini WTP	145
Tabel 4.75	Hasil Uji Hipotesis Parsial Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Opini WTP	146

READING COPY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Permasalahan Umum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	4
Gambar 2.1	Landasan Teori Secara Keseluruhan	51
Gambar 2.2.	Kerangka Pemikiran	62
Gambar 3.1.	Struktur Hubungan Sebab Akibat	81
Gambar 4.1	Koefisien Jalur Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	135
Gambar 4.2	Koefisien Jalur Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah terhadap Opini WTP	139

READING COPY

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENDAPATKAN OPINI WTP DARI BPK

(Survey pada Pemerintah Daerah di Lingkungan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji baik secara simultan maupun parsial pengaruh seberapa besar Penerapan SAP, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kaitannya dalam mendapatkan Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Populasi Penelitian ini mengambil tempat survey 10 di daerah Kabupaten dan Kota di lingkungan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari serta Provinsi Jawa Barat dengan unit analisisnya adalah Bagian Akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Sebelum dilakukan uji regresi, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik.

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Penerapan SAP, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian

Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan secara parsial Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh secara signifikan namun Penerapan SAP dan Komitmen Organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil ini perlu dikaji ulang karena belum ada penelitian empiris yang sejenis yang mendukung atau bertentangan dengan hasil penelitian ini.

Kata kunci: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penerapan SAP, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Opini WTP.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Penelitian

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat mempengaruhi perubahan-perubahan hampir dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam tatanan pengelolaan pemerintahan.

Dalam kondisi abad di abad 21 ini, di seluruh belahan bumi bahwa tatanan manajemen pemerintahan yang sentralistik sudah tidak zamannya lagi, baik di negara maju maupun berkembang termasuk Indonesia. Sistem pemerintahan negara kita mengalami perubahan yang drastis dan fundamental yaitu dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

Sentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang "Pemerintahan Daerah" dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang "Pembagian Urusan" menyebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan. Urusan sentralisasi saat ini hanya tinggal urusan-urusan yang bersifat terpusat yaitu politik luar

negeri, pertahanan, keamanan, politik, hukum, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Sentralisasi pada masa lalu adalah strategi pemerintah pusat yang memusatkan seluruh kewenangan atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan oleh pemerintah pusat. Sentralisasi merupakan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi oleh pemerintah pusat. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah, terutama pada zaman Kerajaan Pemerintah Kolonial Belanda maupun di zaman kemerdekaan.

Sedangkan pemerintahan yang desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang “Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah” adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah, semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” disebutkan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom adalah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya otonomi daerah terdapat keuntungan bagi pemerintah daerah antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 2) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
- 3) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.

Secara pendekatan manajemen pada hakekatnya otonomi daerah adalah pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Semakin besar pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan makin meningkatkan *responsibility* karakteristik dari orang/individu, agar lebih inovatif, etos kerja yang tinggi yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas yang tinggi.

Perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi telah memberi dampak yang besar pada penyelenggaraan

pemerintahan dan ruang lingkup kerja pada umumnya sehingga memberi dampak juga pada perubahan pengaturan sistem keuangan pemerintah daerah. Otonomi daerah mewajibkan pemerintahan daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, merata, adil dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan secara optimal dengan menerapkan prinsip-prinsip “*good governance*” yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Dalam implementasinya ternyata banyak pemerintah daerah menghadapi berbagai permasalahan yaitu:

1) Permasalahan tingginya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Permasalahan yang sering dihadapi oleh para penyelenggara pemerintah daerah adalah seringnya terlibat permasalahan KKN. Dewasa ini sering terdengar di media masa tentang kepala daerah, anggota dewan, pengusaha maupun pejabat daerah yang terlibat masalah korupsi. Korupsi saat ini sudah melibatkan banyak orang di segala lini dan seluruh sistem kehidupan. Jumlah kepala daerah yang terlibat masalah hukum sudah mencapai ±300 orang, ribuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun ribuan penyelenggaraan negara.

2) Permasalahan belum maksimalnya kinerja.

Dalam melaksanakan urusannya, banyak penyelenggara pemerintah daerah mengalami permasalahan yaitu tidak maksimalnya kinerja. Penilaian kinerja yang disusun setiap akhir tahun sering tidak mendapat nilai yang memuaskan. Setiap tahun seluruh instansi pemerintah daerah akan dilakukan evaluasi kemudian diberikan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tentang kinerjanya. Penilaian kinerja akan dievaluasi sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu juga dievaluasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah disusun oleh Kementerian Teknis.

3) Permasalahan daya serap anggaran yang rendah.

Karena seringnya pejabat daerah yang bermasalah hukum, hal tersebut menimbulkan keengganan dari pelaksana kegiatan untuk melaksanakan tupoksinya. Para pejabat publik gamang untuk

melaksanakan kegiatannya, banyak dari pejabat publik khawatir dan was-was akhirnya cenderung mencari aman dengan tidak melaksanakan kegiatannya. Hal tersebut berdampak pada rendahnya daya serap anggaran. Realisasi anggaran yang banyak diserap oleh para penyelenggara pemerintah daerah adalah belanja yang bersifat intern yaitu belanja pegawai dan barang dan jasa sedangkan belanja modal serta untuk pembangunan relatif rendah. Saat ini terdapat kecenderungan berupa keengganan para penyelenggara pemerintah daerah untuk tidak merealisasikan anggarannya, karena khawatir akan bermasalah dengan aparat hukum.

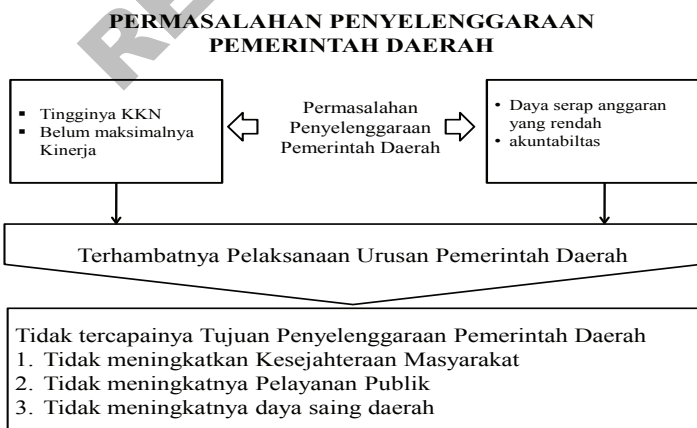
4) Permasalahan Akuntabilitas.

Untuk melaksanakan kegiatannya, pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit. Setiap penggunaan dana tersebut harus dicatat, dilaporkan dalam laporan keuangan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pertanggung jawaban tersebut setiap tahun akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari hasil pemeriksaan BPK diketahui ternyata banyak penyelenggara pemerintah daerah yang pertanggungjawaban laporan keuangannya belum memperoleh hasil yang maksimal.

Seluruh permasalahan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Permasalahan Umum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



Sumber Data: Dadang Suwanda (Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda, 2013)

Adapun kondisi terkini tentang perolehan Opini hasil pemeriksaan BPK dapat kita ketahui dari Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II tahun 2013 untuk tahun buku 2013 yang menyebutkan:

“Jumlah pemerintah Provinsi se-Indonesia yang telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah sebanyak 6 Provinsi (18 %) dari 33 Provinsi, sedangkan untuk pemerintah kabupaten adalah sebanyak 16 kabupaten (4%) dari 394 kabupaten dan 21 pemerintah kota (13%) dari 85 pemerintahan kota”.

Dengan kata lain perolehan Opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tidak menggembirakan, demikian juga untuk pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat. Jumlah pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 27 yang terdiri dari 1 (satu) pemerintah Provinsi, 17 pemerintah kabupaten dan 9 pemerintahan kota. Sampai dengan semester I tahun 2014 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat yang mendapat Opini WTP baru berjumlah 3 (tiga) yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota Banjar dan Kota Cimahi,.

Sebagai ilustrasi perolehan Opini BPK di Provinsi Jawa Barat dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008-2013*)

No	Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Prov. Jawa Barat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Bandung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
3	Kab. Bandung Barat	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
4	Kab. Bekasi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
5	Kab. Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
6	Kab. Ciamis	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
7	Kab. Cianjur	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
8	Kab. Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
9	Kab. Garut	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

No	Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
10	Kab. Indramayu	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP
11	Kab. Karawang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
12	Kab. Kuningan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
13	Kab. Majalengka	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
14	Kab. Purwakarta	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
15	Kab. Subang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
16	Kab. Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
17	Kab. Sumedang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
18	Kab. Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
19	Kota Bandung	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
20	Kota Banjar	WDP	WDP WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
21	Kota Bekasi	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
22	Kota Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
23	Kota Cimahi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
24	Kota Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
25	Kota Depok	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
26	Kota Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
27	Kota Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

Sumber Data: Laporan BPK yang dimodifikasi penulis (2014)

*) Data sampai dengan semester I 2014

Laporan keuangan yang baik tidak hanya berujung kepada tercapainya Opini WTP, tetapi juga dapat menjadi instrumen dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dengan tidak didapatnya Opini WTP, hal tersebut menimbulkan masalah sendiri bagi penyelenggara pemerintah daerah yaitu tidak dapat melakukan keputusan yang tepat serta tidak akuntabilitasnya laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah melalui Perencanaan Nasionalnya telah menargetkan bahwa untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun buku 2014 yang akan dicapai pada tahun 2015 target pemerintah daerah yang harus mendapat Opini WTP pemeriksaan dari BPK adalah sebanyak 60%.

Dengan keberhasilan memperoleh Opini WTP tersebut, juga akan mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah terutama di bidang keuangan daerah. Keberhasilan melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan tuntutan dan harapan masyarakat agar dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Selain itu pemerintah juga merencanakan akan memberikan *reward* bagi penyelenggara pemerintah daerah dengan memberikan insentif bagi pemerintah daerah yang mendapatkan Opini WTP atas laporan keuangannya yaitu berupa pemberian insentif uang sebesar ±30 milyar, bagi pemerintah daerah yang mendapatkan Opini WTP atas pertanggungjawaban laporan keuangannya.

Di sisi lain pemerintah juga merencanakan akan memberikan *punishment* berupa penundaan Dana Perimbangan yaitu dana DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar 20% serta dilarangnya kepala daerah yang tidak mendapat Opini WTP atas laporan keuangannya untuk maju dalam mengikuti pemilihan kepala daerah periode berikutnya.

Tidak didapatnya Opini WTP hasil pemeriksaan BPK oleh pemerintah daerah secara umum disebabkan belum berkualitasnya laporan keuangan pemerintah daerah,

Dari Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013 BPK menyebutkan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain meliputi:

- 1) Sistem Pengendalian Intern belum optimal.
- 2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang belum sepenuhnya didasarkan pada identifikasi dan analisis risiko.
- 3) Pengelolaan aset yang belum tertib yaitu pencatatan dan pelaporan aset belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
- 4) Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.
- 5) Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan aset pada SKPD belum efektif diterapkan.
- 6) Kompetensi SDM belum sepenuhnya memadai.
- 7) Tindak lanjut temuan belum dilaksanakan secara optimal oleh SKPD, ditandai adanya temuan yang berulang dan hanya berganti locus.

Majalah Akuntansi Indonesia edisi Nomor 18 Bulan Juli 2009 menyebutkan bahwa dalam rangka membangun Sistem Akuntansi

Instansi (SAI), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2005, usaha yang perlu diupayakan dan dikondisikan oleh semua instansi pusat dan daerah adalah, adanya:

- 1) Komitmen pimpinan (*management commitment*) yang kuat dari setiap pimpinan unit akuntansi pada setiap tingkatan,
- 2) Perangkat komputer dan printer (*hardware*) yang diperlukan untuk dapat berfungsinya perangkat tersebut pada setiap tingkatan unit akuntansi,
- 3) Sumber daya manusia (*brainware*) yang akan menyelenggarakan SAI pada setiap tingkatan unit akuntansi keuangan/barang dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai dalam hal akuntansi dan pengoperasian komputer,
- 4) Anggaran (*budget*) yang cukup untuk menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada setiap tingkatan unit akuntansi.
- 5) Reviu yang memadai dan berkualitas oleh aparat pengawasan internal (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama pada Kementerian dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota) yang didukung Staf Internal Auditor dengan memiliki kompetensi di bidang akuntansi.

Dari hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang telah dilakukan oleh penulis terdahulu yaitu:

- 1) Nugraheni dan Subaweh (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan adanya pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengetahuan pengelola Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-EI) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPPB) yang memadai dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
- 2) Mustafa, dkk (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan, namun pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan, hal tersebut. pelaporan keuangan. Keterandalan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sementara kapasitas SDM

dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kapasitas SDM berpengaruh terhadap keterandalan, hal tersebut disebabkan karena memang karakteristik SDM di Kota Kendari yang masih memiliki kapasitas yang rendah dan taraf pendidikan yang masih relatif rendah khususnya dalam bidang akuntansi. Keterandalan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu bisa disebabkan oleh upaya untuk memenuhi sebuah kriteria penyajian pelaporan keuangan yang andal, diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat material maupun non material, yang mengakibatkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan sebuah sistem pelaporan keuangan yang andal akan semakin lama.

- 3) Arfianti (2011) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Disamping itu, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh.
- 4) Pada tahun yang sama, Rosalin (2011) memberikan kesimpulan yang inkonsisten dengan Arfianti (2011) dan Mustafa, dkk (2010), dimana Rosalin (2011) menemukan pemanfaatan teknologi, pengendalian intern akuntansi, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Pada pengujian kedua didapatkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas sumber daya manusia dan pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
- 5) Sukmaningrum (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi Sumber Daya Manusia tidak

berpengaruh. Kompetensi sumber daya manusia tidak signifikan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia itu sendiri dari segi kualitas dan kuantitas. Faktor eksternal tidak dapat digunakan sebagai hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Faktor eksternal berperan sebagai variabel bebas dan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, hal ini dikarenakan dinamika perubahan sektor pemerintahan tidak diakomodasi oleh kesiapan sumber daya manusia dan tidak proaktif terhadap tekanan-tekanan publik.

Berdasarkan fenomena-fenomena permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Mendapatkan Opini WTP Dari BPK (Survey pada Pemerintah Daerah Di Lingkungan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat)”**.

Penelitian dilakukan pada kantor pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat khususnya di Lingkungan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat yang diwajibkan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima secara umum, didasari pada prinsip-prinsip akuntansi, sistem dan prosedur akuntansi. Adapun pertimbangan lainnya adalah didasarkan pada letak geografis, jumlah kabupaten dan kota yang relatif banyak yaitu 10 kabupaten dan kota sehingga dianggap dapat mewakili untuk dijadikan penelitian yang mewakili provinsi Jawa Barat.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas disimpulkan identifikasi permasalahan yang diambil adalah:

- 1) Seberapa besar Penerapan SAP, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

- 2) Faktor apa yang paling dominan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- 3) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah dalam mendapatkan Opini WTP dari BPK?
- 4) Strategi apa yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Seberapa Besar Pengaruh Penerapan SAP, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Baik Secara Simultan Maupun Secara Parsial Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Barat Untuk Mendapatkan Opini WTP Khususnya Pada Pemerintah Daerah Di Lingkungan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat”.
- 2) Pengaruh laporan keuangan pemerintah daerah dalam mendapatkan Opini WTP dari BPK.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah.

- 1) Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait di pemerintah daerah, sehingga lebih mudah mencari alternatif untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan keuangan khususnya dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah untuk memperoleh Opini WTP.
- 2) Bagi peneliti lain, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan penelitian-penelitian sejenis berikutnya.
- 3) Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Akuntansi di bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- 4) Bagi Penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan.

b. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Faktor Penerapan SAP, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Pimpinan dan Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat (Survey pada Pemerintah Daerah Di Lingkungan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat) khususnya keterkaitan untuk mendapatkan Opini WTP baik secara simultan maupun secara parsial.

C. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- 1) Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengalaman, pemahaman dan kemampuan intelektual tentang pengaruh faktor penerapan SAP, kualitas SDM, implementasi sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dalam memperoleh Opini WTP.
- 2) Bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat yaitu sebagai bahan masukan didalam menyikapi permasalahan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan/mempertahankan Opini WTP.
- 3) Menambah literatur dan acuan bagi penelitian di bidang akuntansi pemerintahan, terutama yang ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai laporan keuangan pemerintah daerah.
- 4) Untuk bahan masukan dan bahan perbandingan bagi setiap orang yang ingin menambah wawasan mengenai laporan keuangan pemerintah daerah dan kaitannya dengan Opini Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh BPK.

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

Suatu penelitian bisa dikatakan ilmiah apabila penelitian tersebut didukung dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, dengan menuliskan tinjauan pustaka atau kajian teorinya.

Penelitian yang penulis lakukan adalah fokus kepada "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Lingkungan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Mendapatkan Opini WTP".

Oleh karena itu kegiatan kajian pustaka difokuskan kepada teori-teori yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

1. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah

Beberapa pengertian tentang pemerintah daerah menurut beberapa ahli dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bastian (2001:203) menyatakan bahwa "pemerintahan daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah".

Halim (2002:2) menyebutkan bahwa “pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD”.

Dalam uraiannya Halim menjelaskan bahwa tidak adanya pemisahan secara konkrit antara eksekutif dan legislatif yang dapat memicu tidak berjalannya pengawasan secara efektif.

Sedangkan pengertian pemerintah daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 menyebutkan penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD adalah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan roda kegiatan, pemerintah daerah dipimpin oleh gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Dari pengertian diatas secara umum dapat diartikan bahwa pemerintahan daerah adalah perangkat daerah yang ditujukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan:

“Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Di dalam undang-undang yang mengatur keuangan negara, disebutkan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu peraturan mengenai pemerintahan daerah.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 adalah:

- 1) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 2) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- 3) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

2. Pengertian Laporan Keuangan.

Pada dasarnya laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas. Laporan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan

standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi. Untuk itu sebelum mendefinisikan pengertian laporan keuangan, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian akuntansi dari beberapa pendapat para ahli yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yaitu:

Weygandt, Kieso, dan Kell (1996:180) menyatakan:

“Accounting is a process of three activities: identifying, recording, and communicating the economic events of an organization (business or nonbusiness) to interested users of the information”.

Munawir (2002:5) mendefinisikan:

“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya sebagian bersifat keuangan dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan penunjuk atau dinyatakan dalam uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul daripadanya”.

Horngren, Harrison, dan Bamber (2002:227) menyatakan:

“Accounting is the information system that measures business activities, processes that information into reports, and communicates the results to decision makers”.

Dari pengertian para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa, akuntansi merupakan rangkaian proses dari transaksi/peristiwa dan kejadian yang bersifat keuangan yang diidentifikasi, dicatat, lalu digolongkan secara periodik dan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang kemudian digunakan dalam penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kesatuan usaha yang bersangkutan. Akuntansi mengatur dan meringkas suatu informasi ekonomi sehingga para pembuat keputusan dapat menggunakannya. Informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

Sebagai tindakan akhir dari proses akuntansi adalah penyusunan laporan keuangan. Berikut ini adalah kutipan dari beberapa pandangan para ahli mengenai laporan keuangan yang sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan tesis ini.

Menurut Munawir (2002:2) menyatakan:

“Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat memberikan informasi tentang suatu keadaan perusahaan sekaligus merupakan alat komunikasi antara data keuangan dengan pihak yang berkepentingan dengan data perusahaan tersebut”.

Menurut IPSAS (*International Public Sector Accounting Standard*) menyatakan *Structured Representation of financial position of and the transaction under taken by entity.*

Dalam penjelasannya diuraikan, laporan keuangan adalah sebagai hasil proses dari akuntansi yang merupakan penghubung antara perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan cara memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak tersebut untuk mengetahui keadaan dan perkembangan perusahaan bersangkutan”.

Horngrén, Harrison, dan Bamber (2002:63) menyatakan:

“Financial statement is documents that report on a business in monetary amounts, providing information to help people make informed business decisions”.

Kieso, Weygandt, dan Warfield yang diterjemahkan oleh Salim, E. (2007:2) menyatakan:

“Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan yang sering disajikan adalah (1) neraca, (2) laporan laba rugi, (3) laporan arus kas, dan (4) laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham. Selain itu, catatan atas laporan keuangan atau pengungkapan juga merupakan bagian integral dari setiap laporan keuangan”.

Menurut IPSAS menyebutkan:

“Laporan keuangan akrual secara umum setidaknya terdiri dari Statement of Financial Position (Neraca), Statement of Financial Performance (Laporan Kinerja Keuangan), Statement of Changes In Net Assets/Equity (Laporan Perubahan dalam Aset Bersih/Ekuitas), Cash Flow Statement (Laporan Arus Kas) dan Accounting Policies and Notes to The Financial Statements (Catatan atas Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan)”.

IAI (2004:3) mendefinisikan:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan hasil dari proses akuntansi yang dikuantifikasi dalam nilai moneter yang memberikan informasi tentang keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan, dimana biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

3. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal. Bentuk laporan keuangan sektor publik pada dasarnya dapat diadaptasi dari laporan keuangan pada sektor

swasta yang disesuaikan dengan sifat dan karakteristik sektor publik serta mengakomodasi kebutuhan laporan keuangan sektor publik. Namun, laporan keuangan sektor publik tidak dapat begitu saja dipersamakan dengan laporan keuangan sektor swasta baik format maupun elemennya. Hal ini disebabkan organisasi sektor publik memiliki batasan-batasan berupa pertimbangan non moneter, seperti pertimbangan sosial dan politik.

LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain.

Bastian (2002:7) mengatakan :

“Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah yang mempresentasikan secara terstruktur posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.

Haryanto dkk (2007:17) menyebutkan “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada prinsipnya merupakan hasil gabungan atau konsolidasi dari laporan keuangan SKPD”.

LKPD disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Proses penyusunan LKPD paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan. LKPD disusun dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Penyusunan dan penyajian LKPD dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyajian LKPD dilampiri dengan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah. LKPD disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan. LKPD yang telah diaudit BPK, selanjutnya laporan auditnya disampaikan

ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dengan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dalam pemerintah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari:

- 1) Pemerintah Pusat.
- 2) Pemerintah Daerah.
- 3) Satuan organisasi di lingkungan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

LKPD merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah LKPD meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengakui laporannya tersebut akan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, terdapat 4 (empat) komponen laporan keuangan yang harus disajikan setiap Pemerintah Daerah dalam pelaporan keuangannya, yakni:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.

2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari

mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

3) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- (2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

4) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

- (2) Menyajikan informasi Tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro.
- (3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- (4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- (5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar laporan keuangan.
- (6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- (7) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan yakni:

1) Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah berbasis kas basis/*accrual* untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

2) Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

3) Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tertentu.

4) Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkap dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan

5) Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya akan dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulan dan semesteran juga dianjurkan.

6) Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh tidak ada perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

7) Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8) Penyajian Wajar (*Fair Presentation*).

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pertimbangan profesional bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa atau keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan

mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan profesional dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan profesional mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Didalam menilai kewajaran suatu laporan keuangan penyelenggara Negara, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-undang 15 Tahun 2006 mengamanahkan BPK untuk memeriksa (mengaudit) pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

4. Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif atau standar yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar LKPD dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah:

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya Informasi yang relevan adalah:

(1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

- (2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- (3) Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- (4) Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Keandalan

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- (1) Penyajian jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- (2) Dapat diverifikasi
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.
- (3) Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan

laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas tersebut, antar periode entitas yang sama dan untuk entitas yang berbeda.

4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

5. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Mardiasmo (2004:37) memaparkan bahwa secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
- 2) Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya *financial* jangka pendek unit pemerintah.
- 2) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
- 3) Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
- 4) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.

- 5) Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

- 1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- 2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

6. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 110 paragraf 01 (PSA Nomor 02) (2001:28), tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas,

dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dalam melakukan audit, auditor harus mengumpulkan bukti-bukti kewajaran informasi yang tercantum dalam laporan perusahaan dengan cara memeriksa catatan akuntansi yang mendukung laporan tersebut. Pernyataan pendapat auditor harus didasarkan atas audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing dan atas temuan-temuannya. Laporan audit yang mencakup paragraf, kalimat, frasa, dan kata yang digunakan oleh auditor untuk mengkomunikasikan hasil auditnya kepada pemakai laporan auditnya. Auditor menyatakan pendapatnya tentang kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan dalam sebuah laporan.

Menurut Mulyadi (2002:9) laporan auditor tadi terdiri dari:

1) Paragraf pengantar (*introduction paragraph*)

Paragraf pengantar dicantumkan pada paragraf pertama laporan audit bentuk baku. Auditor mengungkapkan tiga fakta pada paragraf pengantar. Fakta pertama adalah pengungkapan tipe jasa yang diberikan auditor. Fakta kedua tentang objek yang diaudit. Selanjutnya, pengungkapan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan tanggung jawab auditor atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil auditnya.

2) Paragraf lingkup audit (*scope paragraph*)

Paragraf lingkup audit berisikan pernyataan ringkas auditor mengenai lingkup audit yang dilaksanakan auditor. Selain itu, paragraf lingkup audit juga menjelaskan bahwa pelaksanaan audit telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan publik. Pelaksanaan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing tersebut memberikan dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan.

3) Paragraf pendapat (*opinion paragraph*)

Paragraf ketiga dalam laporan keuangan bentuk baku yakni paragraf pendapat yang digunakan auditor untuk menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan auditan. Dalam paragraf pendapat, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi umum.

Terdapat lima jenis opini auditor menurut Mulyadi (2002:20-22) yaitu:

1) Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan.
- (2) Dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh auditor.
- (3) Bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor, dan auditor telah melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tiga standar pekerjaan lapangan.
- (4) Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia.
- (5) Tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjas atau modifikasi katakata dalam laporan audit.

2) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas (*unqualified opinion with explanatory language*)

Dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjas atau bahasa penjas lain dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Paragraf penjas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjas atau modifikasi katakata dalam laporan audit baku adalah:

- (1) Ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum. Ketidak konsistenan terjadi apabila ada perubahan prinsip akuntansi atau metode akuntansi yang mempunyai akibat material terhadap daya banding laporan keuangan perusahaan.
- (2) Keraguan besar tentang kelangsungan hidup suatu entitas.
- (3) Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

- (4) Penekanan atas suatu hal.
- (5) Laporan audit yang melibatkan auditor lain.

3) Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*).

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila *auditee* menyajikan secara wajar laporan keuangan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima secara umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam keadaan:

- (1) Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap ruang lingkup audit.
- (2) Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.
- 4) Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*)
Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan *auditee* tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
- 5) Tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*)
Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika ia tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat ini juga diberikan apabila ia dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

Merujuk pada Buletin Teknis 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah yang diatur dalam Keputusan BPK RI Nomor 4/K/IXIII.2/9/2012 paragraf 13 tentang jenis Opini, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

- 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan dalam SPKN, BPK dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjasas karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan

pemeriksa menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP.

- 2) Wajar dengan pengecualian (WDP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal – hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- 3) Tidak Wajar (TW) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
- 4) Pernyataan menolak memberikan opini atau tidak memberikan pendapat (TMP) menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.

7. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Disamping Penerapan SAP, Kualitas SDM, Implementasi Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi juga mempengaruhi proses akuntansi pemerintahan didalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.”

Menurut Bastian (2006:134):

“Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. ”

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa SAP merupakan prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

SAP di Indonesia diatur pertama sekali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan basis kas menuju basis akrual, selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Terdapat 2 (dua) lampiran dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, yaitu lampiran I menggunakan basis akrual dan lampiran II menggunakan basis kas menuju akrual dengan mengkomodir kembali PP Nomor 24 Tahun 2005 yang diperuntukan bagi entitas yang belum mampu menggunakan basis akrual.

Laporan keuangan sesuai SAP dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 secara sistematis dan terstruktur mengisyaratkan laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah harus mengandung unsur:

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan Indikator dari penerapan SAP yang digunakan dari hasil modifikasi penulis adalah:

- 1) Seluruh transaksi dicatat menggunakan metode akrual basis dan basis kas sampai dengan akhir tahun 2014 sedangkan mulai tahun 2015 menggunakan metode akrual basis.
- 2) Praktek standar untuk pencatatan traksaksi keuangan
- 3) Digunakan Untuk menyediakan informasi dan pengambilan keputusan secara terkomputerisasi.
- 4) Dimana sistem dirancang secara berjenjang dan dimulai pada sumber data di daerah

- 5) Untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- 6) Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- 7) Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standat pencatatan akuntansi pada umumnya
- 8) Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik

b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Perubahan tersebut merupakan suatu perubahan yang bersifat paradigmatik, sementara perubahan yang lebih bersifat pragmatik, yaitu terkait dengan penatausahaan keuangan daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian intern, laporan, serta pengawasan. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Widodo (2001) mendefinisikan perubahan tersebut membutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Wiley (2002:3) mendefinisikan “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”.

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, satuan kerja harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas,

yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, indikator dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang digunakan dari hasil modifikasi penulis adalah:

- 1) Sub bagian keuangan/akuntansi berlatar belakang pendidikan minimal lulusan D3 akuntansi.
- 2) Sub bagian keuangan/ memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas.
- 3) Peran dan tanggungjawab Fungsi akuntansi Sumber daya pendukung
- 4) Peran dan tanggungjawab seluruh pegawai sub bagian keuangan/ akuntansi ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.
- 5) Uraian tugas sub bagian keuangan/akuntansi sesuai dengan fungsi akuntansi.
- 6) Sub bagian Keuangan/akuntansi memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup.
- 7) Pelatihan/keahlian untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas dilakukan.
- 8) SKPD memiliki sumber daya manusia yang berkualitas mampu menyusun LKPD sesuai SAP.

c. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Secara sederhana, pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran

dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan Pengendalian intern yang didefinisikan oleh COSO (1992) adalah:

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:

1. *Effectiveness and efficiency of operations*
2. *Reliability of financial reporting*
3. *Compliance with applicable laws and regulations.”*

Menurut Wilkinson *et al.* dalam Indriasari (2008:57):

“Terdapat 6 (enam) komponen didalam menjelaskan sistem pengendalian intern, yaitu:

1. *Standard Operating Procedure (SOP)*
2. Pemisahan wewenang.
3. Dokumen dan catatan yang memadai
4. Tindakan disiplin atas pelanggaran.
5. Pembatasan akses.

Pengertian pengendalian (*control*) menurut Azhar Susanto (2007:88) adalah “Pengendalian (*control*) meliputi semua metode, kebijakan, dan prosedur organisasi yang menjamin keamanan harta kekayaan perusahaan, akurasi dan kelayakan data manajemen serta standar operasi manajemen lainnya”.

Menurut COSO (*Communication Of Sponsoring Organization*) yang dikutip oleh Santoyo Gondodiyoto (2009:153) menyatakan:

“Internal Control adalah suatu proses, melibatkan *board of director*, manajemen, komite audit, internal audit dan seluruh anggota organisasi dan memiliki tiga tujuan utama, yaitu: efektivitas dan efisiensi operasi, mendorong kehandalan laporan keuangan dan dipatuhi hukum dan peraturan yang ada”.

Sedangkan sistem pengendalian intern menurut Petrovits *et al* (2011:5):

“Internal control is broadly defined as the process put in place by management to provide reasonable assurance regarding the achievement of effective and efficient operations, reliable financial reporting, and compliance with laws and regulations “

PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan:

“Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi”.

Dalam menunjang pencapaian tujuan, pengendalian internal memerlukan komponen pengendalian internal. Menurut Sawyers (2005:58), *Statement Of Auditing Standards* (SAS) mendefinisikan lima komponen pengendalian internal yang saling berkaitan pada pernyataan COSO, yaitu:

1) Lingkungan pengendalian (*Control environment*)

Lingkungan pengendalian menunjukkan atmosfir atau suasana (*sets the tone*) dalam suatu organisasi/ perusahaan yang mempengaruhi kesadaran pengendalian (*control consciousness*) dari orang-orang dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian ini merupakan fondasi bagi komponen lainnya dan sangat dipengaruhi oleh suasana yang diciptakan dari atas atau *tone at the top*

2) Penilaian risiko (*Risk assessment*)

Penilaian risiko merupakan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola berbagai risiko dalam organisasi dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

3) **Aktivitas pengendalian (*Control activities*)**

Aktivitas pengendalian mencakup kebijakan dan prosedur untuk membantu meyakinkan bahwa semua tindakan dilaksanakan sesuai dengan arahan manajemen secara efektif

4) **Informasi dan komunikasi (*Information and communication*)**

informasi dan komunikasi adalah sistem informasi dan komunikasi memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk memperoleh dan berbagi informasi yang diperlukan untuk mengelola, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional

5) **Pengawasan.**

Monitoring (pemantauan), merupakan proses penilaian terhadap kualitas dan efektivitas dari sistem pengendalian intern, termasuk modifikasi dan penyempurnaannya apabila diperlukan. Terdapat hubungan langsung antara ketiga kategori tujuan yang harus dicapai dengan kelima komponen pengendalian intern (menunjukkan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan). Bila dirangkum dalam satu kesatuan dengan definisi pengendalian intern dalam COSO (1992) dalam bentuk *Internal Control – Integrated Framework* menunjukkan lima komponen pengendalian intern merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dalam rangka pencapaian tujuan, *effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial* dan *compliance with laws and regulations*.

Berdasarkan uraian di atas, indikator dari Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang digunakan dari hasil modifikasi penulis adalah:

- 1) Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran telah dibuatkan *Standard Operating Procedure* (SOP).
- 2) Adanya pemisahan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi.
- 3) Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.
- 4) Terdapat tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.

- 5) Pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses.
- 6) Terdapat langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer.

d. Komitmen Organisasi

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka, yaitu komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan dan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. Dengan demikian adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang *reliable* sesuai dengan SAP.

Menurut Meyer ell (1991, dalam Soekidjan, 2009:124) meyakini Komitmen dapat juga berarti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, dan individu berupaya serta berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi tersebut.

Mowday *et al.* dalam Darma (2004:45) menyatakan komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (*goal*) yang ingin dicapai organisasi.

Menurut Ikhsan dan Ishak (2008:35) bahwa:

“Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. Komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Komitmen organisasi yang rendah akan membuat individu untuk berbuat untuk kepentingan pribadinya”.

Mowday, *et. al.* dalam Ikhsan dan Ishak (2008:37) mengemukakan bahwa komitmen organisasi terbangun apabila masing-masing individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi dan atau profesi, antara lain:

- 1) Identifikasi (*identification*), yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi.
- 2) Keterlibatan (*involvement*), yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan.
- 3) Loyalitas (*loyalty*), yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal.

Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini menurut pandangan Soekidjan (2009:201) mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi.

Lebih lanjut Soekidjan (2009:203) menjelaskan bahwa secara umum komitmen kuat terhadap organisasi terbukti, meningkatkan kepuasan kerja, mengurangi absensi dan meningkatkan kinerja

Menurut Quest (1995, dalam Soekidjan, 2009:205) komitmen merupakan nilai sentral dalam mewujudkan soliditas organisasi. Hasil penelitian Quest tentang komitmen organisasi mendapatkan hasil:

- 1) Komitmen tinggi dari anggota organisasi berkorelasi dengan tingginya motivasi dan meningkatnya kinerja.
- 2) Komitmen tinggi berkorelasi dengan kemandirian dan *Self Control*.
- 3) Komitmen tinggi berkorelasi dengan kesetiaan terhadap organisasi.
- 4) Komitmen tinggi berkorelasi dengan tidak terlibatnya anggota dengan aktifitas kolektif yang mengurangi kualitas dan kuantitas kontribusinya.

Pada konteks pemerintahan, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan menjadi relatif lebih tepat. Selain itu, komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian

kinerja yang diharapkan (Nouri dan Parker, 1996:76; Chong dan Chong, 2002:82; Wentzel, 2002:165). Dengan adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang *reliable* sesuai dengan SAP.

Berdasarkan uraian diatas, indikator dari Komitmen Organisasi yang digunakan dari hasil modifikasi penulis adalah:

- 1) *Afektive Commitment*
- 2) *Normative Commitmen*
- 3) *Continuance commitment*

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000:34). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Tingginya biaya tenaga kerja manusia yang diperlukan dalam pemrosesan data membuat pemrosesan secara manual kurang efektif jika ditinjau dari sisi volume dan biaya pemrosesan. Pemrosesan secara manual memiliki biaya yang stabil pada angka yang cukup tinggi. Sementara dengan menggunakan mesin, meski investasi awal lebih besar biayanya, namun pada perkembangannya akan dapat mengurangi biaya pemrosesan dengan tetap menjaga volume. Sedangkan pengolahan data dengan menggunakan komputer, akan dapat terus mengurangi biaya-biaya pada posisi yang paling rendah dibandingkan dengan metoda pengolahan yang lain.

Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi,

tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian atas keakurasian data.

Sistem juga menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya. Hanya saja pengkomputerisasian sistem informasi akuntansi seringkali mengubah karakter aktivitas. Data mungkin dikumpulkan dengan peralatan khusus. Catatan akuntansi menggunakan lebih sedikit kertas. Kebanyakan, jika tidak semuanya, tahapantahapan pemrosesan dilakukan secara otomatis. *Output* lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak. Terlebih lagi, *Output* dapat didistribusikan kepada orang lain yang terhubung lewat LAN, yang lebih penting dari semua perubahan ini adalah peningkatan dalam hal (Wilkinson *et al.*, 2000:76):

- 1) Pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat,
- 2) Keakurasian dalam perhitungan dan perbandingan lebih besar,
- 3) Biaya pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah,
- 4) Penyiapan laporan dan *Output* lainnya lebih tepat waktu,
- 5) Tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi ketika dibutuhkan,
- 6) Pilihan pemasukan data dan penyediaan *Output* lebih luas/banyak.
- 7) Produktivitas lebih tinggi bagi karyawan dan manager yang belajar untuk menggunakan komputer secara efektif dalam tanggung jawab rutin dan pembuatan keputusan.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan Informasi Keuangan kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan

pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Wilkinson et al., (2000:160) mengatakan pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, indikator dari Pemanfaatan Teknologi Informasi yang digunakan dari hasil modifikasi penulis adalah:

- 1) Sub bagian keuangan/akuntansi memiliki *software* aplikasi Untuk melaksanakan tugas seperti Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Sistem informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
- 2) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
- 3) Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- 4) Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.
- 5) Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.
- 6) Peralatan yang usang/rusak didata dan segera diperbaiki tepat pada waktunya.
- 7) Terdapat sistem keamanan komputer (*antivirus*) yang diperbarui secara teratur.

f. Faktor-Faktor Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Mendapatkan Opini WTP.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang merupakan rujukan bagi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dan memberikan pendapat/opini atas kewajaran yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Rendahnya kualitas laporan tidak saja disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan itu sendiri atau belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan dan atau peran internal audit masih lemah, tetapi juga

dipengaruhi oleh faktor dalam standar pemeriksaan keuangan itu sendiri,

Pemeriksaan BPK dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dengan tujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan mendasarkan pada:

1) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

BPK menilai efektifitas terhadap proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya organisasi melalui keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta pemantauan dan pengendalian.

2) Ketaatan terhadap perundang-undangan.

BPK menilai ketatan terhadap peraturan yang bersifat nasional meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri. Selain itu BPK menilai kesesuaian yang bersifat lokal meliputi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

3) Kecukupan pengungkapan (*disclosure*)

BPK menilai apakah pengungkapan (*disclosure*) terhadap hal-hal yang perlu diketahui publik di dalam laporan keuangan telah dilakukan secara transparan. Pengungkapan hal tersebut dimasukan di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk)

4) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

BPK menilai terhadap penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan sistem akuntansinya. Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) sistem besar yaitu Sistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Milik

Negara atau Daerah (SIMBADA/SIMDA). Selain itu BPK menilai terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Permasalahan lain dari penyelenggaraan pemerintah daerah adalah banyaknya opini hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah belum optimal. Demikian juga pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat yang belum mencapai hasil yang memuaskan yaitu belum memperoleh opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerahnya. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Jenis opini yang diberikan adalah:

- 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/*Unqualified Opinion*
- 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/*Qualified Opinion*
- 3) Tidak Wajar (TW)/*Adverse Opinion*
- 4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/*Disclaimer Opinion*

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya mengenai Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah secara keseluruhan, maupun keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan pemerintah dengan menggunakan beberapa variabel, seperti:

- 1) Xu, *et al.* (2003) meneliti faktor kunci dari kualitas informasi akuntansi studi kasus di Australia. Hasil penelitiannya menyatakan sumber daya manusia, sistem, organisasi, dan faktor eksternal merupakan faktor kritis menentukan kualitas informasi akuntansi.
- 2) Choirunisah (2008) meneliti Faktor-Faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi instansi studi pada KPPN Malang. Populasi yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian Choirunisah (2008) berjumlah 96 aparat pegawai negeri sipil di lingkungan KPPN Malang. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa kemampuan sumber daya manusia dan organisasi tim

berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan satuan kerja.

- 3) Nugraheni dan Subaweh (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitiannya, Nugraheni dan Subaweh (2008) menggunakan data kualitas laporan keuangan, penerapan SAP, pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB, ketersediaan sarana dan prasarana, dan persepsi pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan. Data yang digunakan merupakan data primer, yang dikumpulkan dengan mendistribusikan kuesioner yang berisi 46 pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Terdapat pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
- 4) Indriasari dan Nahartyo (2008) meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada pemerintah kota Palembang dan kabupaten Ogan Ilir). Populasi dalam penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) adalah bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD di Pemerintah kota Palembang dan kabupaten Ogan Ilir. Penyampelan atas responden dilakukan secara purposive sampling, dan didapat sebanyak 211 sampel untuk dijadikan responden penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan. Indriasari dan Nahartyo (2008) juga menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

- 5) Aritonang dan Syarif (2009) melakukan pengujian keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Untuk penelitiannya, Aritonang dan Syarif menyebarkan kuesioner sebanyak 145 eksemplar kuesioner kepada responden penelitian. Hasil analisis yang dilakukan menemukan bukti empiris bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, sedangkan sumber daya manusia dan perangkat pendukung tidak signifikan mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan tentang keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan pemerintah.
- 6) Mustafa, dkk (2010) melakukan penelitian tentang analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari. Mustafa, dkk dalam penelitiannya mengkonfirmasi keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan menggunakan tiga variabel: Kapasitas SDM, Pengendalian Intern dan Pemanfaatan IT. Populasi dalam penelitian Mustafa, dkk (2010) adalah di bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD di Kota Kendari. Penyampelan atas responden dilakukan secara purposive sampling, dan didapat sebanyak 144 sampel untuk dijadikan responden penelitian. Berdasarkan hasil analisis, Mustafa, dkk menemukan kapasitas SDM tidak berpengaruh terhadap keterandalan, namun pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Keterandalan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktuan pelaporan keuangan, sementara kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kapasitas SDM berpengaruh terhadap keterandalan bisa disebabkan memang karakteristik SDM di Kota Kendari masih memiliki kapasitas yang rendah dan taraf pendidikan yang masih relatif rendah khususnya dalam bidang akuntansi. Keterandalan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan bisa disebabkan oleh upaya untuk memenuhi sebuah kriteria penyajian pelaporan keuangan yang andal, diperlukan berbagai upaya baik yang

bersifat material maupun non material, yang mengakibatkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan sebuah sistem pelaporan keuangan yang andal akan semakin lama.

- 7) Arfianti (2011) meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). dalam penelitiannya mengkonfirmasi nilai informasi pelaporan keuangan dengan menggunakan 3 (tiga) variabel yaitu informasi, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, faktor eksternal. Arfianti mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada sebanyak 110 responden, yang dibagikan kepada responden yang merupakan kepala dan staf bagian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan PLS (*Partial Least Square*). Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Disamping itu, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh.
- 8) Rosalin (2011) melakukan penelitian dengan mengangkat topik penelitian: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan *Timeliness* Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang). Dalam penelitiannya, Rosalin mengkonfirmasi Keandalan dan *Timeliness* Pelaporan Keuangan dengan menggunakan tiga variabel: pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan komitmen organisasi. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan langsung kepada responden. Data yang berhasil dikumpulkan berasal dari 102 responden yang merupakan staf pelaporan keuangan BLU di Kota Semarang. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, Rosalin menemukan pemanfaatan teknologi, pengendalian intern akuntansi, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan

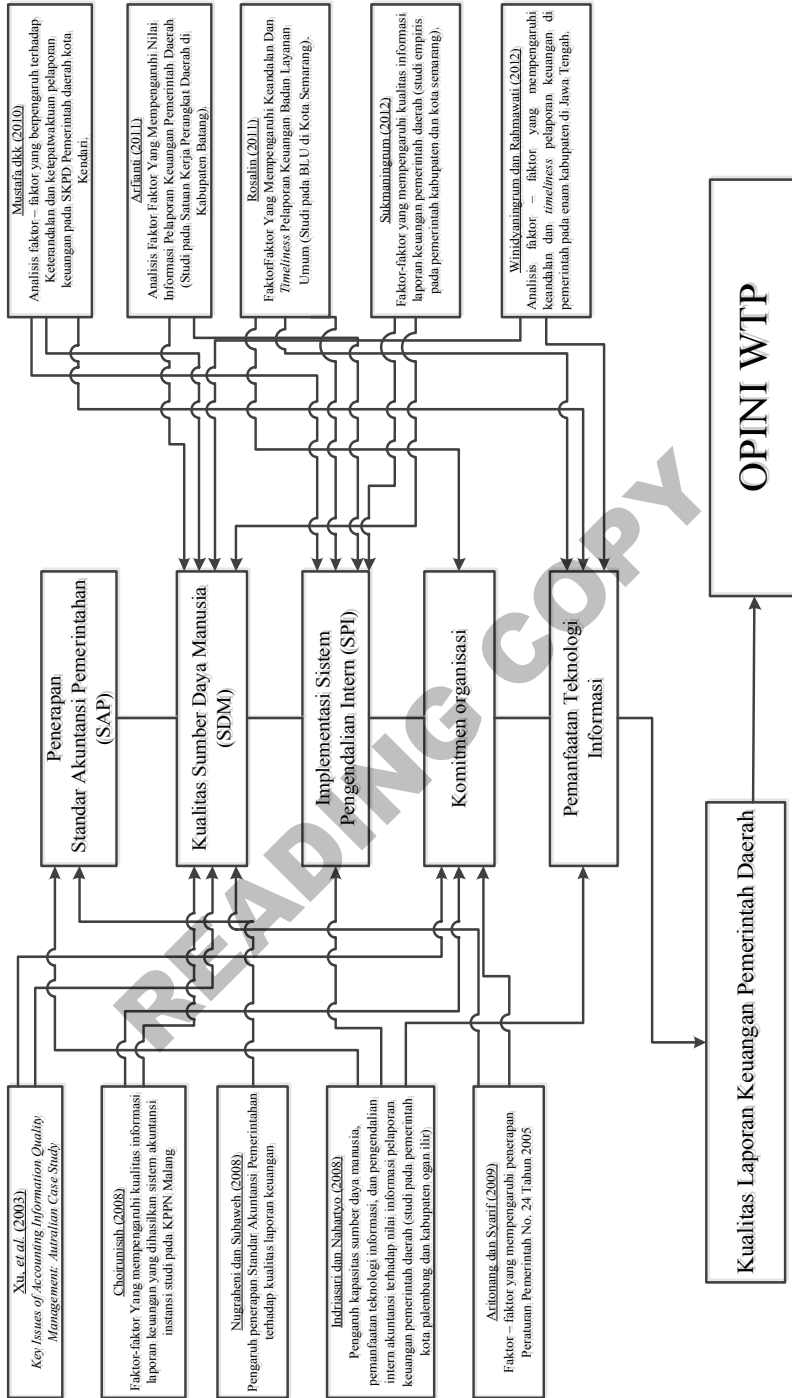
terhadap keandalan pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas sumber daya manusia dan pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* pelaporan keuangan.

- 9) Sukmaningrum (2012) melakukan penelitian dengan mengangkat topik analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Sukmaningrum dalam penelitiannya menganalisis tiga faktor yang diduga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, faktor eksternal. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 150 responden, yang dibagikan kepada responden yang merupakan staf pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan SPSS seri 17.00. Hasil analisis yang dilakukan menyimpulkan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh. Kompetensi sumber daya manusia tidak signifikan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia itu sendiri dari segi kualitas dan kuantitas. Faktor eksternal tidak dapat digunakan sebagai pemoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Faktor eksternal berperan sebagai variabel bebas dan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, hal ini dikarenakan dinamika perubahan sektor pemerintahan tidak diakomodasi oleh kesiapan sumber daya manusia dan tidak proaktif terhadap tekanan-tekanan publik.
- 10) Winidyaningrum dan Rahmawati (2012) melakukan penelitian mengenai keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan di pemerintah pada enam kabupaten di Jawa Tengah. Untuk

penelitiannya Winidyaningrum dan Rahmawati menyebarkan kuesioner kepada sebanyak 186 responden yang tersebar di keenam Pemerintah Kabupaten se Jawa Tengah. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa sumber daya manusia signifikan mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/ tata usaha keuangan sudah mencukupi baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Pemanfaatan teknologi informasi signifikan mempengaruhi keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan pemerintah. Sedangkan sumber daya manusia tidak signifikan mempengaruhi *timeliness* pelaporan keuangan pemerintah.

Dari uraian di atas dapat digambarkan landasan teori secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

READING COPY



Gambar 2.1
Landasan Teori Secara Keseluruhan

Untuk lebih jelasnya, matriks beberapa penelitian terdahulu di atas, ditunjukkan pada ringkasan diringkas dalam Tabel 2.1 di bawah ini:

READING COPY

Tabel 2.1
Daftar Peneliti terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti Terdahulu	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Xu, et al. (2003)	Key Issues of Accounting Information Quality Management: Autralian Case Study	Variabel Bebas: Sumber daya manusia, sistem organisasi, dan faktor eksternal Variabel terikat: Kualitas Informasi akuntansi	Sumber daya manusia, sistem, organisasi, dan faktor eksternal merupakan faktor kritis menentukan kualitas informasi akuntansi	Tidak adanya variabel Penerapan SAP, Implementasi SPI, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Opini WTP
	Choirunisah (2008)	Faktor-faktor Yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi instansi studi pada KPPN Malang.	Variabel Bebas: Kemampuan Sumber daya manusia dan Organisasi tim Variabel Terikat: Kualitas informasi Keuangan satuan kerja	Kemampuan sumber daya manusia dan organisasi tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan Satuan kerja.	Tidak adanya variabel Penerapan SAP, Implementasi SPI, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Opini WTP

No	Judul Penelitian	Peneliti Terdahulu	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Nugraheni dan Subaweh (2008)	Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan	<p>Variabel Bebas: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pengetahuan Pengelola UAPPA EI dan UAPPB dan ketersediaan Sarana dan prasarana</p> <p>Variabel terikat: Kualitas laporan Keuangan Nilai informasi Pelaporan keuangan pemerintah daerah.</p>	Terdapat pengaruh penerapan SAP terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Terdapat pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.	Tidak adanya variabel Penerapan SDM, Implementasi SPI, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi dan Opini WTP
	Indriasari dan Nahartyo (2008)	Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada Pemerintah Kota Palembang Dan Kabupaten Ogan Ilir)	<p>Variabel bebas: Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi</p> <p>Variabel terikat: Nilai informasi Pelaporan keuangan pemerintah daerah</p>	Kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah	Tidak adanya variabel Penerapan SAP, Komitmen Organisasi dan Opini WTP

No	Judul Penelitian	Peneliti Terdahulu	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Aritonang dan Syarif (2009)	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu	Variabel bebas: Komitmen organisasi, sum-ber daya manusia dan perangkat pendukung Variabel terikat: Penerapan Peraturan Peme-rintah No. 24 Tahun 2005	Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, sedangkan sumber daya manusia dan perangkat pendukung tidak signifikan mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005	Tidak adanya variabel, Penerapan SAP, Implementasi SPI, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Opini WTP
	Mustafa dkk (2010)	Analisis faktor – faktor yang berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada SKPD Pemerintah daerah kota kendari.	Variabel bebas: Kapasitas SDM, Pengendalian Intern Akuntansi & Pemanfaatan IT Variabel terikat: Keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan	Kapasitas SDM tidak berpengaruh terhadap keter-andalan, namun pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Keterandalan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sementara kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi Informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.	Tidak adanya variabel, Penerapan SAP, Komitmen Organisasi dan Opini WTP

No	Judul Penelitian	Peneliti Terdahulu	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Arfianti (2011)	Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang).	Variabel bebas: Informasi, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan faktor eksternal. Variabel terikat: Nilai informasi pelaporan keuangan	Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Disamping itu, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh	Tidak adanya variabel, Penerapan SAP, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Opini WTP
	Rosalin (2011)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang).	Variabel bebas: Pemanfaatan Teknologi in-formasi, pengendalian intern akuntansi dan komitmen organisasi. Variabel terikat: Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan	Pemanfaatan teknologi, pengendalian intern akuntansi, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap timeliness pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas sumber daya manusia dan pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh	Tidak adanya variabel, Kualitas SDM, Penerapan SAP dan Opini WTP

No	Judul Penelitian	Peneliti Terdahulu	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Sukmaningrum (2012)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Semarang).	Variabel bebas: Kualitas sumber daya manusia, Sistem pengendalian intern dan faktor eksternal. Variabel terikat: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh. Faktor eksternal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.	Tidak adanya variabel, Penerapan SAP, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Opini WTP
	Winiyanningrum dan Rahmawati (2012)	Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi keandalan dan timeliness pelaporan keuangan di pemerintah pada enam kabupaten di Jawa Tengah.	Variabel bebas: Sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi Variabel terikat: Keandalan dan Timeliness pelaporan keuangan	Sumber daya manusia signifikan mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi signifikan mempengaruhi keandalan dan timeliness pelaporan keuangan pemerintah. Sedangkan sumber daya manusia tidak signifikan mempengaruhi timeliness pelaporan keuangan pemerintah	Tidak adanya variabel, Penerapan SAP, Implementasi SPI, Komitmen Organisasi, dan Opini WTP

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan variabel bebas yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Tehnologi Informasi serta kaitannya untuk mendapatkan Opini WTP.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi dengan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan pemerintahan daerah yang handal, yang biasa dikerjakan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer.

Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan anPemerintah yang baik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 paragraf lima tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdapat hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dari uraian sebelumnya bahwa SAP merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Menurut pendapat lain seperti Deddi Nordiawan (2006) menyatakan bahwa adanya Pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintahan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu “SAP

diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Dengan pernyataan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai suatu pertanggungjawaban kebijakan pemerintah daerah memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi. Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia sub bagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Nazier (2009), yang memberikan temuan empiris bahwa 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan (Nazier, 2009). Selain itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Zetra (2009) ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi. Disamping itu, pemahaman staf terhadap teknologi informasi juga masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki

nilai, diantaranya adalah keandalan. Penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) memperoleh hasil bahwa fungsi dan proses akuntansi telah dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi sehingga dapat membantu keandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan (Indriasari dan Nahartoyo,2008) .

Indriasari dan Nahartoyo (2008) dalam penelitiannya mengenai nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah dengan menggunakan survey terhadap kepala dan staf bagian akuntansi. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pengendalian intern akuntansi telah memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pelaporan keuangan pemerintah yang tercermin dari keandalan kualitas laporan keuangan.

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka, yaitu Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan dan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. Dengan demikian adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang *reliable* sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penelitian Aritonang dan Syarif (2009) yang meneliti mengenai keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada pemerintahan. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa komitmen organisasi yang tinggi berdampak pada keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sehingga dapat meningkatkan kualitas keandalan laporan keuangan pemerintah daerah

Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009)

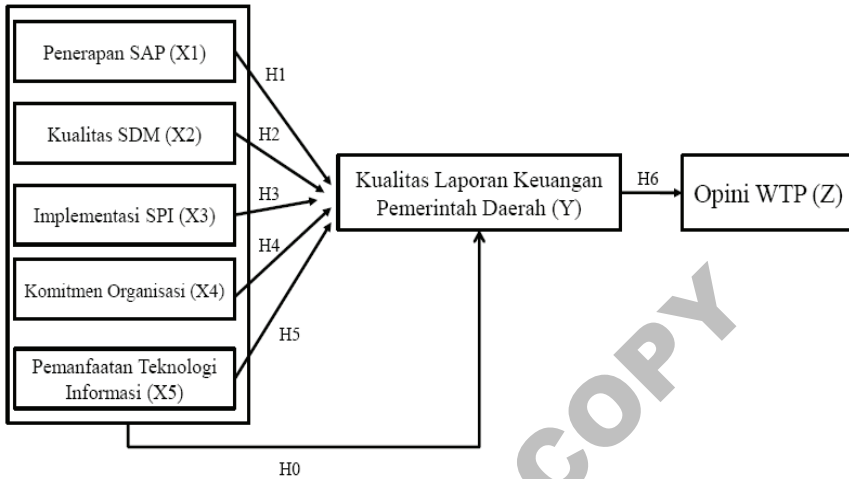
Menurut Indriasari dan Nahartoyo (2008), perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna atau *multiprocessing*. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi .

Penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) memperoleh bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Meningkatnya kualitas laporan tidak secara otomatis menjamin Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan mendapatkan Opini WTPP, sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 tentang “Standar Pemerintah Keuangan Negara” dijelaskan bahwa BPK akan melakukan pemeriksaannya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan dengan tujuan memberikan pendapat/opini dengan mendasarkan kepada (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (2) Kecukupan pengungkapan (*disclosure*), (3) Ketaatan/kepatuhan terhadap perundang-undangan dan (4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Dengan demikian bagi pemerintah daerah yang ingin opini atas laporan keuangannya mendapatkan nilai yang baik (Opini WTP), juga harus memperhatikan ke 4 (empat) unsur fokus pemeriksaan BPK tersebut.

Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

Gambar 2.2.
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, telah diidentifikasi adanya beberapa variabel independen (X) yang diperkirakan baik secara parsial ataupun simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pemerintah daerah yang berdampak untuk mendapatkan opini WTP (Z). Model dalam penelitian ini dapat digambarkan pada hipotesis di bawah ini:

- H₀ : Seberapa besar Pengaruh Simultan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*
- H₁ : Seberapa besar Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*
- H₂ : Seberapa besar Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*

- H3 : Seberapa besar Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*
- H4 : Seberapa besar Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*
- H5 : Seberapa besar Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*
- H6 : Seberapa besar Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Perolehan Opini WTP*

READING COPY

READING COPY

BAHAN/OBJEK DAN METODE PENELITIAN

A. Bahan/Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI), Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi secara simultan atau parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan Opini WTP dengan mengambil tempat penelitian pada pemerintah daerah yang berada di Lingkungan Wilayah Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini mengambil tempat survey di Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta di Wilayah Administrasi Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar.

Wilayah Administrasi Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat diambil sebagai tempat penelitian karena letak geografis, jumlah kabupaten dan kota yang relatif besar yaitu berjumlah 10 kabupaten dan kota, sehingga dianggap dapat mewakili untuk dijadikan penelitian yang mewakili Propinsi Jawa Barat.

Penelitian lebih difokuskan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset pada Wilayah Administrasi Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dan dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni 2014.

Unit analisis adalah sumber informasi mengenai variabel yang akan diolah pada tahap analisa data, unit analisis dapat berupa individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan penelitian, yaitu unit yang mengelola laporan keuangan pemerintah daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

B. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Faktor-faktor yang diteliti adalah sebagai berikut:

1) Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Variabel Y) dan Opini WTP (Variabel Z).

2) Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Variabel X1), Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (Variabel X2), Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) (Variabel X3), Komitmen Organisasi (Variabel X4) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (Variabel X5).

Untuk menghindari kesalahpahaman atau untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pelaksanaan penelitian ini, maka perlu diberikan definisi operasional variabel yang akan diteliti sebagai dasar dalam menyusun kuesioner penelitian. Masing-masing variabel diukur dengan menggunakan model Skala

Likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, mempunyai skor 1, (2) Tidak Setuju, mempunyai skor 2, (3) Netral, mempunyai skor 3, (4) Setuju, mempunyai skor 4, dan (5) Sangat Setuju, mempunyai skor 5. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau tidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Definisi operasional variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Opini WTP (*Variabel Z*).

Opini WTP adalah variabel dependen atau terikat dalam penelitian ini, Opini audit adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Jenis opini hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK yang diberikan adalah:

- (1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/Unqualified Opinion
- (2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/Qualified Opinion
- (3) Tidak Wajar (TW)/Adverse Opinion
- (4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/Disclaimer Opinion.

Opini yang paling baik adalah WTP (*Unqualified Opinion*) yang diberikan oleh BPK, Opini ini diberikan karena pemeriksa meyakini, berdasarkan bukti-bukti hasil pemeriksaan yang dikumpulkan, bahwa laporan keuangan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material, yaitu:

- 1) Penyajian laporan keuangan telah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, tidak ada salah saji material dan telah diungkapkan secara memadai.
- 2) Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dibangun/diterapkan telah cukup memadai, sehingga dapat mengamankan harta dan kebijakan manajemen.
- 3) Semua transaksi yang dilakukan telah sesuai ketentuan yang berlaku (tidak ada temuan yang material yang mempengaruhi opini hasil pemeriksaan).

Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud adalah Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan (disclosure), Ketaatan/

kepatuhan terhadap perundang-undangan dan Efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*Variabel Y*)

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan variabel dependen atau terikat penelitian ini adalah kemampuan atau ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu andal, relevan, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami.

3) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (*Variabel X1*).

Dalam penelitian ini penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah sebagai variabel independen atau variabel bebas. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengihktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Jadi penerapan SAP adalah pelaksanaan seluruh kandungan yang terdapat dalam SAP dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. (Pengantar SAP PP. Nomor 71 Tahun 2010).

4) Kualitas Sumber Daya Manusia (*Variabel X2*)

Kualitas SDM yang merupakan variabel bebas dalam penelitian ini adalah kemampuan dari staf atau pegawai dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh responden, pemahaman tentang tugasnya, kesiapan dalam melakukan perubahan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Implementasi Sistem Pengendalian Intern (*Variabel X3*)

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan variabel bebas dalam penelitian ini yang merupakan suatu cara untuk mengarahkan,

mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

6) Komitmen Organisasi (*Variabel X4*)

Komitmen Organisasi yang merupakan variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesanggupan untuk bertanggungjawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang. Komitmen tidak ada hubungannya sama sekali dengan bakat, kepintaran atau talenta. Komitmen disini adalah keinginan dari Pengelola Keuangan SKPD melakukan perubahan sesuai dengan adanya perubahan peraturan dan perundang-undangan. Komitmen organisasi didefinisikan sebagai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya.

7) Pemanfaatan Teknologi Informasi (*Variabel X5*)

Pemanfaatan teknologi informasi adalah variabel bebas dalam penelitian ini merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce* dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.* , 2000:34). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (1) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2012).

Penjabaran Variabel Operasional ke dalam indikator-indikator yang akan mendasari penyusunan kuesioner dapat dilihat pada gambar dan Tabel sebagai berikut:

TABEL 3.1
Daftar Operasional Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
	Opini WTP	<p>Opini yang paling baik adalah WTP (<i>Unqualified Opinion</i>) yang diberikan oleh BPK, Opini ini diberikan karena pemeriksa meyakini, berdasar bukti-bukti hasil pemeriksaan yang dikumpulkan, bahwa laporan keuangan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyajian laporan keuangan telah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, tidak ada salah saji material dan telah diungkapkan secara memadai. 2) Sistem pengendalian intern yang dibangun/diterapkan telah cukup memadai, sehingga dapat mengamankan harta dan kebijakan manajemen. 3) Semua transaksi yang dilakukan telah sesuai ketentuan yang berlaku (tidak ada temuan yang material yang mempengaruhi opini hasil pemeriksaan). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, 2. Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures), 3. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan 	Ordinal

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Laporan keuangan yang disusun sudah memenuhi kriteria dari sebuah laporan keuangan yang kualitatif dengan ukuran-ukuran normatif (Relevan, Keandalan, Dapat Dibandingkan, Dapat Dipahami) sehingga dapat memenuhi tujuannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan <ul style="list-style-type: none"> • <i>Feedback value</i> • <i>Predictive value</i> • Tepat waktu • Lengkap 2. Keandalan <ul style="list-style-type: none"> • Jujur • Dapat diverifikasi • Netralitas 3. Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya 4. Pemahaman para pengguna 	Ordinal
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	SAP adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Jadi penerapan SAP adalah pelaksanaan seluruh kandungan yang terdapat dalam SAP dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh transaksi dicatat menggunakan metode akrual basis dan basis kas 2. Praktek standard untuk pencatatan traksaksi keuangan 3. Digunakan Untuk menyediakan informasi dan pengambilan keputusan secara terkomputerisasi. 4. Sistem dirancang secara berjenjang dan dimulai pada sumber data di daerah 5. Untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. 	Ordinal

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
	Kualitas Sumber Daya Manusia (X2)	Kemampuan dari staf atau pegawai dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh responden, pemahaman tentang tugasnya, kesiapan dalam melakukan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah	<p>6. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi SAP</p> <p>7. Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya</p> <p>8. Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik</p> <p>1. Sub bagian keuangan/akuntansi berlatar belakang pendidikan minimal lulusan D3 akuntansi.</p> <p>2. Sub bagian keuangan/akuntansi memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas.</p> <p>3. Peran dan tanggungjawab fungsi akuntansi sumber daya pendukung</p> <p>4. Peran dan tanggungjawab seluruh pegawai sub bagian keuangan/akuntansi ditetapkan secara jelas.</p> <p>5. Uraian tugas sub bagian keuangan/akuntansi sesuai dengan fungsi akuntansi.</p> <p>6. Sub bagian keuangan/akuntansi memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup.</p> <p>7. Pelatihan/keahlian untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas.</p> <p>8. SKPD memiliki sumber daya manusia yang berkualitas mampu menyusun LKPD sesuai SAP</p>	Ordinal

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
	Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) 2. Pemisahan wewenang 3. Dokumen dan catatan yang memadai 4. Tindakan disiplin atas pelanggaran 5. Pembatasan akses 6. Langkah-langkah pencegahan kerusakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran telah dibuatkan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP). 2. Adanya pemisahan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi. 3. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. 4. Terdapat tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku. 5. Pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses. 6. Terdapat langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer. 	Ordinal
	Komitmen organisasi	Kesanggupan untuk bertanggungjawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang. Komitmen tidak ada hubungannya sama sekali dengan bakat, kepintaran atau talenta. Komitmen disini adalah keinginan dari pengelola keuangan melakukan perubahan sesuai dengan adanya perubahan peraturan dan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Afektive Commitment</i> <ul style="list-style-type: none"> • Kebanggaan terhadap organisasi/ lembaga kepada orang lain • Kesamaan nilai-nilai pribadi dengan nilai-nilai organisasi • Kebanggaan menjadi bagian dari organisasi/lembaga 	Ordinal

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
			<p>2. <i>Normative Commitment</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesiediaan untuk bekerja lebih keras demi kesuksesan organisasi • Kesiediaan menerima tugas apa saja untuk mewujudkan loyalitas terhadap organisasi/ lembaga • Organisasi/ lembaga sebagai inspirasi cara mencapai kinerja <p>3. <i>Continuance Commitment</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebih memilih organisasi/ lembaga ini daripada organisasi lain • Pengakuan terhadap organisasi/ lembaga sebagai tempat kerja terbaik • Kepeculian terhadap kepentingan /nasib organisasi / lembaga. 	
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Software</i> aplikasi 2) Proses akuntansi secara komputerisasi 3) <i>Software</i> sesuai peraturan-perundangan 4) Laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi 5) Pemeliharaan peralatan 6) Perbaikan peralatan yang rusak/usang 7) Terdapat antivirus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sub bagian keuangan/akuntansi memiliki <i>software</i> aplikasi Untuk melaksanakan tugas seperti Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Sistem informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). 2. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi. 	Ordinal

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
			3. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan perundang undangan. 4. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi. 5. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur. 6. Peralatan yang usang/rusak didata dan segera diperbaiki tepat pada waktunya. 7. Terdapat sistem keamanan komputer (antivirus) yang diperbarui secara teratur	

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam setiap penelitian, peneliti dituntut untuk menguasai teknik pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif dari sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
- 2) Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder, data sekunder didapat melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan (*Library Reseach*). Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara:

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

- (1) Wawancara (Interview), yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak- pihak yang terkait langsung dan berkompeten dengan permasalahan yang penulis teliti.
- (2) Kuesioner, teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada

responden dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah penyusun laporan keuangan pada pemerintah daerah yang berada di Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Jawa Barat (survey pada pemerintah daerah di lingkungan Wilayah Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat), dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.

- (3) Dokumentasi, pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada LHP BPK Tahun Anggaran 2012 di Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Mulai dari literature dan buku-buku yang ada.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Biro Keuangan pada Provinsi Jawa Barat dan seluruh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset pada pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat (survey pada pemerintah daerah di lingkungan Wilayah Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat) dengan jumlah seluruhnya 11 yang terdiri dari 1 Provinsi dan 10 pemerintah kabupaten dan kota. Dimana masing-masing Biro Keuangan Provinsi dan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tersebut akan diberikan 10 (lima) kuesioner yang akan diisi oleh penyusun laporan keuangan terdiri dari kepala atau staf pada dinas tersebut. Sehingga total responden yang akan diberikan kuesioner sebanyak 110 kuesioner untuk 110 responden.

Pengambilan Jumlah Sampel dalam penelitian ini didasarkan pernyataan untuk penelitian deskriptif, sampelnya 10% dari populasi, penelitian korelasional, paling sedikit 30 elemen populasi, penelitian perbandingan kausal, 30 elemen per kelompok, dan untuk penelitian eksperimen 15 elemen per kelompok (*Gay dan P.L. Diehl*, 1992:235). Rata-rata populasi pada Biro Keuangan pada Provinsi Jawa Barat dan seluruh Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset pada pemerintah daerah di lingkungan Wilayah Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat adalah ±120 orang.

Prosedur pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode *sampling* di Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Untuk mendapatkan data dari responden digunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang dikirim surat atau diantar sendiri oleh penulis dengan 1 tahap sebanyak 110 kuesioner dan ditunggu selama 10 hari.

Pengambilan sampel (*sampling method*) terhadap responden dilakukan secara *purposive sampling* dan *proportionate stratified random sampling*.

Purposive sampling yaitu digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003:266-267). Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah para kepala atau staf yang melaksanakan fungsi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan *proportionate stratified random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel bila populasinya yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah teknik *non probability sampling*. Teknik *sampling non probabilitas* adalah teknik pengambilan sampel yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar.

Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sampel yang benar-benar dapat mewakili (*representative*) dan dapat menggambarkan populasi sebenarnya. Tidak semua daerah atau kelompok populasi diteliti, cukup dua atau tiga daerah kelompok yang diambil sampelnya untuk diteliti.

F. Metode Analisis

Penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Data-data penelitian diukur ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan skala likert 5 poin (*5-point likert scale*).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*). Teknik analisis jalur ini digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat (Sugiyono, 2010:59).

G. Rancangan Uji Hipotesis

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas dan reliabilitas termasuk salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam menyusun kuesioner, tujuannya adalah agar dapat menggambarkan fenomena yang ingin diukur dan kebenarannya dapat dipercaya, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis ini digunakan dengan tujuan mengetahui apakah data yang akan diolah mempunyai tingkat keabsahan (*valid*) dan dapat dipercaya (*reliabel*).

a. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi diantara masing-masing pernyataan dengan skor total. Adapun rumus dari pada korelasi *pearson* adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i) (\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi pearson

X = Skor item pertanyaan

Y = Skor total item pertanyaan

N = Jumlah responden dalam pelaksanaan uji coba instrument

Menurut Friedenberg (1995:128) biasanya dalam pengembangan dan penyusunan skala-skala psikologi digunakan harga koefesien korelasi yang minimal sama dengan 0,3 dengan demikian semua item yang memiliki korelasi kurang dari 0,3 dapat disisihkan dan item-item yang akan dimasukkan dalam alat-alat adalah item-item yang memiliki korelasi diatas 0,3 dengan pengertian semakin tinggi korelasi itu mendekati angka satu (1,00) maka semakin baik pula konsistensinya (validitas).

Setelah dapat ditentukan bahwa pertanyaan pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini valid, maka dilanjutkan dengan uji reabilitas.

b. Uji Reliabilitas

Reliabel berkenaan dengan derajat konsistensi data dalam interval waktu tertentu (Sugiyono, 2008:2). Teknik yang digunakan untuk mengukur reabilitas ialah teknik *alpha cronbrach*. Pengujian reabilitas dengan teknik *alpha cronbrach* ini dilakukan untuk jenis interval (sugiono, 2007:365).

Berikut ini adalah rumus untuk menghitung nilai *alpha cronbrach*:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] - \left[1 - \frac{\sum S_i}{S_t} \right]$$

Dimana:

r_{11} = Nilai Reliabilitas

$\sum S_i$ = Jumlah Varians skor tiap-tiap item

S_t = Variansi total

k = Banyaknya butir pernyataan

Koefisien reabilitas skala haruslah diusahakan setinggi mungkin, yang besarnya mendekati satu. Adapun kaidah keputusan menggunakan nilai kritis *alpha cronbrach* yaitu jika nilai koefisien ≥ 0.70 maka instrument tersebut dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian (Hair et.al, 1998:104).

H. Rancangan Implikasi Hasil Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Persiapan yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan dan memeriksa lembar kuesioner dan memberikan nilai (skoring) sesuai dengan sistem penilaian yang telah ditetapkan. Nilai yang diperoleh merupakan indikator untuk pasangan variabel independen X1, X2, X3, X4, X5 dan variabel dependen Y, serta variabel antara Z yang diasumsikan berhubungan linier. Kegiatan berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Dengan menggunakan analisis jalur ini dapat ditunjukkan pengaruh dari suatu variabel penyebab (eksogen) terhadap variabel akibat (endogen) melalui koefisien lintasan atau koefisien jalur dengan simbol P_{yxi} . Hubungan antar variabel dalam analisis jalur ada 2, yaitu:

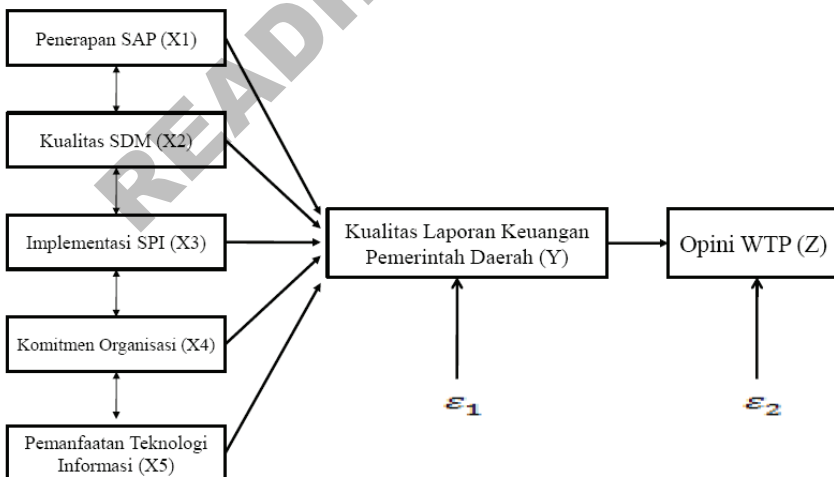
- 1) Pengaruh langsung biasanya digambarkan dengan panah satu arah dari satu variabel ke variabel lainnya.
- 2) Pengaruh tidak langsung digambarkan dengan panah satu arah pada satu variabel ke variabel lain, kemudian dari variabel lain panah satu arah ke variabel berikutnya.

Persyaratan yang diperlukan dalam analisis jalur adalah:

- 1) Hubungan antar variabel harus merupakan hubungan linier dan aditif.
- 2) Semua variabel residu tidak mempunyai korelasi satu sama lain.
- 3) Skala pengukuran baik pada variabel penyebab maupun pada variabel akibat sekurang-kurangnya interval.

Variabel akibat pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan (Y) dan variabel antara opini WTP (Z), sedangkan variabel penyebabnya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Kualitas SDM (X2), Implementasi Sistem Pengendalian Intern (X3), Komitmen Organisasi (X4), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X5).

Struktur hubungan sebab akibat dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1.
Struktur Hubungan Sebab Akibat

Data yang dihasilkan skalanya masih skala ordinal sedangkan untuk keperluan analisis jalur minimal skala interval, oleh karena itu data yang dalam skala ordinal tersebut ditransformasi terlebih dahulu ke dalam skala interval dengan menggunakan *Methods Successive Interval* (MSI). Langkah kerja *Methods Successive Interval* (MSI) adalah sebagai berikut (Rasyid, 1993:33):

- 1) Menentukan berapa banyak orang yang mendapatkan skor 1, 2, 3, 4 dan 5 dari setiap butir pertanyaan pada kuesioner, yang disebut dengan frekuensi.
- 2) Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut dengan proporsi. Ditentukan proporsi kumulatif.
- 3) Dengan menggunakan tabel distribusi normal baku, dihitung nilai Z tabel untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh.
- 4) Menentukan Nilai Densitas untuk setiap nilai Z yang diperoleh (dari tabel).
- 5) Menentukan Nilai Skala (NS) dengan menggunakan rumus:

$$NS = \frac{(\text{density at lower limit} - \text{density at upper limit})}{(\text{area below upper limit} - \text{area below lower limit})}$$

- a. Menentukan nilai transformasi (Y) dengan menggunakan rumus:

$$Y = NS + k$$

$$k = 1 - |_{\min}$$

Setelah transformasi interval, selanjutnya dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas data digunakan untuk memenuhi asumsi dilakukannya analisis statistik parametrik yang akan melakukan penaksiran sekaligus pengujian, dimana untuk kepentingan ini variabel yang bersifat *random* harus berdistribusi normal.

Rasio *skewness* dan rasio *kurtosis* dapat dijadikan petunjuk apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Sebagai pedoman, bila rasio *skewness* dan *kurtosis* berada di antara -1,96 hingga 1,96 maka distribusi data adalah normal (Ghozali, 2005:37). Dengan N adalah jumlah observasi, maka nilai rasio tersebut dihitung menggunakan rumus berikut:

$$Z_{skewness} = \frac{skewness}{\sqrt{\frac{6}{N}}}$$

$$Z_{kurtosis} = \frac{kurtosis}{\sqrt{\frac{24}{N}}}$$

Langkah-langkah pengerjaan analisis jalur adalah sebagai berikut (Kusnendi, 2007:26):

- 1) Menggambar terlebih dahulu diagram jalurnya sesuai dengan hipotesis yang akan diuji. Adapun bentuk persamaan jalurnya adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_{X_1} X_1 + \beta_{X_2} X_2 + \dots + \beta_{X_k} X_k + \epsilon$$

Keterangan:

Y : variabel akibat (endogenus)

β : koefisien jalur antara variabel akibat dan variabel penyebab

ϵ : variabel residu

- 2) Menghitung matrik korelasi antar variabel eksogen & endogen.

$$R_X = \begin{bmatrix} 1 & r_{X_1 X_2} & \dots & r_{X_1 X_k} \\ & 1 & \dots & r_{X_2 X_k} \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

Rumus untuk menentukan korelasinya adalah sebagai berikut:

$$r_{x_1} = \frac{n \sum_{h=1}^n X_j Y_h - \sum_{h=1}^n X_j \sum_{h=1}^n Y_h}{\sqrt{\left[n \sum_{h=1}^n X_j^2 - \left(\sum_{h=1}^n X_j \right)^2 \right] \left[n \sum_{h=1}^n Y_h^2 - \left(\sum_{h=1}^n Y_h \right)^2 \right]}}; j = 1, 2, \dots, k$$

- 3) Menghitung matrik korelasi antar variabel eksogen yang menyusun sub struktur.

$$R_x = \begin{bmatrix} 1 & r_{X_1X_2} & \dots & r_{X_1X_k} \\ & 1 & \dots & r_{X_2X_k} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

4) Menghitung Matrik invers.

$$R^{-1} = \begin{bmatrix} C_1 & C_2 & \dots & C_{1k} \\ & C_2 & \dots & C_{2k} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & C_k \end{bmatrix}$$

5) Menghitung semua koefisien jalur $i = 1, 2, \dots, k$ dengan rumus:

$$\begin{bmatrix} P_{X_U X_1} \\ P_{X_U X_2} \\ \vdots \\ P_{X_U X_k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_1 & C_2 & \dots & C_k \\ & C_2 & \dots & C_k \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & C_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{X_U X_1} \\ r_{X_U X_2} \\ \vdots \\ r_{X_U X_k} \end{bmatrix}$$

6) Menghitung R^2 y ($X_1 X_2 \dots X_k$) yang merupakan koefisien determinasi total X_1, X_2, \dots, X_k terhadap Y yang rumusnya:

$$R^2 y(x_1 x_2 \dots x_k) = \begin{bmatrix} P_{X_U X_1} & P_{X_U X_2} & \dots & P_{X_U X_k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{X_U X_1} \\ r_{X_U X_2} \\ \vdots \\ r_{X_U X_k} \end{bmatrix}$$

7) Menghitung P_{yE} berdasarkan rumus:

$$P_{yE} = \sqrt{1 - R^2 y(x_1 x_2 \dots x_k)}$$

8) Menguji keberartian model secara keseluruhan dengan menggunakan uji F. Hipotesis pada pengujian ini adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \rho_{YX_1} = \rho_{YX_2} = \dots = \rho_{YX_k} = 0$$

$$H_1 : \text{sekurang-kurangnya ada sebuah } P_{YX_j} \neq 0$$

Statistik ujinya:

$$F = \frac{(n - k - 1)R^2_{YX_1 X_2 \dots X_k}}{k(1 - R^2_{YX_1 X_2 \dots X_k})}$$

Statistik uji di atas mengikuti distribusi F-Snedecor dengan derajat bebas penyebut ($v_1 = k$) dan derajat bebas pembilang ($v_2 = n - k - 1$), dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel penelitian.

Kriteria Pengujian:

Tolak H_0 bila $F_{hitung} > F_{tabel}$

- 9) Jika uji F signifikan maka selanjutnya diuji masing-masing koefisien jalur untuk mengetahui keberartiannya yang dikenal dengan Teori Trimming, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Tentukan hipotesis uji misalkan
 $H_0: \rho_{yx1} = 0$ versus $H_1: \rho_{yx1} \neq 0$
 - Menggunakan statistik uji:

$$t = \frac{P_{yx1}}{\sqrt{\frac{(1 - R_{y(x1 \times 2 \dots \times k)}^2) CR_{x1x2}}{(n - k - 1)}}$$

Keterangan:

$i = 1, 2, \dots, k$

k = banyaknya variabel penyebab dalam sub struktur t berdistribusi t - studen dengan derajat bebas $(n-k-1)$

- Tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$
- Jika H_0 diterima berarti variabel tersebut dapat dikeluarkan dari persamaan analisis jalur dan hitung ulang persamaan jalur yang baru tanpa variabel yang non signifikan. Selanjutnya setelah mendapat persamaan jalur yang baru diuji lagi signifikansinya sampai semua variabel penyebab yang kita punyai signifikan terhadap variabel akibat. Inilah yang akan menjadi model persamaan analisis jalur.

I. Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Secara Keseluruhan (Simultan)

- 1) Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Kualitas SDM (X2), Implementasi Sistem Pengendalian Intern (X3), Komitmen Organisasi (X4), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X5) terhadap kualitas laporan keuangan

Hipotesisnya:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Kualitas SDM (X2), Implementasi Sistem Pengendalian Intern (X3), Komitmen Organisasi (X4), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X5) terhadap kualitas laporan keuangan

H1: Seberapa besar pengaruh yang signifikan dari variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Kualitas SDM (X2), Implementasi Sistem Pengendalian Intern (X3), Komitmen Organisasi (X4), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X5) terhadap kualitas laporan keuangan

2) Kualitas laporan keuangan (Y) terhadap opini WTP

Hipotesisnya:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh hubungan yang signifikan antara kualitas laporan keuangan dengan opini WTP

H_1 : Seberapa besar pengaruh hubungan yang signifikan antara kualitas laporan keuangan dengan opini WTP

Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan hipotesis adalah berdasarkan uji F, yaitu:

- a. Jika statistik F hitung $<$ F tabel, maka H_0 diterima
- b. Jika statistik F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak

atau dapat juga dengan membandingkan P-value dengan nilai Alpha jika p-value $<$ alpha yang digunakan maka H_0 ditolak.

2. Pengujian Secara Individual (Parsial)

Apabila pada pengujian secara keseluruhan H_0 ditolak berarti sekurang-kurangnya ada sebuah $P_{YX_i} \neq 0$. Untuk mengetahui P_{YX_i} mana yang sama dengan nol, atau untuk menguji hipotesis konseptual yang diajukan, maka dilakukan pengujian secara individual.

Langkah kerja pada pengujian koefisien ini adalah menentukan hipotesis statistik yang akan diuji sebagai berikut:

- 1) H_0 : tidak ada pengaruh yang signifikan antara standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan
 H_1 : Seberapa besar pengaruh yang signifikan antara standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan
- 2) H_0 : tidak ada pengaruh yang signifikan antara kualitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan
 H_1 : Seberapa besar pengaruh yang signifikan antara kualitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan
- 3) H_0 : tidak ada pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan

- H_1 : Seberapa besar pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan
- 4) H_0 : tidak ada pengaruh yang signifikan antara komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan
 H_1 : Seberapa besar pengaruh yang signifikan antara komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan
- 5) H_0 : tidak ada pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan
 H_1 : Seberapa besar pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan
- 6) H_0 : tidak ada pengaruh yang signifikan antara kualitas laporan keuangan terhadap opini WTP
 H_1 : Seberapa besar pengaruh yang signifikan antara kualitas laporan keuangan terhadap opini WTP

Dalam penelitian ini, dasar pengambilan keputusan, untuk menentukan hipotesis adalah berdasarkan uji t, yaitu:

- a. Jika statistik $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima.
- b. Jika statistik $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, atau $t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak.

atau dapat juga dengan membandingkan P-value dengan nilai Alpha jika $p\text{-value} < \alpha$ yang digunakan maka H_0 ditolak.

READING COPY

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum

Provinsi Jawa Barat mempunyai wilayah yang luas, jumlah kabupaten/kota sebanyak 27 unit, Kecamatan 561 unit, dan kelurahan/desa sebanyak 5.772 unit karena itu diperlukan rentang kendali dan simpul koordinasi yang memadai yaitu melalui Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 4 (empat) wilayah yaitu:

- 1) Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Bogor terdiri dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor dan Kota Sukabumi (5 daerah).
- 2) Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Purwakarta membawahi Wilayah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi Kabupaten Depok, Kabupaten Subang dan Kota Depok (7 daerah).
- 3) Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Cirebon mengkoordinir Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu (5 daerah).

4) Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar (11 daerah).

Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat Berlokasi di Jl. Ciledug Nomor 120 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota. Bangunan Kantor Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Garut, dibangun pada masa Kolonial Belanda Tahun 1910. Semula bangunan ini berfungsi sebagai rumah tinggal penguasa perkebunan teh Dayeuhmanggung (Masyarakat memanggilnya Tuan Baron).

Setelah Kemerdekaan RI, bangunan tersebut dipergunakan menjadi Kantor Pembantu Bupati Wilayah I Garut Kota (Kantor Kewedanaan). Pada Tahun 1965 menjadi Kantor Inspektorat Pembantu Gubernur Wilayah Priangan Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 tahun 1978 tentang Pedoman, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Gubernur, dan Keputusan Gubernur Nomor 794/OK-100-HUK/SK/79, Tanggal 18 Juli 1979 maka dibentuklah Kantor Pembantu Gubernur Wilayah V Priangan yang berlokasi di jalan Ciledug Garut yang kemudian di rubah berdasarkan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu menjadi Badan Koordinasi Wilayah Priangan yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 21 Garut yang kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 diganti menjadi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV hingga sampai saat ini.

Secara geografis wilayah Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat sebagian besar merupakan daerah pegunungan, perbukitan dan pantai di sebelah Selatan dan di sebelah Timur berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah.

Kondisi geografi tersebut secara umum merupakan keuntungan, yaitu berupa Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Industri, Pariwisata dan Jasa serta Pendidikan, yang sering dijuluki sebagai paru-parunya Jawa Barat

Tugas Pokok Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV adalah menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Fungsi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV adalah

- 1) Penyelenggaraan dan penetapan kebijakan koordinasi bidang kesekretariatan, pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan sosial di Wilayah IV.
- 2) Pemberian dukungan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan bidang kesekretariatan, pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan sosial di Wilayah IV.
- 3) Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Program Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV adalah:

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah Kegiatan Pra Musrenbang Perencanaan Pembangunan Wilayah IV.
- 2) Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD dan Bantuan Provinsi ke Kab./Kota di Wilayah IV.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur.
- 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran.
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor (APK), Kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Bakorpembang Wilayah IV (Tahap 2) Kegiatan Penyediaan *Bidding Room* LPSE
- 6) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor.
- 7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal BKPPW-I
- 8) Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat Kegiatan Siaga dan Tanggap Bantuan Bagi Korban Bencana Alam.

- 9) Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Kegiatan Unjuk Prestasi Budaya di Kabupaten/Kota se-Wilayah IV.

Untuk lebih memfokuskan Strategi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dalam pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan efisien, hal tersebut diwujudkan ke dalam isu strategis Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV, yaitu sebagai:

- 1) Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan antar level Pemerintahan, yaitu Provinsi dengan Kabupaten dan Kota di Wilayah IV.
- 2) Koordinasi antar Pemerintahan dengan *Multi Stakeholder*.
- 3) Optimalisasi dan penguatan peran Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV.

2. Karakteristik Responden

a. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin responden pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan karakter daripada manusia yakni laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin dimaksud untuk mengidentifikasi setiap kemampuan dan juga sebagai perbandingan jumlah antara laki-laki dan perempuan. Berikut ini adalah gambaran mengenai jenis kelamin responden:

Tabel 4.1.
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	71	65%
2	Perempuan	39	35%
Total		110	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti, 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden adalah laki-laki yakni sebanyak 71 orang atau 65%, sedangkan yang perempuan yakni sebanyak 39 orang atau 35%.

b. Umur Responden

Tabel 4.2.
Umur Responden

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	21-30	17	15%
2	31-40	43	39%
3	41-50	43	39%
4	>50	7	6%
Total		110	100%

Sumber: Hasil pengolahan peneliti, 2014

Tabel diatas memberikan informasi bahwa mayoritas responden berusia 31-40 tahun dan 41-50 tahun yakni sebanyak masing-masing 43 orang atau 39% sedangkan yang paling sedikit berusia lebih besar dari 50 tahun yaitu sebanyak 7 orang atau 6%.

c. Pendidikan Responden

Tabel 4.3.
Pendidikan Responden

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	SMA/Sederajat	10	9%
2	Akademi	4	4%
3	Sarjana	73	66%
4	Magister	20	18%
5	Doktoral	3	3%
Total		110	100%

Sumber: Hasil pengolahan peneliti, 2014

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden berpendidikan sarjana atau S1 yakni sebanyak 73 orang atau 66 % sedangkan yang paling sedikit berpendidikan doktoral yakni sebanyak 3 orang atau 3%. Data tersebut juga menunjukkan bahwa mayoritas Pegawai Negeri Sipil. Hal ini menunjukkan kematangan intelektualitas Pegawai Negeri Sipil berlatar belakang pendidikan sudah berpendidikan tinggi yaitu S1.

3. Uji Validitas Dan Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan *valid* jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2005:19). Mengukur tingkat validitas dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Hasil korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk tersebut akan dibandingkan dengan nilai *r* hitung dengan batas minimal korelasi 0,30. Semua item kuesioner yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 daya pembedanya dianggap memuaskan. Sedangkan item yang memiliki nilai koefisien korelasi di bawah 0,30 dianggap tidak valid dan item yang tidak valid dapat dihilangkan.

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005:19). Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja dengan alat bantu SPSS uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Koefisien reabilitas skala haruslah diusahakan setinggi mungkin, yang besarnya mendekati satu. Adapun kaidah keputusan menggunakan nilai kritis *alpha cronbrach* yaitu jika nilai koefisien ≥ 0.70 maka instrument tersebut dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian (Hair et. al: 1998).

Tabel 4.4
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Item Pertanyaan	Vaiditas			Reliabilitas		
		Koefisien Validitas	Titik Kritis	Kesimpulan	Koefisien Reliabilitas	Titik Kritis	Kesimpulan
Z	1	0.577	0.3	Valid	0.711	0.7	Reliabel
	2	0.472	0.3	Valid			
	3	0.572	0.3	Valid			

Variabel	Item Pertanyaan	Vaiditas			Reliabilitas		
		Koefisien Validitas	Titik Kritis	Kesimpulan	Koefisien Reliabilitas	Titik Kritis	Kesimpulan
Y	1	0.565	0.3	Valid	0.879	0.7	Reliabel
	2	0.612	0.3	Valid			
	3	0.624	0.3	Valid			
	4	0.684	0.3	Valid			
	5	0.671	0.3	Valid			
	6	0.676	0.3	Valid			
	7	0.702	0.3	Valid			
	8	0.466	0.3	Valid			
	9	0.626	0.3	Valid			
X1	1	0.679	0.3	Valid	0.909	0.7	Reliabel
	2	0.714	0.3	Valid			
	3	0.740	0.3	Valid			
	4	0.716	0.3	Valid			
	5	0.684	0.3	Valid			
	6	0.708	0.3	Valid			
	7	0.815	0.3	Valid			
	8	0.629	0.3	Valid			
X2	1	0.650	0.3	Valid	0.877	0.7	Reliabel
	2	0.563	0.3	Valid			
	3	0.703	0.3	Valid			
	4	0.618	0.3	Valid			
	5	0.628	0.3	Valid			
	6	0.701	0.3	Valid			
	7	0.645	0.3	Valid			
	8	0.635	0.3	Valid			
X3	1	0.548	0.3	Valid	0.843	0.7	Reliabel
	2	0.673	0.3	Valid			
	3	0.683	0.3	Valid			
	4	0.602	0.3	Valid			
	5	0.603	0.3	Valid			
	6	0.645	0.3	Valid			

Variabel	Item Pertanyaan	Vaiditas			Reliabilitas		
		Koefisien Validitas	Titik Kritis	Kesimpulan	Koefisien Reliabilitas	Titik Kritis	Kesimpulan
X4	1	0.715	0.3	Valid	0.894	0.7	Reliabel
	2	0.682	0.3	Valid			
	3	0.739	0.3	Valid			
	4	0.676	0.3	Valid			
	5	0.709	0.3	Valid			
	6	0.694	0.3	Valid			
	7	0.473	0.3	Valid			
	8	0.600	0.3	Valid			
	9	0.645	0.3	Valid			
X5	1	0.578	0.3	Valid	0.865	0.7	Reliabel
	2	0.519	0.3	Valid			
	3	0.634	0.3	Valid			
	4	0.755	0.3	Valid			
	5	0.669	0.3	Valid			
	6	0.692	0.3	Valid			
	7	0.636	0.3	Valid			

Sumber: Hasil pengolahan peneliti, 2014

Berdasarkan tabel diatas, untuk item mengenai Opini WTP (Z) memiliki nilai koefisien validiasi diantara 0,472-0,577, item mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) memiliki nilai koefisien validiasi antara 0,46-0,72, item mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah (X1) memiliki koefisien validasi antara 0,629-0,815, item mengenai kualitas SDM (X2) memiliki koefisien validasi antara 0,563-0,703, item mengenai implementasi sistem pengendalian intern (X3) memiliki koefisien validasi antara 0,548-0,683, item mengenai komitmen organisasi (X4) memiliki koefisien validasi antara 0,473-0,715 selanjutnya item mengenai pemanfaatan teknologi informasi memiliki koefisien validasi antara 0,519-0,755. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua item tersebut sudah valid dan dapat digunakan dalam instrumen penelitian selanjutnya.

Nilai koefisien reliabilitas dari item mengenai Opini WTP adalah 0,711, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah 0,879,

penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar 0,909, Kualitas SDM sebesar 0,877, implementasi sistem pengendalian intern sebesar 0,843, komitmen organisasi sebesar 0,894 dan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,865. Ketujuh nilai koefisien reliabilitas tersebut sudah lebih besar dari standar yang ditetapkan yaitu 0,700. Hal ini menunjukkan bahwa angket/kuesioner dengan item pernyataan diatas mempunyai keandalan yang baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa angket atau kuesioner yang digunakan peneliti sudah layak untuk dipergunakan dalam penelitian ini.

4. Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran/deskripsi mengenai tanggapan dari pegawai mengenai opini WTP, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas SDM, implementasi sistem pengendalian intern, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Gambaran data tanggapan responden dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap setiap indikator variabel yang sedang diteliti. Supaya lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden. Prinsip kategorisasi jumlah skor tanggapan responden di adopsi dari buku Metode Penelitian Bisnis karangan Sugiyono (2009) yaitu berdasarkan rentang skor maksimum dan skor minimum dibagi jumlah kategori yang diinginkan dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rentang Skor Kategori} = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{5}$$

Keterangan:

Skor maksimum = jumlah responden x jumlah pernyataan x 5

Skor minimum = jumlah responden x jumlah pernyataan x 1

1) Tanggapan Responden Mengenai Opini WTP (Z)

Opini WTP diukur oleh 3 item pernyataan dengan satu dimensi yaitu opini yang baik. Berikut ini adalah hasil penelitian dari 3 item pernyataan yang diajukan untuk mengukur variabel opini WTP.

Tabel 4.5
Kesesuaian Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	61	55.45%	305
4	Setuju	48	43.64%	192
3	Ragu-Ragu	1	0.91%	3
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	500

Tabel 4.5 memperlihatkan 55,45% pegawai menyatakan setuju mengenai kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan 0,91% menyatakan ragu-ragu akan hal ini. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa pekerjaan yang mereka kerjakan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Tabel 4.6
Kecukupan Pengungkapan (*Adequate Disclosures*)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	46	41.82%	230
4	Setuju	57	51.82%	228
3	Ragu-Ragu	5	4.55%	15
2	Tidak Setuju	1	0.91%	2
1	Sangat Tidak Setuju	1	0.91%	1
	Total	110	100%	476

Tabel 4.6 memperlihatkan 51,82% pegawai menyatakan setuju mengenai kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosures*). Sedangkan 0,91% menyatakan ragu-ragu akan hal ini. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa pekerjaan yang mereka kerjakan sudah memenuhi kecukupan pengungkapan.

Tabel 4.7
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang – Undangan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	61	55.45%	305
4	Setuju	47	42.73%	188
3	Ragu-Ragu	1	0.91%	3
2	Tidak Setuju	1	0.91%	2
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	498

Tabel 4.7 memperlihatkan 55,45% pegawai menyatakan setuju terhadap pernyataan mengenai Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang – Undangan. Sedangkan 0,91% menyatakan ragu-ragu dan tidak setuju akan hal ini. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa pekerjaan yang mereka kerjakan sudah memenuhi syarat Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang – Undangan.

Tabel 4.8

Deskripsi Variabel Opini WTP di Lingkungan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat

Item Pertanyaan	Frekuensi					Skor Total
	5	4	3	2	1	
1	61	48	1	0	0	500
2	46	57	5	1	1	476
3	61	47	1	1	0	498
Rata-Rata Skor Total						491.3333

Sumber: Hasil pengolahan peneliti, 2014

Untuk mengkategorikan bagaimana gambaran mengenai Opini WTP (Z), maka penulis membuat pengkategorian dalam garis interval sebagai berikut:

Jarak interval untuk 110 responden

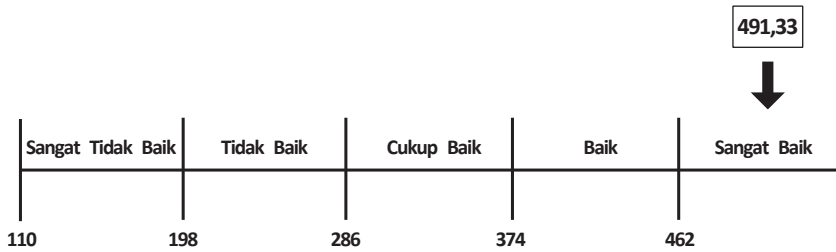
$$\begin{aligned} \text{Skor Minimum} &= \text{Skor Minimum} \times \text{Jumlah Responden} \\ &= 1 \times 110 \\ &= 110 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor Maksimum} &= \text{Skor Maksimum} \times \text{Jumlah Responden} \\ &= 5 \times 110 \\ &= 550 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Selisih} &= \text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum} \\ &= 550 - 110 \\ &= 440 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jarak Interval} &= \text{Interval: Jenjang (5)} \\ &= 440 : 5 \\ &= 88 \end{aligned}$$

Dengan jarak interval sebesar 88 pada masing-masing katagori, maka dapat digambarkan pembagian skor total tanggapan responden mengenai Opini WTP (Z) dalam bentuk garis kontinum sebagai berikut:



Berdasarkan garis kontinum pada gambar diatas rata-rata skor tanggapan responden tentang opini WTP (Z) diperoleh nilai sebesar 491,33 dan dalam pengklasifikasian interval skor tersebut termasuk katagori sangat baik.

2) Tanggapan responden mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (Y)

Kualitas laporan keuangan diukur oleh 9 item pernyataan. Berikut ini adalah hasil penelitian dari 9 item pernyataan yang diajukan untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 4.9
Laporan keuangan yang dihasilkan dapat diuji kembali

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	40	36.36%	200
4	Setuju	67	60.91%	268
3	Ragu-Ragu	3	2.73%	9
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	477

Tabel 4.9 memperlihatkan bahwa 60,91% pegawai setuju terhadap pernyataan laporan keuangan yang dihasilkan dapat diuji kembali. Sedangkan 2,73% pegawai menyatakan ragu-ragu akan hal ini.

Tabel 4.10
Laporan keuangan yang dihasilkan memiliki nilai predictive

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	31	28.18%	155
4	Setuju	71	64.55%	284

3	Ragu-Ragu	3	2. 73%	9
2	Tidak Setuju	3	2. 73%	6
1	Sangat Tidak Setuju	2	1. 82%	2
	Total	110	100%	456

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa 64,55% pegawai setuju terhadap pernyataan laporan keuangan yang dihasilkan memiliki nilai *predictive*. Sedangkan 1,82% pegawai menyatakan sangat tidak setuju akan hal ini.

Tabel 4.11

Laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan waktu yang direncanakan

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	39	35. 45%	195
4	Setuju	59	53. 64%	236
3	Ragu-Ragu	9	8. 18%	27
2	Tidak Setuju	2	1. 82%	4
1	Sangat Tidak Setuju	1	0.91%	1
	Total	110	100%	463

Tabel 4.11 menginformasikan bahwa 53,64% pegawai setuju terhadap pernyataan Laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sedangkan 0,91% pegawai menyatakan sangat tidak setuju akan hal tersebut.

Tabel 4.12.

Laporan keuangan yang dihasilkan sudah lengkap

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	45	40.91%	225
4	Setuju	58	52. 73%	232
3	Ragu-Ragu	5	4.55%	15
2	Tidak Setuju	2	1. 82%	4
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	476

Tabel 4.12 memperlihatkan bahwa 52,73% pegawai setuju terhadap pernyataan Laporan keuangan yang dihasilkan sudah

lengkap. Sedangkan 1,82% pegawai menyatakan tidak setuju akan hal ini.

Tabel 4.13.
Laporan keuangan yang dihasilkan dibuat dengan jujur

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	40	36.36%	200
4	Setuju	62	56.36%	248
3	Ragu-Ragu	7	6.36%	21
2	Tidak Setuju	1	0.91%	2
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	471

Tabel 4.13 memperlihatkan bahwa 56,36% pegawai setuju terhadap pernyataan laporan keuangan yang dihasilkan dibuat dengan jujur. Sedangkan 0,91% pegawai menyatakan tidak setuju akan hal ini.

Tabel 4.14.
Laporan keuangan yang dihasilkan dapat diverifikasi

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	42	38.18%	210
4	Setuju	64	58.18%	256
3	Ragu-Ragu	2	1.82%	6
2	Tidak Setuju	2	1.82%	4
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	476

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa 58,18% pegawai setuju terhadap pernyataan Laporan keuangan yang dihasilkan dapat diverifikasi. Sedangkan 1,82% pegawai menyatakan tidak setuju akan hal ini.

Tabel 4.15
Prinsip netralitas tercermin dengan baik dalam laporan keuangan

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	35	31.82%	175
4	Setuju	65	59.09%	260
3	Ragu-Ragu	9	8.18%	27
2	Tidak Setuju	1	0.91%	2
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	464

Tabel 4.15 menginformasikan bahwa 59,09% pegawai setuju terhadap pernyataan prinsip netralitas tercermin dengan baik dalam laporan keuangan. Sedangkan 0,91% pegawai menyatakan tidak setuju akan hal ini.

Tabel 4.16
Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai alat pembanding dengan periode sebelumnya

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	49	44.55%	245
4	Setuju	56	50.91%	224
3	Ragu-Ragu	4	3.64%	12
2	Tidak Setuju	1	0.91%	2
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	483

Berdasarkan tabel 4.16 diketahui bahwa 50,91% pegawai setuju terhadap pernyataan laporan keuangan dapat dijadikan sebagai alat pembanding dengan periode sebelumnya. Sedangkan 0,91% pegawai menyatakan tidak setuju akan hal ini.

Tabel 4.17
Para pengguna laporan keuangan memahami laporan keuangan yang dihasilkan.

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	39	35.45%	195
4	Setuju	60	54.55%	240

3	Ragu-Ragu	9	8.18%	27
2	Tidak Setuju	2	1.82%	4
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	466

Tabel 4.17 memperlihatkan bahwa 54,55% pegawai setuju terhadap pernyataan para pengguna laporan keuangan memahami laporan keuangan yang dihasilkan. Sedangkan 1,82% pegawai menyatakan tidak setuju akan hal ini.

Tabel 4.18
Deskriptif Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Item Pertanyaan	Frekuensi					Skor Total
	5	4	3	2	1	
1	40	67	3	0	0	477
2	31	71	3	3	2	456
3	39	59	9	2	1	463
4	45	58	5	2	0	476
5	42	64	2	2	0	476
6	42	64	2	2	0	476
7	35	65	9	1	0	464
8	49	56	4	1	0	483
9	39	60	9	2	0	466
Rata-Rata Skor Total						470.7778

Sumber: Hasil pengolahan peneliti, 2014

Untuk mengkategorikan bagaimana gambaran mengenai Opini Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), maka penulis membuat pengkategorian dalam garis interval sebagai berikut:

Jarak interval untuk 110 responden

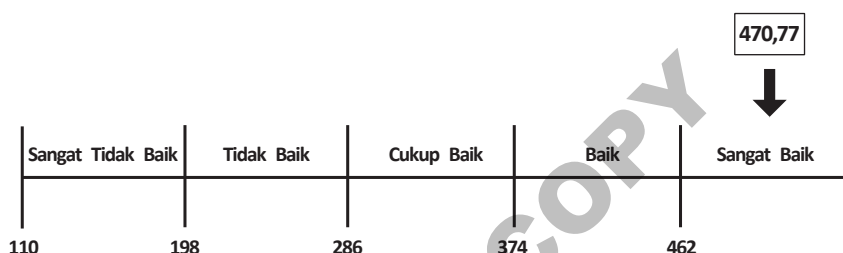
$$\begin{aligned}
 \text{Skor Minimum} &= \text{Skor Minimum} \times \text{Jumlah Responden} \\
 &= 1 \times 110 \\
 &= 110
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Skor Maksimum} &= \text{Skor Maksimum} \times \text{Jumlah Responden} \\
 &= 5 \times 110 \\
 &= 550
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Selisih} &= \text{Skor Maksimum-Skor Minimum} \\ &= 550-110 \\ &= 440 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jarak Interval} &= \text{Interval: Jenjang (5)} \\ &= 440: 5 \\ &= 88 \end{aligned}$$

Dengan jarak interval sebesar 88 pada masing-masing kategori, maka dapat digambarkan pembagian skor total tanggapan responden mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dalam bentuk garis kontinum sebagai berikut:



Berdasarkan garis kontinum pada gambar di atas diketahui rata-rata skor tanggapan responden tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) diperoleh nilai sebesar 470,77 dan dalam pengklasifikasian interval skor tersebut termasuk kategori sangat baik.

3) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_1)

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diukur oleh 9 item pernyataan. Berikut ini adalah hasil penelitian dari 9 item pernyataan yang diajukan untuk mengukur variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1), yaitu:

Tabel 4.19
Semua transaksi sudah dicatat dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	44	40.00%	220
4	Setuju	62	56.36%	248
3	Ragu-Ragu	4	3.64%	12

2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	480

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa 56,36% pegawai setuju terhadap pernyataan bahwa semua transaksi sudah dicatat dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan. Sedangkan 3,64% pegawai ragu-ragu akan hal ini.

Tabel 4.20
Praktek standar dalam SAP
dalam pencatatan transaksi keuangan sudah diterapkan dengan baik

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	40	36.36%	200
4	Setuju	63	57.27%	252
3	Ragu-Ragu	7	6.36%	21
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	473

Berdasarkan tabel 4.20 dapat diketahui bahwa 52,27% pegawai setuju terhadap pernyataan bahwa praktek standar dalam SAP dalam pencatatan transaksi keuangan sudah diterapkan dengan baik. Sedangkan 6,36% pegawai ragu-ragu akan hal ini.

Tabel 4.21
SAP sudah digunakan untuk menyediakan informasi dan mengambil keputusan secara terkomputerisasi

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	37	33.64%	185
4	Setuju	67	60.91%	268
3	Ragu-Ragu	6	5.45%	18
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	471

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa 60,91% pegawai setuju terhadap pernyataan bahwa SAP sudah digunakan untuk menyediakan informasi dan mengambil keputusan secara terkomputerisasi. Sedangkan 5,45% pegawai ragu-ragu akan hal ini.

Tabel 4.22
SAP dirancang secara berjenjang dan dimulai dari sumber data dari daerah

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	34	30.91%	170
4	Setuju	68	61.82%	272
3	Ragu-Ragu	8	7.27%	24
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	466

Tabel 4.22 menginformasikan bahwa 61,82% pegawai setuju terhadap pernyataan bahwa SAP dirancang secara berjenjang dan dimulai dari sumber data dari daerah. Sedangkan 7,27% pegawai ragu-ragu akan hal ini.

Tabel 4.23
SAP dapat mempermudah perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah pusat

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	37	33.64%	185
4	Setuju	66	60.00%	264
3	Ragu-Ragu	7	6.36%	21
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	470

Tabel 4.23 memperlihatkan bahwa 60% pegawai setuju terhadap pernyataan bahwa SAP dapat mempermudah perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan 6,36% pegawai ragu-ragu akan hal ini.

Tabel 4.24
Sistem akuntansi yang digunakan sudah memenuhi SAP

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	41	37.27%	205
4	Setuju	61	55.45%	244
3	Ragu-Ragu	8	7.27%	24
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	473

Dari tabel 4.24 dapat dilihat bahwa 55,45% pegawai setuju terhadap pernyataan bahwa sistem akuntansi yang digunakan sudah memenuhi SAP. Sedangkan 7,27% pegawai ragu-ragu akan hal ini.

Tabel 4.25
Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	41	37.27%	205
4	Setuju	61	55.45%	244
3	Ragu-Ragu	8	7.27%	24
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	473

Berdasarkan tabel 4.25 dapat dilihat bahwa 55,45% pegawai setuju terhadap pernyataan bahwa prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya. Sedangkan 7,27% pegawai ragu-ragu akan hal ini.

Tabel 4.26
Pembuatan Laporan Keuangan Dilaporkan Secara Periodik

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	38	34.55%	190
4	Setuju	69	62.73%	276
3	Ragu-Ragu	3	2.73%	9
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	475

Berdasarkan tabel 4.26 dapat diketahui bahwa 62,73% pegawai setuju terhadap pernyataan bahwa pembuatan laporan keuangan dilaporkan secara periodik. Sedangkan 2,73% pegawai ragu-ragu akan hal ini.

Tabel 4.27
Sumber daya pendukung memiliki peran dan tanggung jawab sebagai fungsi akuntansi

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	46	41.82%	230
4	Setuju	56	50.91%	224
3	Ragu-Ragu	8	7.27%	24
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	478

Dari tabel 4.27 dapat dilihat bahwa 50,91% pegawai setuju terhadap pernyataan bahwa sumber daya pendukung memiliki peran dan tanggung jawab sebagai fungsi akuntansi. Sedangkan 7,27% pegawai ragu-ragu akan hal ini.

Tabel 4.28
Data Deskripsi Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Item Pertanyaan	Frekuensi					Skor Total
	5	4	3	2	1	
1	44	62	4	0	0	480
2	40	63	7	0	0	473
3	37	67	6	0	0	471
4	34	68	8	0	0	466
5	37	66	7	0	0	470
6	41	61	8	0	0	473
7	41	61	8	0	0	473
8	38	69	3	0	0	475
9	46	56	8	0	0	478
Rata-Rata Skor Total						473. 2222

Sumber: Hasil pengolahan peneliti, 2014

Untuk mengkategorikan bagaimana gambaran mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) maka penulis membuat pengkategorian dalam garis interval sebagai berikut:

Jarak interval untuk 110 responden

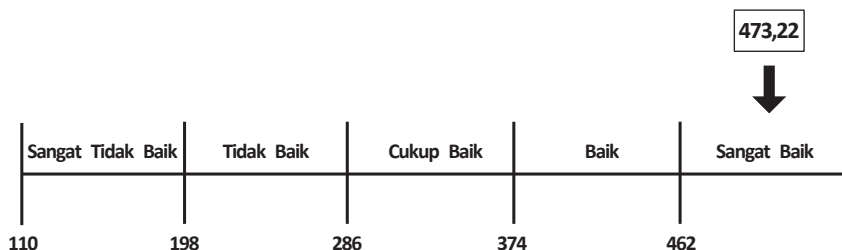
$$\begin{aligned} \text{Skor Minimum} &= \text{Skor Minimum} \times \text{Jumlah Responden} \\ &= 1 \times 110 \\ &= 110 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor Maksimum} &= \text{Skor Maksimum} \times \text{Jumlah Responden} \\ &= 5 \times 110 \\ &= 550 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Selisih} &= \text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum} \\ &= 550 - 110 \\ &= 440 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jarak Interval} &= \text{Interval: Jenjang (5)} \\ &= 440 : 5 \\ &= 88 \end{aligned}$$

Dengan jarak interval sebesar 88 pada masing-masing katagori, maka dapat digambarkan pembagian skor total tanggapan responden mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah dalam bentuk garis kontinum sebagai berikut:



Berdasarkan garis kontinum pada gambar diatas rata-rata skor tanggapan responden tentang penerapan standar akuntansi pemerintah (X1) diperoleh nilai sebesar 473,22 dan dalam pengklasifikasian interval skor tersebut termasuk katagori sangat baik.

4) Kualitas SDM (X2)

Kualitas SDM diukur oleh 8 item pernyataan. Berikut ini adalah hasil penelitian dari 8 item pernyataan yang diajukan untuk mengukur variabel kualitas SDM yaitu:

Tabel 4.29
Latar belakang pendidikan sudah sesuai dengan bidang pekerjaannya

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	20	18.18%	100
4	Setuju	56	50.91%	224
3	Ragu-Ragu	29	26.36%	87
2	Tidak Setuju	5	4.55%	10
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	421

Berdasarkan tabel 4.29 dapat dilihat bahwa 50,91% pegawai menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa latar belakang pendidikan sudah sesuai dengan bidang pekerjaannya. Sedangkan 4,55% pegawai tidak setuju akan hal ini.

Tabel 4.30

Setiap pegawai memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas mengenai tugasnya

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	27	24.55%	135
4	Setuju	68	61.82%	272
3	Ragu-Ragu	15	13.64%	45
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	452

Dari tabel 4.30 dapat dilihat bahwa 61,82% pegawai menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa setiap pegawai memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas mengenai tugasnya. Sedangkan 13,84% pegawai tidak setuju akan hal ini.

Tabel 4.31

Sumber daya pendukung memiliki peran dan tanggung jawab sebagai fungsi akuntansi

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	22	20.00%	110
4	Setuju	75	68.18%	300
3	Ragu-Ragu	13	11.82%	39
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	449

Berdasarkan tabel 4.31 dapat diketahui bahwa 68,18% pegawai menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa sumber daya pendukung memiliki peran dan tanggung jawab sebagai fungsi akuntansi. Sedangkan 11,82% pegawai tidak setuju akan hal ini.

Tabel 4.32

Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai sub bagian keuangan/akuntansi ditetapkan secara jelas

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	32	29.09%	160
4	Setuju	68	61.82%	272
3	Ragu-Ragu	10	9.09%	30
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	462

Tabel 4.32 menunjukkan bahwa 61,82% pegawai menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa peran dan tanggung jawab seluruh pegawai sub bagian keuangan/akuntansi ditetapkan secara jelas. Sedangkan 9,09% pegawai tidak setuju akan hal ini. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai merasa bahwa Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai sub bagian keuangan/akuntansi ditetapkan secara jelas.

Tabel 4.33

Uraian tugas sub bagian keuangan /akuntansi sesuai dengan fungsi akuntansi

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	33	30.00%	165
4	Setuju	72	65.45%	288
3	Ragu-Ragu	5	4.55%	15
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	468

Tabel 4.33 menginformasikan bahwa 65,45% pegawai menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa uraian tugas sub bagian keuangan/akuntansi sesuai dengan fungsi akuntansi. Sedangkan 4,55% pegawai ragu-ragu akan hal ini.

Tabel 4.34

Sub bagian keuangan atau akuntansi memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup.

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	30	27. 27%	150
4	Setuju	59	53. 64%	236
3	Ragu-Ragu	19	17. 27%	57
2	Tidak Setuju	2	1. 82%	4
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	447

Berdasarkan tabel 4.34 dapat dilihat bahwa 54,64% pegawai menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa sub bagian keuangan atau akuntansi memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup. Sedangkan 1,82% pegawai tidak setuju akan hal ini.

Tabel 4.35

Pelatihan diberikan kepada pegawai untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	30	27. 27%	150
4	Setuju	59	53. 64%	236
3	Ragu-Ragu	19	17. 27%	57
2	Tidak Setuju	2	1. 82%	4
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	447

Berdasarkan tabel 4.35 dapat diketahui bahwa 53,64% pegawai menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa pelatihan diberikan kepada pegawai untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas. Sedangkan 1,82% pegawai tidak setuju akan hal ini.

Tabel 4.36
Pegawai mampu menyusun LKPD sesuai dengan SAP

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	38	34.55%	190
4	Setuju	59	53.64%	236
3	Ragu-Ragu	19	17.27%	57
2	Tidak Setuju	2	1.82%	4
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	118	107%	487

Tabel 4.36 menunjukkan bahwa 53,64% pegawai menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa pegawai mampu menyusun LKPD sesuai dengan SAP. Sedangkan 1,82% pegawai tidak setuju akan hal ini.

Tabel 4.37
Deskripsi Variabel Kualitas SDM

Item Pertanyaan	Frekuensi					Skor Total
	5	4	3	2	1	
1	20	56	29	5	0	421
2	27	68	15	0	0	452
3	22	75	13	0	0	449
4	32	68	10	0	0	462
5	33	72	5	0	0	468
6	30	59	19	2	0	447
7	30	59	19	2	0	447
8	38	59	19	2	0	487
Rata-Rata Skor Total						454.125
Kriteria						Baik

Sumber: Hasil pengolahan peneliti, 2014

Untuk mengkategorikan bagaimana gambaran mengenai Kualitas SDM (X₂) maka penulis membuat pengkategorian dalam garis interval sebagai berikut:

Jarak interval untuk 110 responden

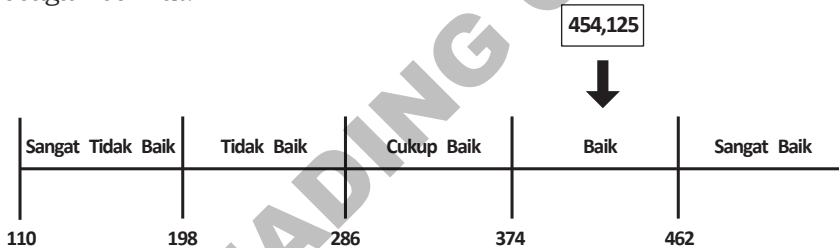
$$\begin{aligned}\text{Skor Minimum} &= \text{Skor Minimum} \times \text{Jumlah Responden} \\ &= 1 \times 110 \\ &= 110\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Skor Maksimum} &= \text{Skor Maksimum} \times \text{Jumlah Responden} \\ &= 5 \times 110 \\ &= 550\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Selisih} &= \text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum} \\ &= 550 - 110 \\ &= 440\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Jarak Interval} &= \text{Interval: Jenjang (5)} \\ &= 440 : 5 \\ &= 88\end{aligned}$$

Dengan jarak interval sebesar 88 pada masing-masing katagori, maka dapat digambarkan pembagian skor total tanggapan responden mengenai kualitas SDM dalam bentuk garis kontinum sebagai berikut:



Berdasarkan garis kontinum pada gambar diatas diketahui rata-rata skor tanggapan responden tentang Kualitas SDM (X2) diperoleh nilai sebesar 454,125 dan dalam pengklasifikasian interval skor tersebut termasuk katagori baik.

5) Implementasi Sistem Pengendalian Intern (X3)

Implementasi Sistem Pengendalian Intern diukur oleh 6 item pernyataan. Berikut ini adalah hasil penelitian dari 6 item pernyataan yang diajukan untuk mengukur variabel implementasi sistem pengendalian intern.

Tabel 4.38
Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran telah dibuatkan Standard Operating Procedure (SOP)

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	30	27.27%	150
4	Setuju	70	63.64%	280
3	Ragu-Ragu	10	9.09%	30
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	460

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 63,64% pegawai menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran telah dibuatkan *Standard Operating Procedure* (SOP). Sedangkan 9,09% pegawai ragu-ragu akan hal ini.

Tabel 4.39
Adanya pemisahan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan transaksi

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	31	28.18%	155
4	Setuju	62	56.36%	248
3	Ragu-Ragu	17	15.45%	51
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	454

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 56,36% pegawai menyatakan setuju terhadap pernyataan adanya pemisahan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan transaksi. Sedangkan 15,45% pegawai ragu-ragu akan hal ini.

Tabel 4.40

Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	29	26.36%	145
4	Setuju	65	59.09%	260
3	Ragu-Ragu	15	13.64%	45
2	Tidak Setuju	1	0.91%	2
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	452

Tabel diatas dapat menunjukkan bahwa 59,09% pegawai menyatakan setuju terhadap pernyataan pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. Sedangkan 0,91% pegawai tidak setuju akan hal ini.

Tabel 4.41

Terdapat tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	24	21.82%	120
4	Setuju	74	67.27%	296
3	Ragu-Ragu	12	10.91%	36
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	452

Tabel diatas menginformasikan bahwa 67,27% pegawai menyatakan setuju terhadap pernyataan terdapat tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku. Sedangkan 10,91% pegawai ragu-ragu akan hal ini.

Tabel 4.42

Pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	27	24.55%	135
4	Setuju	63	57.27%	252
3	Ragu-Ragu	18	16.36%	54
2	Tidak Setuju	2	1.82%	4
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	445

Tabel diatas memperlihatkan bahwa 57,27% pegawai menyatakan setuju terhadap pernyataan pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab. Sedangkan 1,83% pegawai tidak setuju akan hal ini.

Tabel 4.43

Terdapat langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	28	25.45%	140
4	Setuju	64	58.18%	256
3	Ragu-Ragu	17	15.45%	51
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	1	0.91%	1
	Total	110	100%	448

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 58,18% pegawai menyatakan setuju terhadap pernyataan terdapat langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer. Sedangkan 15,45% pegawai ragu-ragu akan hal ini.

Tabel 4.44
 Deskripsi Variabel Implementasi Sistem Pengendalian Intern

Item Pertanyaan	Frekuensi					Skor Total
	5	4	3	2	1	
1	30	70	10	0	0	460
2	31	62	17	0	0	454
3	29	65	15	1	0	452
4	24	74	12	0	0	452
5	27	63	18	2	0	445
6	28	64	17	0	1	448
Rata-Rata Skor Total						451. 8333
Kriteria						Baik

Sumber: Hasil pengolahan peneliti, 2014

Untuk mengkategorikan bagaimana gambaran mengenai Implementasi sistem pengendalian intern (X3) maka dibuatlah pengkategorian untuk 110 responden dalam garis interval sebagai berikut:

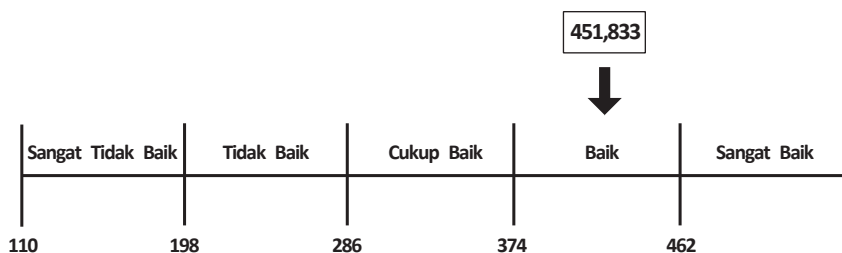
$$\begin{aligned}
 \text{Skor Minimum} &= \text{Skor Minimum} \times \text{Jumlah Responden} \\
 &= 1 \times 110 \\
 &= 110
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Skor Maksimum} &= \text{Skor Maksimum} \times \text{Jumlah Responden} \\
 &= 5 \times 110 \\
 &= 550
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Selisih} &= \text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum} \\
 &= 550 - 110 \\
 &= 440
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Jarak Interval} &= \text{Interval: Jenjang (5)} \\
 &= 440 : 5 \\
 &= 88
 \end{aligned}$$

Dengan jarak interval sebesar 88 pada masing-masing katagori, maka dapat digambarkan pembagian skor total tanggapan responden mengenai implementasi sistem pengendalian intern dalam bentuk garis kontinum sebagai berikut:



Berdasarkan garis kontinum pada gambar diatas diketahui rata-rata skor tanggapan responden tentang implementasi sistem pengendalian intern diperoleh nilai sebesar 451.833 dan dalam pengklasifikasian interval skor tersebut termasuk katagori baik.

6) Komitmen Organisasi (X4)

Komitmen organisasi dalam penelitian ini diukur oleh 9 item pernyataan. Berikut ini adalah penjelasan dari 9 item pernyataan yang mengukur komitmen organisasi.

Tabel 4.45
Terdapat rasa kebanggaan terhadap organisasi atau lembaga kepada orang lain

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	28	25.45%	140
4	Setuju	70	63.64%	280
3	Ragu-Ragu	12	10.91%	36
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	456

Berdasarkan tabel 4.45 dapat dilihat bahwa 63,64% pegawai setuju terhadap pernyataan terdapat rasa kebanggaan terhadap organisasi atau lembaga kepada orang lain. Sedangkan 10,91% pegawai tidak setuju akan hal ini.

Tabel 4.46

Terdapat kesamaan nilai-nilai pribadi dengan nilai-nilai organisasi

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	22	20.00%	110
4	Setuju	61	55.45%	244
3	Ragu-Ragu	26	23.64%	78
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	1	0.91%	1
	Total	110	100%	433

Berdasarkan tabel 4.46 dapat dilihat bahwa 55,54% pegawai setuju terhadap pernyataan bahwa terdapat kesamaan nilai-nilai pribadi dengan nilai-nilai organisasi. Sedangkan 23,64% pegawai ragu-ragu akan hal ini.

Tabel 4.47

Terdapat kebanggaan telah menjadi bagian dari organisasi

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	28	25.45%	140
4	Setuju	68	61.82%	272
3	Ragu-Ragu	14	12.73%	42
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	454

Berdasarkan tabel 4.47 dapat diketahui bahwa 61,82% pegawai setuju terhadap pernyataan bahwa terdapat kebanggaan telah menjadi bagian dari organisasi. Sedangkan 12,73% pegawai ragu-ragu akan hal ini.

Tabel 4.48
Bersedia untuk bekerja lebih keras demi kesuksesan organisasi

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	37	33.64%	185
4	Setuju	67	60.91%	268
3	Ragu-Ragu	6	5.45%	18
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	471

Tabel 4.48 menginformasikan bahwa 60,91% pegawai setuju terhadap pernyataan bersedia untuk bekerja lebih keras demi kesuksesan organisasi. Sedangkan 5,45% pegawai ragu-ragu akan hal ini.

Tabel 4.49
Bersedia untuk menerima tugas apa saja dalam mewujudkan loyalitas terhadap organisasi atau lembaga.

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	33	30.00%	165
4	Setuju	68	61.82%	272
3	Ragu-Ragu	8	7.27%	24
2	Tidak Setuju	1	0.91%	2
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	463

Tabel 4.49 memperlihatkan bahwa 61,82% pegawai setuju terhadap pernyataan bersedia untuk menerima tugas apa saja dalam mewujudkan loyalitas terhadap organisasi atau lembaga. Sedangkan 0,91% pegawai tidak setuju akan hal ini.

Tabel 4.50

Organisasi atau lembaga dapat dijadikan sebagai inspirasi cara mencapai kerja.

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	30	27. 27%	150
4	Setuju	68	61. 82%	272
3	Ragu-Ragu	11	10.00%	33
2	Tidak Setuju	1	0.91%	2
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	457

Berdasarkan tabel 4.50 dapat dilihat bahwa 61,82% pegawai setuju terhadap pernyataan bahwa organisasi atau lembaga dapat dijadikan sebagai inspirasi cara mencapai kerja. Sedangkan 0,91% pegawai tidak setuju akan hal ini.

Tabel 4.51

Bersedia untuk lebih memilih organisasi sendiri daripada organisasi lain.

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	23	20.91%	115
4	Setuju	68	61. 82%	272
3	Ragu-Ragu	16	14.55%	48
2	Tidak Setuju	2	1. 82%	4
1	Sangat Tidak Setuju	1	0.91%	1
	Total	110	100%	440

Berdasarkan tabel 4.51 dapat dilihat bahwa 61,82% pegawai setuju terhadap pernyataan bersedia untuk lebih memilih organisasi sendiri daripada organisasi lain. Sedangkan 0,91% pegawai sangat tidak setuju akan hal ini.

Tabel 4.52

Mengakui bahwa organisasi atau lembaga merupakan tempat kerja yang terbaik

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	33	30.00%	165
4	Setuju	66	60.00%	264
3	Ragu-Ragu	11	10.00%	33
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	462

Berdasarkan tabel 4.52 dapat dilihat bahwa 60% pegawai setuju terhadap pernyataan mengakui bahwa organisasi atau lembaga merupakan tempat kerja yang terbaik. Sedangkan 10% pegawai ragu-ragu akan hal ini.

Tabel 4.53

Memiliki kepedulian terhadap kepentingan atau nasib organisasi

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	33	30.00%	165
4	Setuju	70	63.64%	280
3	Ragu-Ragu	7	6.36%	21
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	466

Berdasarkan tabel 4.53 dapat diketahui bahwa 63,64% pegawai setuju terhadap pernyataan memiliki kepedulian terhadap kepentingan atau nasib organisasi. Sedangkan 6,36% pegawai ragu-ragu akan hal ini.

Tabel 4.54
Deskripsi Variabel Komitmen Organisasi

Item Pertanyaan	Frekuensi					Skor Total
	5	4	3	2	1	
1	28	70	12	0	0	456
2	22	61	26	0	1	433
3	28	68	14	0	0	454
4	37	67	6	0	0	471
5	33	68	8	1	0	463
6	30	68	11	1	0	457
7	23	68	16	2	1	440
8	33	66	11	0	0	462
9	33	70	7	0	0	466
Rata-Rata Skor Total						455.7778
Kriteria						Baik

Sumber: Hasil pengolahan peneliti, 2014

Untuk mengkategorikan bagaimana gambaran mengenai komitmen organisasi (X4) maka penulis membuat pengkategorian dalam garis interval sebagai berikut:

Jarak interval untuk 110 responden

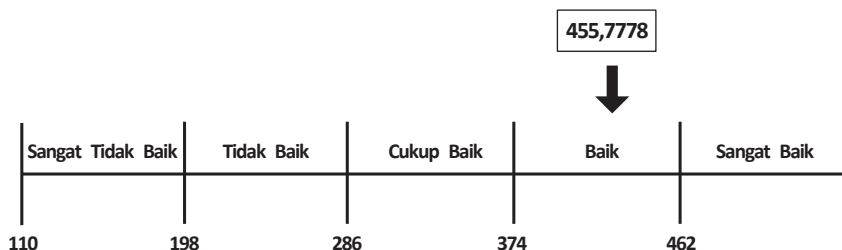
$$\begin{aligned} \text{Skor Minimum} &= \text{Skor Minimum} \times \text{Jumlah Responden} \\ &= 1 \times 110 \\ &= 110 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor Maksimum} &= \text{Skor Maksimum} \times \text{Jumlah Responden} \\ &= 5 \times 110 \\ &= 550 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Selisih} &= \text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum} \\ &= 550 - 110 \\ &= 440 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jarak Interval} &= \text{Interval: Jenjang (5)} \\ &= 440 : 5 \\ &= 88 \end{aligned}$$

Dengan jarak interval sebesar 88 pada masing-masing katagori, maka dapat digambarkan pembagian skor total tanggapan responden mengenai komitmen organisasi dalam bentuk garis kontinum sebagai berikut:



Berdasarkan garis kontinum pada gambar diatas diketahui rata-rata skor tanggapan responden tentang komitmen organisasi diperoleh nilai sebesar 455.777 dan dalam pengklasifikasian interval skor tersebut termasuk katagori baik.

7) Pemanfaatan Teknologi Informasi (X5)

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini diukur oleh 7 item pernyataan. Berikut ini adalah ketujuh item pernyataan yang mengukur pemanfaatan teknologi informasi:

Tabel 4.55

Sub bagian keuangan/ akuntansi memiliki software aplikasi untuk melaksanakan tugas seperti Microsoft Excel, MYOB dan sebagainya.

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	65	59.09%	325
4	Setuju	43	39.09%	172
3	Ragu-Ragu	2	1.82%	6
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	503

Berdasarkan tabel 4.55 dapat dilihat bahwa 59,09% pegawai sangat setuju terhadap pernyataan Sub bagian keuangan/ akuntansi memiliki *software* aplikasi untuk melaksanakan tugas seperti Microsoft Excel, MYOB dan sebagiannya. Sedangkan 1,82% pegawai ragu-ragu akan hal ini.

Tabel 4.56

Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara terkomputerisasi

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	46	41.82%	230
4	Setuju	56	50.91%	224
3	Ragu-Ragu	6	5.45%	18
2	Tidak Setuju	2	1.82%	4
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	476

Tabel 4.56 dapat diketahui bahwa 50,91% pegawai setuju terhadap pernyataan bahwa proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara terkomputerisasi. Sedangkan 1,82% pegawai tidak setuju akan hal ini.

Tabel 4.57

Pengolahan Data Transaksi Keuangan Menggunakan Software Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	55	50.00%	275
4	Setuju	53	48.18%	212
3	Ragu-Ragu	1	0.91%	3
2	Tidak Setuju	1	0.91%	2
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	492

Tabel 4.57 menunjukkan bahwa 48,18% pegawai setuju terhadap pernyataan bahwa pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan 0,91% pegawai tidak setuju akan hal ini.

Tabel 4.58
Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	51	46.36%	255
4	Setuju	51	46.36%	204
3	Ragu-Ragu	8	7.27%	24
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	483

Tabel 4.58 dapat dilihat bahwa 46,36% pegawai setuju terhadap pernyataan bahwa laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi. Sedangkan 7,27% pegawai ragu-ragu akan hal ini. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai merasa bahwa laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.

Tabel 4.59
Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	39	35.45%	195
4	Setuju	52	47.27%	208
3	Ragu-Ragu	19	17.27%	57
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	460

Berdasarkan tabel 4.59 dapat dilihat bahwa 47,27% pegawai setuju terhadap pernyataan bahwa adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur. Sedangkan 17,27% pegawai ragu-ragu akan hal ini.

Tabel 4.60

Peralatan yang using atau rusak didata dan segera diperbaiki tepat pada waktunya

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	36	32. 73%	180
4	Setuju	52	47. 27%	208
3	Ragu-Ragu	22	20.00%	66
2	Tidak Setuju	0	0.00%	0
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	454

Berdasarkan tabel 4.60 dapat diketahui bahwa 47,27% pegawai setuju terhadap pernyataan bahwa peralatan yang using atau rusak pada data dan segera diperbaiki tepat pada waktunya. Sedangkan 20% pegawai ragu-ragu akan hal ini. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai merasa bahwa peralatan yang using atau rusak didata dan segera diperbaiki tepat pada waktunya.

Tabel 4.61

Terdapat sistem keamanan komputer (antivirus) yang diperbaiki secara teratur

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	SKOR
5	Sangat Setuju	40	36. 36%	200
4	Setuju	61	55. 45%	244
3	Ragu-Ragu	8	7. 27%	24
2	Tidak Setuju	1	0.91%	2
1	Sangat Tidak Setuju	0	0.00%	0
	Total	110	100%	470

Berdasarkan tabel 4.61 dapat dilihat bahwa 55,45% pegawai setuju terhadap pernyataan bahwa terdapat sistem keamanan komputer (antivirus) yang diperbaiki secara teratur. Sedangkan 0,91% pegawai ragu-ragu akan hal ini.

Tabel 4.62
Deskripsi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Item Pertanyaan	Frekuensi					Skor Total
	5	4	3	2	1	
1	65	43	2	0	0	503
2	46	56	6	2	0	476
3	55	53	1	1	0	492
4	51	51	8	0	0	483
5	39	52	19	0	0	460
6	36	52	22	0	0	454
7	40	61	8	1	0	470
Rata-Rata Skor Total						476. 8571
Kriteria						Sangat Baik

Sumber: Hasil pengolahan peneliti, 2014

Untuk mengkategorikan bagaimana gambaran mengenai Pemanfaatan Teknologi Informasi (X5) maka penulis membuat pengkategorian dalam garis interval sebagai berikut:

Jarak interval untuk 110 responden

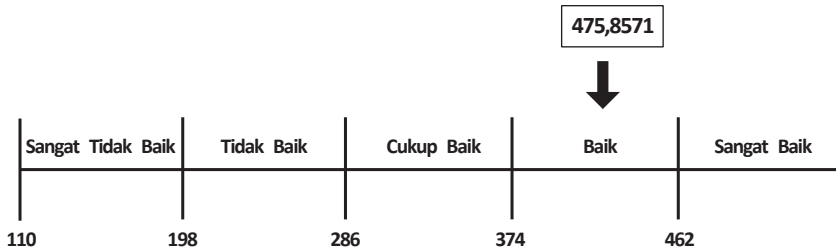
$$\begin{aligned} \text{Skor Minimum} &= \text{Skor Minimum} \times \text{Jumlah Responden} \\ &= 1 \times 110 \\ &= 110 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor Maksimum} &= \text{Skor Maksimum} \times \text{Jumlah Responden} \\ &= 5 \times 110 \\ &= 550 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Selisih} &= \text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum} \\ &= 550 - 110 \\ &= 440 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jarak Interval} &= \text{Interval: Jenjang (5)} \\ &= 440 : 5 \\ &= 88 \end{aligned}$$

Dengan jarak interval sebesar 88 pada masing-masing katagori, maka dapat digambarkan pembagian skor total tanggapan responden mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk garis kontinum sebagai berikut:



Berdasarkan garis kontinum pada gambar diketahui diatas rata-rata skor tanggapan responden tentang pemanfaatan teknologi informasi diperoleh nilai sebesar 476,857 dan dalam pengklasifikasian interval skor tersebut termasuk katagori sangat baik.

5. Hasil Analisis Verifikatif

a. Hubungan Antar Variabel Menggunakan Analisis Korelasi

Untuk menentukan keeratan hubungan antar variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (X1), Kualitas SDM (X2), Implementasi Sistem Pengendalian Intern (X3), komitmen organisasi (X4) dan pemanfaatan teknologi informasi menggunakan korelasi *product moment* (pearson) dengan rumus:

$$r_y = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Tabel 4.63
Pengujian Koefisien Korelasi antar Variabel

No	Variabel	rhitung	Katagori
1	X1 X2	0,654	Kuat
2	X1 X3	0,667	Kuat
3	X1X4	0,604	Kuat
4	X1X5	0,600	Kuat
5	X2X3	0,753	Kuat
6	X2X4	0,578	Kuat
7	X2X5	0,624	Kuat
8	X3X4	0,721	Kuat
9	X3X5	0,756	Kuat
10	X4X5	0,554	Kuat

Dengan menggunakan bantuan software SPSS 17.00 diperoleh nilai korelasi yang kuat antara variabel X1, X2, X3, X4 dan X5. Hubungan antara penerapan standar akuntansi dengan kualitas SDM kuat, hal ini mengindikasikan bahwa dengan kualitas SDM yang bagus, maka penerapan standar akuntansi pemerintah juga akan bagus.

Hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah dan implementasi sistem pengendalian intern kuat, hal ini berarti bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah akan berdampak positif terhadap implementasi sistem pengendalian intern. Selanjutnya hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah dan komitmen organisasi juga kuat, kondisi ini berarti bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berdampak positif terhadap komitmen organisasi. Hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi kuat hal ini berarti bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berdampak positif terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Hubungan antara kualitas SDM dan implementasi sistem pengendalian intern juga kuat, hal ini mengindikasikan bahwa jika kualitas SDM baik maka pemanfaatan teknologi informasi juga semakin baik. Hubungan antara kualitas SDM dan komitmen organisasi kuat, hal ini juga berarti bahwa kualitas SDM yang baik akan berdampak pada komitmen organisasi yang bagus. Hubungan antara implementasi sistem pengendalian intern dan komitmen organisasi kuat, hal ini berarti bahwa semakin bagus komitmen organisasi maka implementasi sistem pengendalian organisasi juga bagus. Hubungan antara implementasi sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi kuat, kondisi mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan berdampak positif yang kuat terhadap implementasi sistem pengendalian. Hubungan antara komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi kuat, hal ini berarti bahwa semakin baik komitmen organisasi maka pemanfaatan teknologi informasi juga semakin baik.

b. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk menganalisis hubungan kausalitas dan pengaruh antara Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan digunakan suatu metode analisis yang disebut dengan Analisis Jalur (*Path Analysis*). Berdasarkan pada hasil kuesioner yang telah disebarakan pada sampel sebanyak 110 pegawai diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.64

Pengujian Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.714	1.812		3.706	.000					
X1	.572	.087	.535	6.605	.000	.786	.544	.364	.462	2.162
X2	.009	.098	.008	.093	.926	.605	.009	.005	.390	2.567
X3	.068	.160	.048	.426	.671	.671	.042	.023	.234	4.274
X4	.205	.079	.212	2.583	.011	.653	.246	.142	.452	2.211
X5	.177	.108	.141	1.642	.104	.622	.159	.091	.410	2.440

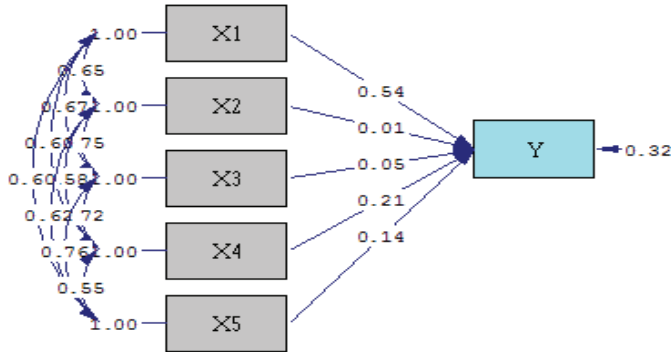
a. Dependent Variable: Y

Model *structural* berdasarkan *standardized coefficients* Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Kualitas SDM (X2), Implementasi Sistem Pengendalian Intern (X3), Komitmen Organisasi (X4) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X5) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) adalah:

$$Y = 0,535*X1 + 0,008*X2 + 0,048*X3 + 0,212*X4 + 0,141*X5,$$

$$\text{Errorvar} = 0,32$$

Jika persamaan tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1

Koefisien Jalur Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari gambar diatas diketahui koefisien jalur variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan bertanda positif artinya kelima variabel tersebut memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh makna bahwa:

$\rho_{yx1} = 0,54$, artinya penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki nilai koefisien jalur terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,54, maksudnya adalah bahwa setiap bertambah baik penerapan standar akuntansi pemerintah maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,54 dengan kata lain maka penerapan standar akuntansi pemerintah akan memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,54

$\rho_{yx2} = 0,01$, artinya kualitas SDM memiliki nilai koefisien jalur terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,01, maksudnya adalah bahwa setiap bertambah baik kualitas SDM maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,01 dengan kata lain maka kualitas SDM akan memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,01.

$P_{yx3} = 0,05$, artinya implementasi sistem pengendalian intern memiliki nilai koefisien jalur terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,05, maksudnya adalah bahwa setiap bertambah baik implementasi sistem pengendalian intern maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,05 dengan kata lain maka implementasi sistem pengendalian intern akan memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,05.

$P_{yx4} = 0,21$, artinya komitmen organisasi memiliki nilai koefisien jalur terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,21, maksudnya adalah bahwa setiap bertambah baik komitmen organisasi maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,21 dengan kata lain maka komitmen organisasi akan memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,21.

$P_{yx5} = 0,14$, artinya pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai koefisien jalur terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,14, maksudnya adalah bahwa setiap bertambah baik pemanfaatan teknologi informasi maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,14 dengan kata lain maka pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,14.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai korelasi yang telah dilakukan, maka dapat diketahui besarnya pengaruh langsung maupun tidak langsung variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi bertanda positif artinya kelima variabel tersebut memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun hasil perhitungan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.65

Uji Pengaruh Simultan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.827 ^a	.684	.669	3.30939

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pengaruh secara simultan atau bersama-sama variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI), Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah 0,684. Artinya hasil tersebut menandakan bahwa 68,4% variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan bertanda positif artinya kelima variabel tersebut memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan sisanya 31,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang diketahui.

Untuk mencari besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependent dapat dicari dengan rumus uji Individu sebagai berikut:

Koefisien Beta x Zero order (I) yang bisa dilihat ada tabel *coefficient* di bawah ini adalah:

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	6,714	1,812		3,706	,000					
X1	,572	,087	,535	6,605	,000	,786	,544	,364	,462	2,162
X2	,009	,098	,008	,093	,926	,605	,009	,005	,390	2,567
X3	,068	,160	,048	,426	,671	,671	,042	,023	,234	4,274
X4	,205	,079	,212	2,583	,011	,653	,246	,142	,452	2,211
X5	,177	,108	,141	1,642	,104	,622	,159	,091	,410	2,440

1. Variabel $X_1 = 0,535 \times 0,786 = 0,4205 = 42,05\%$
 2. Variabel $X_2 = 0,08 \times 0,605 = 0,00495 = 0,495\%$
 3. Variabel $X_3 = 0,048 \times 0,671 = 0,0325 = 3,25\%$
 4. Variabel $X_4 = 0,212 \times 0,653 = 0,1383 = 13,83\%$
 5. Variabel $X_5 = 0,141 \times 0,622 = 0,08787 = 8,787\%$
-
- 68,4%

Untuk mencari besarnya pengaruh tidak langsung masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan data sebagai berikut:

Tabel 4.66

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sub Var	Koefisien Jalur	Pengaruh Langsung	Pengaruh tidak langsung (melalui), dalam %					Pengaruh Tdk Langsung	Total (%)
			X1	X2	X3	X4	X5		
X1	0.535	28.648%		0.29%	1.73%	6.84%	4.54%	13.40%	42.05%
X2	0.008	0.007%	0.29%		0.03%	0.10%	0.07%	0.49%	0.50%
X3	0.048	0.235%	1.73%	0.03%		0.74%	0.52%	3.02%	3.26%
X4	0.212	4.481%	6.84%	0.10%	0.74%		1.66%	9.34%	13.82%
X5	0.141	1.998%	4.54%	0.07%	0.52%	1.66%		6.79%	8.79%
Total		35.369%	13.401%	0.488%	3.020%	9.342%	6.788%	33.039%	68.409%

c. Pengaruh Kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah Terhadap Opini WTP

Untuk menganalisis hubungan kausalitas dan pengaruh antara kualitas laporan keuangan terhadap opini WTP digunakan metode analisis yang disebut dengan analisis jalur (*Path Analysis*). Berdasarkan pada hasil kuesioner yang telah disebarakan pada sampel sebanyak 110 pegawai diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.67
Pengujian Pengaruh Kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah Terhadap Opini WT

Coefficients^a

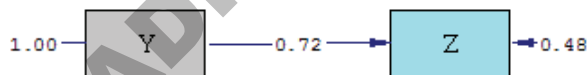
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.791	.779		3.583	.001					
Y	.260	.024	.721	10.826	.000	.721	.721	.721	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Z

Model structural berdasarkan *standardized coefficients* kualitas laporan keuangan (Y) terhadap opini WTP (Z) adalah:

$$Y = 0,721 * X_1, \text{ Errorvar.} = 0,48$$

Jika persamaan tersebut digambarkan maka akan seperti:



Gambar 4.2
Koefisien Jalur Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah terhadap Opini WTP

Pada gambar diatas koefisien jalur variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bertanda positif artinya variabel tersebut memberikan pengaruh positif terhadap opini WTP.

Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh makna bahwa:

$\rho_{zy} = 0,721$, artinya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai koefisien jalur terhadap opini WTP sebesar 0,721, maksudnya adalah bahwa setiap bertambah baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka opini WTP akan meningkat sebesar 0,721 dengan kata lain maka

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan memberikan kontribusi terhadap opini WTP sebesar 0,721.

Setelah diperoleh koefisien jalur maka dapat diketahui besarnya pengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap opini WTP. Adapun hasil perhitungan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.68
Uji Pengaruh Kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah terhadap Opini WTP

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	. 721 ^a	. 520	. 516	1. 44270

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pengaruh variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap opini WTP sebesar 0,520 atau 52%. Artinya hasil tersebut menandakan bahwa 52% variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat menjelaskan opini WTP sisanya 48% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model pada penelitian ini.

6. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Hipotesis secara Parsial Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis akan diuji sesuai dengan paradigma yang mencerminkan hipotesis tersebut yaitu pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas SDM, implementasi sistem pengendalian intern, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh secara parsial, yaitu:

1) Pengujian Hipotesis Parsial Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

$H_0 : \rho_{YX_1} = 0$ tidak terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y)

$H_1 : \rho_{YX_1} \neq 0$ terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi

pemerintah (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y)

Kriteria Uji: Tolak H_0 jika t-hitung lebih besar dari t-tabel atau $t_0 > t$ -tabel, dengan derajat kebebasan = $110 - 5 - 1 = 104$

Tabel 4.69
 Hasil Uji Parsial Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_1)
 terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Striktural	Koefisien Jalur	t hitung	t table	Kesimpulan
ρ_{YX1}	0,535	6,605	1,983	Ho ditolak , terdapat pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan

Untuk koefisien jalur penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,535, diperoleh t-hitung sebesar 6,605 dengan mengambil taraf signifikan sebesar 5%, maka nilai t-tabel sebesar 1,983 sehingga dikarenakan t-hitung = 6,605 lebih kecil dari 1,983 maka H_0 ditolak dengan kata lain terdapat pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2) Pengujian Hipotesis Parsial Kualitas SDM (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah

$H_0 : \rho_{YX2} = 0$ tidak terdapat pengaruh Kualitas SDM (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah

$H_1 : \rho_{YX2} \neq 0$ terdapat pengaruh Kualitas SDM (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah

Kriteria Uji: Tolak H_0 jika t-hitung lebih besar dari t-tabel atau $t_0 > t$ -tabel, dengan derajat kebebasan = $110 - 5 - 1 = 104$

Tabel 4.70
 Hasil Uji Parsial Variabel Kualitas SDM (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Striktural	Koefisien Jalur	t hitung	t table	Kesimpulan
------------	-----------------	----------	---------	------------

ρ_{YX2}	0,008	0,93	1,983	Ho diterima , tidak terdapat pengaruh antara kualitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan
--------------	-------	------	-------	---

Untuk koefisien kualitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,008, diperoleh t-hitung sebesar 0,93 dengan mengambil taraf signifikan sebesar 5%, maka nilai t-tabel sebesar 1,983 sehingga dikarenakan t-hitung= 0,93 lebih kecil dari 1,983 maka Ho diterima dengan kata lain tidak terdapat pengaruh antara kualitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3) Pengujian Hipotesis Parsial Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ho : $\rho_{YX3} = 0$ tidak terdapat pengaruh implementasi sistem pengendalian intern (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (Y)

H₁: $\rho_{YX3} \neq 0$ terdapat pengaruh implementasi sistem pengendalian intern (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (Y)

Kriteria Uji: Tolak Ho jika t-hitung lebih besar dari t-tabel atau $t_0 > t$ -tabel, dengan derajat kebebasan=110-5-1=104

Tabel 4.71

Hasil Uji Parsial Variabel Implementasi Sistem Pengendalian Intern (X₃) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Striktural	Koefisien Jalur	t hitung	t table	Kesimpulan
ρ_{YX3}	0,048	0,426	1,983	Ho diterima , tidak terdapat pengaruh antara Implementasi Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan

Untuk koefisien implementasi sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,048, diperoleh t-hitung sebesar 0,426 dengan mengambil taraf signifikan sebesar 5%, maka nilai t-tabel sebesar 1,983 sehingga dikarenakan t-hitung= 0,426 lebih kecil dari 1,983 maka Ho diterima

dengan kata lain tidak terdapat pengaruh antara implementasi sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4) Pengujian Hipotesis Parsial Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah

Ho : $\rho_{YX4} = 0$ tidak terdapat pengaruh Komitmen organisasi (X4) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (Y)

H₁: $\rho_{YX4} \neq 0$ terdapat pengaruh Komitmen organisasi (X4) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (Y)

Kriteria Uji: Tolak Ho jika t-hitung lebih besar dari t-tabel atau $t_0 > t$ -tabel, dengan derajat kebebasan=110-5-1=104

Tabel 4.72
Hasil Uji Parsial Variabel Komitmen Organisasi (X4) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Striktural	Koefisien Jalur	t hitung	t table	Kesimpulan
ρ_{YX4}	0,212	2,583	1,983	Ho ditolak, terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan

Untuk koefisien komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,212, diperoleh t-hitung sebesar 2,583 dengan mengambil taraf signifikan sebesar 5%, maka nilai t-tabel sebesar 1,982 sehingga dikarenakan t-hitung=2,583 lebih besar dari 1,983 maka Ho ditolak dengan kata lain terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5) Pengujian Hipotesis Parsial Pemanfaatan Teknologi Informasi (X5) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Ho : $\rho_{YX5} = 0$ tidak terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi (X5) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (Y)

H₁: $\rho_{YX4} \neq 0$ terdapat terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi (X5) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (Y)

Kriteria Uji: Tolak Ho jika t-hitung lebih besar dari t-tabel atau $t_0 > t$ -tabel, dengan derajat kebebasan=110-5-1=104

Tabel 4.73
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Striktural	Koefisien Jalur	t hitung	t table	Kesimpulan
ρ_{yx5}	0,141	1,642	1,983	Ho diterima, tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan

Untuk koefisien pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,141, diperoleh t-hitung sebesar 1,642 dengan mengambil taraf signifikan sebesar 5%, maka nilai t-tabel sebesar 1,982 sehingga dikarenakan t-hitung= 1,642 lebih kecil dari 1,983 maka Ho diterima dengan kata lain tidak terdapat pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Pengujian Hipotesis Secara Simultan Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh secara bersamaan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan menggunakan hipotesis statistik sebagai berikut:

$$H_0: \rho_{yx1} = \rho_{yx2} = \rho_{yx3} = \rho_{yx4} = \rho_{yx5} = 0$$

Tidak terdapat pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

$$H_1: \text{paling sedikit ada } \rho_{yxi} \neq 0 \quad . \quad i=1,2,3,4,5$$

Terdapat pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Dengan kriteria uji: Tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ untuk menguji hipotesis tersebut maka dilakukan perhitungan dengan mempergunakan software SPSS 17.00 sebagai berikut:

Tabel 4.74
 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan Kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah terhadap Opini WT

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2467.429	5	493.486	45.059	.000 ^a
	Residual	1139.013	104	10.952		
	Total	3606.441	109			

a. Predictors: (Constant), X5, X4, X1, X2, X3p

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai F-hitung sebesar 45,059, dimana kriteria penolakan H_0 jika F-hitung lebih besar di F-tabel, dengan derajat bebas $V1=5$ dan $V2=110-5-1$ dan tingkat kepercayaan 95% maka dari tabel distribusi F didapat nilai F-tabel untuk $F_{0,05,5,104} = 2,3017$. Dikarenakan 45,059 lebih besar dari 2,3017 maka H_0 ditolak, artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan secara linier antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Atau dapat diartikan terdapat pengaruh secara bersama-sama antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar koefisien determinasinya (R^2) = 0,684 atau 68,4% dan pengaruh variabel diluar model sebesar 31,6%.

c. Pengujian Hipotesis Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Y) terhadap Opini WTP (Z)

Pengaruh secara variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Opini WTP menggunakan hipotesis statistik sebagai berikut:

$$H_0: \rho_{zy} = 0$$

Tidak terdapat pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) terhadap Opini WTP (Z)

$$H_0: \rho_{zy} = 0$$

Terdapat pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) terhadap Opini WTP (Z)

Dengan kriteria uji: Tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ untuk menguji hipotesis tersebut maka dilakukan perhitungan dengan mempergunakan software SPSS 17.00 sebagai berikut:

Tabel 4.75
Hasil Uji Hipotesis Parsial Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Opini WTP

Struktural	Koefisien Jalur	t hitung	t table	Kesimpulan
ρ_{zy}	0,721	10,826	1,983	Ho ditolak , terdapat pengaruh antara kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap opini WTP

Untuk koefisien jalur kualitas laporan keuangan terhadap opini WTP sebesar 0,721 diperoleh t-hitung sebesar 10,826 dengan mengambil taraf signifikan sebesar 5%, maka nilai t-tabel sebesar 1,983, sehingga dikarenakan t-hitung = 10,826 lebih besar dari 1,983 maka H_0 ditolak dengan kata lain terdapat pengaruh antara kualitas laporan keuangan terhadap opini WTP secara signifikan.

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis melakukan pembahasan mengenai pengaruh Faktor Penerapan SAP, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Pimpinan dan Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah khususnya keterkaitan untuk mendapatkan Opini WTP baik secara simultan maupun secara parsial sebagai berikut:

1. Opini WTP

Opini WTP adalah variabel dependen atau terikat dalam penelitian ini, Opini yang paling baik adalah WTP (*Unqualified*)

Opinion) yang diberikan oleh BPK, Opini ini diberikan karena pemeriksa meyakini, berdasarkan bukti-bukti hasil pemeriksaan yang dikumpulkan, bahwa laporan keuangan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material, yaitu:

- 1) Penyajian laporan keuangan telah dilakukan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), tidak ada salah saji material dan telah diungkapkan secara memadai.
- 2) Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dibangun/diterapkan telah cukup memadai, sehingga dapat mengamankan harta dan kebijakan manajemen.
- 3) Semua transaksi yang dilakukan telah sesuai ketentuan yang berlaku (tidak ada temuan yang material yang mempengaruhi opini hasil pemeriksaan) serta disajikan secara lengkap (*Full Disclosure*)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tanggapan responden tentang opini WTP tersebut termasuk ke dalam kategori sangat baik. Hal itu terlihat dari tanggapan responden mengenai Opini WTP yang terbagi ke dalam 3 item pertanyaan dengan satu dimensi yaitu opini yang baik. Berdasarkan garis kontinum pada tentang opini WTP, jumlah rata-rata skor tanggapan responden tentang opini WTP diperoleh nilai sebesar 491,33 dan dalam pengklasifikasian interval skor tersebut termasuk katagori sangat baik.

2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan variabel dependen atau terikat penelitian ini adalah kemampuan atau ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu andal, relevan, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tanggapan responden tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah termasuk ke dalam kategori sangat baik. Hal itu terlihat dari tanggapan responden mengenai Kualitas Laporan Keuangan

Daerah yang terbagi ke dalam 9 item pertanyaan. Berdasarkan garis kontinum pada gambar diatas rata-rata skor tanggapan responden tentang Kualitas Laporan Keuangan Daerah diperoleh nilai sebesar 470,77 dan dalam pengklasifikasian interval skor tersebut termasuk katagori sangat baik.

3. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengihktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Jadi penerapan SAP adalah pelaksanaan seluruh kandungan yang terdapat dalam SAP dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. (Pengantar SAP PP. No 71 Tahun 2010).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tanggapan responden tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) termasuk ke dalam kategori sangat baik. Hal itu terlihat dari tanggapan responden mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) yang terbagi ke dalam 9 item pertanyaan. Berdasarkan garis kontinum pada gambar diatas rata-rata skor tanggapan responden tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) diperoleh nilai sebesar 473,22 dan dalam pengklasifikasian interval skor tersebut termasuk katagori sangat baik.

4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, satuan kerja harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi,

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tanggapan responden tentang Kualitas SDM ke dalam kategori baik. Hal itu terlihat dari tanggapan responden mengenai Kualitas SDM yang terbagi ke dalam 8 item pertanyaan. Berdasarkan garis kontinum pada gambar diatas rata-rata skor tanggapan responden tentang Kualitas SDM diperoleh nilai sebesar 454,125 dan dalam pengklasifikasian interval skor tersebut termasuk katagori baik.

5. Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tanggapan responden tentang Implementasi SPI ke dalam kategori baik. Hal itu terlihat dari tanggapan responden mengenai Implementasi SPI yang terbagi ke dalam 6 item pertanyaan. Berdasarkan garis kontinum pada gambar diatas rata-rata skor tanggapan responden tentang implementasi SPI diperoleh nilai sebesar 451.833 dan dalam pengklasifikasian interval skor tersebut termasuk katagori baik.

Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa penerapan SPI sudah sesuai dengan kriteria seperti adanya *Standard Operating Procedure* (SOP). Pemisahan wewenang, dokumen dan catatan yang memadai, Tindakan disiplin atas pelanggaran dan Pembatasan akses.

6. Komitmen Organisasi.

Komitmen Organisasi adalah kesanggupan untuk bertanggungjawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang. Komitmen tidak ada hubungannya sama sekali dengan bakat, kepintaran atau

talenta. Komitmen disini adalah keinginan dari pengelola keuangan melakukan perubahan sesuai dengan adanya perubahan peraturan dan perundang-undangan. Dengan adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang *reliable* sesuai dengan SAP.

Komitmen organisasi itu sendiri antara lain: rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tanggapan responden tentang komitmen organisasi ke dalam kategori baik.

7. Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah variabel bebas dalam penelitian ini merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce* dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi dalam mempermudah membuat pengelolaan keuangan dan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi Informasi mencakup (1) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tanggapan responden tentang Pemanfaatan teknologi informasi ke dalam kategori sangat baik. Hal itu terlihat dari tanggapan responden mengenai Pemanfaatan teknologi informasi yang terbagi ke dalam 7 item pertanyaan.

Berdasarkan garis kontinum pada gambar diatas rata-rata skor tanggapan responden tentang Pemanfaatan teknologi informasi diperoleh nilai sebesar 476,857 dan dalam pengklasifikasian interval skor tersebut termasuk katagori sangat baik.

8. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan model statistik uji t, yaitu dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Dapat dilihat penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,535, diperoleh t-hitung sebesar 6,605 dengan mengambil taraf signifikan sebesar 5%, maka nilai t-tabel sebesar 1,983 sehingga dikarenakan t-hitung=6,605 lebih kecil dari 1,983 maka H_0 ditolak dengan kata lain terdapat pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sehingga dapat dikatakan bahwa apabila standar akuntansi pemerintah yang diterapkan oleh pemerintah baik maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan terdapat hubungan yang erat antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Deddi Nordiawan (2009:25) menyebutkan bahwa "SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah".

SAP merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. Secara dengan adanya diterapkannya SAP dalam penyajian laporan keuangan, maka otomatis laporan keuangan yang disajikan juga akan lebih berkualitas.

9. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan model statistik uji t, yaitu dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Untuk koefisien kualitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,008, diperoleh t-hitung sebesar 0,93 dengan mengambil taraf signifikan sebesar 5%, maka nilai t-tabel sebesar 1,983 sehingga dikarenakan $t_{hitung} = 0,93$ lebih kecil dari 1,983 maka H_0 diterima dengan kata lain tidak terdapat pengaruh antara kualitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ketidaksignifikanan tersebut disebabkan kondisi sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan yang belum maksimal di sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan yang ada belum mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, satuan kerja yang ada hanya memiliki sedikit pegawai akuntansi. Sedangkan dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan tidak memiliki latar pendidikan akuntansi, hal ini terlihat dari data demografi responden. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas). Padahal fungsi dan proses akuntansi hanya dapat dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang ilmu akuntansi. Namun secara praktik kondisinya berbeda. Karena masih sangat sedikit jumlah akuntan atau pegawai yang berlatar pendidikan akuntansi, sementara peraturan telah mewajibkan semua satuan kerja untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Karena itulah seluruh SDM yang harus yang diberdayakan. Kelemahan yang ada harus diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah.

10. Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model statistik uji t, yaitu dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} untuk koefisien implementasi sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,048, diperoleh t-hitung sebesar 0,426 dengan mengambil taraf signifikan sebesar 5%, maka nilai t-tabel sebesar 1,983 sehingga dikarenakan $t_{hitung} = 0,426$ lebih kecil dari 1,983 maka H_0 diterima dengan kata lain tidak terdapat pengaruh antara implementasi sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ketidaksignifikanan tersebut disebabkan Pengendalian intern pemerintah belum merupakan salah satu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan serta melindungi sumber daya organisasi. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif adalah agar laporan keuangan *reliable*.

11. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan model statistik uji t, yaitu dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} untuk koefisien komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,212, diperoleh t-hitung sebesar 2,583 dengan mengambil taraf signifikan sebesar 5%, maka nilai t-tabel sebesar 1,982 sehingga dikarenakan $t_{hitung} = 2,583$ lebih besar dari 1,983 maka H_0 ditolak dengan kata lain terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung pendapat COSO (2009) yang menyebutkan Jika kinerja pimpinan dan bawahan dalam suatu organisasi berjalan dengan baik, maka seluruh komponen akan menyatu (*built in*) dan saling menjalin (*permeated*) di dalam proses manajemen. COSO mengakui suatu "*tone on the top*", oleh karena itu pimpinan organisasi tetap ditekankan untuk mengambil

peranan yang sangat penting dalam memimpin organisasi untuk mencapai tujuan.

Suatu komitmen organisasional menunjukkan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi Steers, et. al (1974) mengemukakan jika seseorang yang bergabung dengan suatu organisasi tentunya membawa keinginan-keinginan, kebutuhan dan pengalaman masa lalu yang membentuk harapan kerja baginya, bersama-sama dengan organisasinya berusaha mencapai tujuan bersama dan untuk bekerja sama dan berprestasi kerja dengan baik, seorang harus mempunyai komitmen yang tinggi pada organisasinya.

12. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis menggunakan model statistik uji t, yaitu dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} untuk koefisien pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,141, diperoleh t-hitung sebesar 1,642 dengan mengambil taraf signifikan sebesar 5%, maka nilai t-tabel sebesar 1,982 sehingga dikarenakan $t_{hitung} = 1,642$ lebih kecil dari 1,983 maka H_0 diterima dengan kata lain tidak terdapat pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ketidaksignifikanan disebabkan teknologi informasi yang tidak atau belum dimanfaatkan secara optimal, dan pengimplementasian teknologi informasi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga implementasi teknologi informasi menjadi sia-sia dan semakin mahal dan tidak dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang handal serta mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah, dapat mempercepat proses pengolahan data transaksi, keakurasian dalam perhitungan, serta menghasilkan *output* lainnya lebih tepat waktu.

13. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Opini WTP.

Untuk koefisien jalur kualitas laporan keuangan terhadap opini WTP sebesar 0,721 diperoleh t-hitung sebesar 10,826 dengan mengambil taraf signifikan sebesar 5%, maka nilai t-tabel sebesar 1,983, sehingga dikarenakan t-hitung = 10,826 lebih besar dari 1,983 maka H_0 ditolak dengan kata lain terdapat pengaruh antara kualitas laporan keuangan terhadap opini WTP secara signifikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Belum diperolehnya opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah daerah masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kriteria SAP itu adalah Relevan, Keandalan, Dapat dibandingkan dan Dapat Dipahami. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah semakin besar pula suatu pemerintah daerah memperoleh opini dari BPK.

14. Pengaruh Secara Simultan Pengaruh Penerapan SAP, Kualitas SDM, Implementasi SPI, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai F-hitung sebesar 45,059, dimana kriteria penolakan H_0 jika F-hitung lebih besar di F-tabel, dengan derajat bebas $V_1=5$ dan $V_2=110-5-1$ dan tingkat kepercayaan 95% maka dari tabel distribusi F didapat nilai F-tabel untuk $F_{0,05,5,104} = 2,3017$. Dikarenakan 45,059 lebih besar dari 2,3017 maka H_0 ditolak, artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan secara linier antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah,

Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Atau dapat diartikan terdapat pengaruh yang positif secara bersama-sama antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

READING COPY

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil kesimpulan penelitian pada pemerintah daerah di lingkungan Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian secara simultan menunjukkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (X1), Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (X2), Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) (X3), Komitmen Organisasi (X4) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X5) mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 68,4%.

Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (X1) dan Komitmen Organisasi (X4) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (X2), Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) (X3) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X5) mempunyai pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

- 2) Hasil penelitian secara parsial terhadap Variabel Penerapan SAP (X1) akan berpengaruh secara yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sehingga dapat dikatakan bahwa apabila penerapan SAP yang diterapkan oleh pemerintah baik maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan baik
- 3) Hasil penelitian secara parsial terhadap variabel Kualitas SDM tidak terlalu berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Ketidaksignifikanan tersebut disebabkan kondisi SDM di sub bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan belum mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, satuan kerja yang ada hanya memiliki sedikit pegawai akuntansi. Sedangkan dari sisi kualifikasi, sebagian besar SDM sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan tidak memiliki latar pendidikan akuntansi.
- 4) Hasil penelitian secara parsial terhadap variabel Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) tidak terlalu berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan belum tercapainya peningkatan sistem pengendalian internal yaitu keandalan pelaporan. Tujuan pengendalian intern yang efektif terhadap laporan keuangan adalah memenuhi tanggungjawab dalam pelaporan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
- 5) Hasil penelitian secara parsial terhadap variabel komitmen organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Hasil penelitian ini mendukung pendapat COSO (2009), Jika kinerja pimpinan dan bawahan dalam suatu organisasi berjalan dengan baik, maka seluruh komponen akan menyatu (*built in*) dan saling menjalin (*permeated*) di dalam proses manajemen. COSO mengakui suatu "*tone on the top*", oleh karena itu pimpinan organisasi tetap ditekankan untuk mengambil peranan yang sangat penting dalam memimpin organisasi untuk mencapai tujuan.
- 6) Hasil penelitian secara parsial terhadap variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tidak berpengaruhnya pemanfaatan teknologi informasi disebabkan oleh teknologi informasi yang tidak atau belum dimanfaatkan secara optimal. Implementasi teknologi informasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan mahal. Selain itu banyak SDM pemerintah daerah yang tidak menguasai teknologi informasi.

- 7) Hasil penelitian variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menyebutkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap opini WTP.. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah semakin besar pula suatu pemerintah daerah memperoleh opini dari BPK.

B. Keterbatasan Penelitian

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian empiris, hasil penelitian ini juga mengandung beberapa keterbatasan, antara lain:

- 1) Penelitian ini dilakukan pada Bagian Akuntansi Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat serta Bagian Akuntansi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah (DPKAD) di Wilayah Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisir. Dengan kata lain validitas eksternal dari hasil penelitian ini masih perlu ditingkatkan.
- 2) Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuisioner, sehingga masih ada kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui seperti jawaban yang kurang cermat, responden yang menjawab asal-asalan, tidak jujur, dan pertanyaan yang kurang lengkap atau kurang dipahami oleh responden.

C. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka saran yang dapat diajukan oleh penulis antara lain :

- 1) Kepada pihak pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar meningkatkan Penerapan SAP, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi yang sudah ada. Semakin baik penerapan variabel tersebut maka akan semakin baik pula kualitas keuangan yang diperoleh. Hal tersebut secara

otomatis akan memperbesar peluang untuk memperoleh Opini WTP atas auidditlaporan keuangan dari BPK.

- 2) Kepada pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Daerah dalam rangka memperoleh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik, kiranya menerima pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, dan meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang keuangan dan Komputer.
- 3) Untuk penelitian selanjutnya, para peneliti berikutnya agar melengkapi dengan metode penelitian lain seperti observasi atau pengamatan langsung kepada objek, atau menggunakan metode eksperimen sebagai pelengkap metode kuesioner. Misalkan dengan wawancara karena saat melakukan penelitian ini peneliti sempat mewawancarai beberapa responden dan menemukan adanya perbedaan antara jawaban di kuesioner dan jawaban secara lisan untuk pertanyaan/pernyataan yang sama
- 4) Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara umum para responden atau pengelola laporan keuangan pemerintah daerah merasa telah melakukan kewajiban dengan sangat baik. Namun di sisi lain perolehan opini laporan keuangan dari BPK belum maksimal, karena tidak mendapat opini WTP. Dengan demikian terdapat kesenjangan *miss communication* antara pihak yang melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam sosialisasi, bimbingan teknik, pelatihan dan lain-lain tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, fokus pemeriksaan dan lain-lain karena itu disarankan kepada peneliti berikutnya untuk meneliti lebih lanjut tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK agar dapat dipahami dan diantisipasi oleh para penyelenggara laporan keuangan di pemerintah daerah. Agar terjadi kesamaan pandangan tentang langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

D. Implikasi penelitian

Implikasi yang diharapkan dari penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah dapat memperhatikan dan meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, kemudian didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi

seoptimal mungkin, dan adanya rancangan serta pengendalian intern yang memadai, diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi akan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya selain itu dapat menerapkan SAP yang baik serta adanya Komitmen Organisasi dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, yang pada akhirnya bermuara dengan dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dan berdampak kepada diperolehnya Opini WTP bagi pemerintah daerah.

READING COPY

READING COPY

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Badudu, J.S. 2007. *Ejaan bahasa Indonesia*. Nawaputra Bandung.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit BPFE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), 2013. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012, Buku II Pemeriksaan Keuangan*. Jakarta.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2013. *Internal Control – Integrated Framework*.
- _____. 1992. *Internal Control-Integrated Framework*.
- Gay, L.R. dan Diehl, P.L. (1992), *Research Methods for Business and Management*, MacMillan Publishing Company, New York.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta

- Haryanto dkk, 2007, *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Universitas Diponegoro
- Horngren, C.T, Harrison, W.T., & Bamber, L.S. (2002). *Accounting* (edisi 5). New Jersey, Prentice Hall, Inc
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2004. *Standar Akuntansi Keuangan 2004*, Jakarta.
- Ikhsan, Arfan, & Ishak, Muhammad. 2008, *Akuntansi Keperilakuan*, Salemba Empat, Jakarta
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield, 2007. *Akuntansi Intermediete, Terjemahan Emil Salim, Jilid 1, Edisi Kesepuluh*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Moch.Nazir. 2009, *Metode Penelitian*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyadi, 2002. *Auditing*, Buku Dua, Edisi Ke Enam, Salemba Empat, Jakarta
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit Salema Empat.
- S. Munawir, 2002. *Akuntansi Keuangan Dan Manajemen. Edisi Revisi*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Sawyer's, 2005. *Audit Internal Sawyer*, Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2003. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Terjemahan Yon, Kwan. 2007.
- Soekidjan. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:Bumi Aksara
- Soleh, Habib & Rochmansyah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Daerah, Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Fokusmedia. Bandung. Jakarta: Salemba Empat.
- Susanto, Azhar. 2007, *Sistem Informasi Akuntansi*, Penerbit Lingga Jaya, Bandung.
- Suwanda, Dadang. 2013. *Strategi mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda*, Penerbit PPM. Jakarta.
- Weygandt J Jerry, Donald E. Kieso, Paul D. Kimmel. 2007. *Pengantar Akuntansi*. Edisi Tujuh . Buku Satu . diterjemahkan oleh Ali Akbar Yulianto, Wsailah, Rangga Handika, Penerbit : Salemba Empat . Jakarta.

- Weygandt, Jerry J., Kieso, Donald E., Kell, Walter G., 1996, *Accounting Principles, 4th Edition.*, John Wiley & Sons, Inc., USA.
- Widodo, Joko 2001, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya.
- Wilkinson, et al. (2000). *Accounting Information Systems : Essential concepts and applications(4th)*. New York: Jhon Wiley and Sons, Inc,

Tesis:

- Darma, E. S. 2004. *Pengaruh Kejelasan Sasaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah*. Tesis. Program Pasca Sarjana UGM: Yogyakarta
- Warisno. 2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi*. Tesis. Medan : Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Jurnal:

- Arfianti, Dita dan Kawedar, Warsito. SE. M.Si, Akt. (2011) *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)*, *Jurnal Universitas Dipenogoro*. Semarang.
- Aritonang, Aldiani Sultani dan Firman Syarif. 2009. *Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu*. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 12
- Chong, Vincent K., and Chong, Kar Ming. 2002. *Budget Goal Commitment and Informational effect of Budget Participation on Performance : A Structural equation Modelling Approach*, Vol.14, pp. 65-86.
- Choirunisah, Fariziah. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja*

- KPPN Malang Tahun 2008*). Jurnal Laporan Keuangan. Universitas Brawijaya. Malang.
- Hamzah, Ardi. 2009, *Evaluasi Kesesuaian Model Keperilakuan dalam Penggunaan Teknologi Informasi di Indonesia.*, Jurnal Universitas Trunojoyo, Yogyakarta.
- Indriasari, Desi & Ertambang Nahartyo. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*. Pontianak : Simposium Nasional Akuntansi XI
- Mustafa, Santiadji. 2010. *Analisis Faktor –Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi (online).(<http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/32830?mode=full>). Diakses 28 Oktober 2012.
- Nouri, H. dan R. J. Parker. 1996. *The Effect of Organizational Commitment on Relation Between Budgetary Participation and Budgetary Slack*. Behavioral Research In Accounting. Vol 8. 74-90.
- Nugraheni, Purwaniati dan Imam Subaweh. 2008. *Pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan*. Jurnal Ekonomi Bisnis No.1 Vol 13. April 2008.
- Petrovits, Christine. Shakespeare, Catherine. Shih, Aimee. 2011. *The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations* Accounting Review, Jan 2011, Vol. 86 Issue 1, p325-357
- Rumbogo, Bagus, *Bagaimana, Mencegah Agar Opini Tidak ‘Disclaimer’? (Dalam Pengelolaan Keuangan Negara)*, Akuntan Indonesia, Mitra Dalam Perubahan, Edisi No.18/Tahun III/ Juli 2009, Hal 25
- Wentzel, Kristin. 2002. *The Influence of fairness Perceptions and Goal Commitment on Managers’ Performance in a Budget Setting*, Behavioural Research in Accounting, Vol.14, pp. 247-271
- Winidyaningrum, Celviana & Rahmawati (2012). *Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi*

- (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten). Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010)
- Winidyaningrum. 2010. *Pengaruh SDM dan Pemanfaatan TI Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemda Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi*. Jurnal SNA. STIE ST. Pignatelli: Surakarta
- Zetra, Aidinil. 2009. *Strategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Yosefrinaldi Yosefrinald (2013), *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang Vol 1, No 1 (2013)

Peraturan-Peraturan:

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- _____, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- _____, Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara*
- _____, Undang-undang No 15 Tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksaan Negara*
- _____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)*
- _____, 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan BPK RI No. 01 tahun 2007
tentang *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Peraturan BPK
RI No. 01 Tahun 2007 tentang *Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara*, BPK RI, Jakarta, 2007

READING COPY

GLOSARIUM

- Akuntansi : seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi
- Anggaran : rencana penjatahan sumber daya yang dinyatakan dengan angka, biasanya dalam satuan uang
- Arus Kas : pengeluaran dan pemasukan uang tunai perusahaan atas dasar harian, mingguan, dan jangka waktu lain
- Audit : pemeriksaan terhadap peralatan, program, aktivitas, dan prosedur untuk menentukan efisiensi dari kinerja keseluruhan sistem terutama untuk menjamin integritas dan keamanan data
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) : merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Desentralisasi : sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah
- Efektivitas : suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

- Efisiensi : usaha yang mengharuskan penyelesaian pekerjaan dengan tepat waktu, cepat dan memuaskan.
- Etos kerja : seberapa tingginya semangat yang dimiliki seorang karyawan dalam bekerja. Tidak hanya untuk mencapai target kerjanya sendiri, tetapi juga target tim atau organisasi
- Fiskal : kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara.
- Hipotesis : dugaan/jawaban sementara yang kita tentukan untuk dibuktikan kebenarannya.
- Ilmiah : segala sesuatu yang bersifat keilmuan, didasarkan pada ilmu pengetahuan, atau memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. segala sesuatu yang dibuat berdasarkan kaidah ilmu
- Identifikasi : penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dan sebagainya
- Informasi : sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya.
- Inovatif : usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya.
- Internal audit : penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi.
- Interval : masa antara dua kejadian yang bertalian (dalam drama, pertunjukan, dsb);
- Komitmen normatif : kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan moral dan etis
- Komitmen organisasi : perasaan keterkaitan atau keterikatan psikologis dan fisik pegawai terhadap organisasi tempat ia bekerja atau organisasi dimana ia menjadi anggotanya.
- Koordinasi : penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama.
- Korupsi : tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi.

- Laporan Keuangan : catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut
- Legitimasi : sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa penerimaan keputusan pemimpin atau pejabat pemerintah pelaksana kekuasaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masyarakat umum dan sesuai dengan nilai-nilai politik atau moral yang sepatutnya.
- Manajemen : proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota serta tujuan organisasi yang sudah ditentukan.
- Metode : cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan
- Moneter : proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera.
- Neraca : laporan keuangan yang berfungsi menunjukkan posisi aset, modal, dan kewajiban perusahaan.
- Opini WTP : Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.
- Otonomi daerah : kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik .
- Parsial : berhubungan atau merupakan bagian dr keseluruhan.
- Pejabat publik : orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.

- Penelitian : merupakan suatu usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. sistematis artinya mengikuti prosedur atau langkah-langkah tertentu.
- Relevan : kait-mengait; bersangkutan-paut; berguna secara langsung
- Sentralisasi : sistem pemerintahan di mana semua kekuasaan berada di pusat.
- Sumber Daya Manusia : salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan.
- Teknologi informasi : istilah umum yang menjelaskan teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/ atau menyebarkan informasi

READING COPY

INDEKS

A

anggaran x, xi, 3, 4, 19, 20,
21, 22, 23, 27, 34, 38, 59,
71, 73, 107, 117

arus kas 17, 18, 21, 23, 27,
28, 29

audit 27, 28, 29, 30, 36, 43,
67, 170

B

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
4, 19, 169

Bagan Akun 176

D

Desentralisasi 165, 169, 182

E

Efektivitas 169

Efisiensi 170

Etos kerja 170

F

fiskal nasional 2

G

good governance 3

H

Hipotesis v, vi, xiii, 13, 48, 62,
79, 84, 85, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 170

I

identifikasi 7, 10, 11, 69, 150

Identifikasi Masalah v, 10

Inovatif 170

Internal audit 170

Interval 82, 99, 105, 110, 116,
120, 126, 131, 170

K

Komitmen normatif 39, 60

komitmen organisasi 9, 12, 39,
40, 41, 47, 48, 49, 56, 60,
87, 96, 97, 121, 126, 127,
132, 133, 136, 140, 143,
144, 150, 153, 158

korupsi 3, 176

L

Laporan Keuangan iii, v, vi,
vii, x, xiii, xv, xviii, 4, 10,
11, 12, 13, 15, 18, 19, 21,

- 24, 26, 27, 30, 31, 32, 43, 44, 45, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 100, 104, 105, 109, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 164, 165, 166, 167, 171, 176, 177, 178
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 177
- Legitimasi 171
- M**
- Moneter 171
- N**
- Neraca 18, 20, 21, 32, 45, 155, 171
- O**
- Opini WTP iii, vi, vii, ix, xiii, xv, xvii, xviii, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 43, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 65, 66, 67, 70, 96, 97, 99, 139, 140, 145, 146, 147, 155, 160, 161, 164, 171, 176
- Organisasi sektor publik 18
- Otonomi daerah 3, 171
- P**
- Parsial xiii, 11, 86, 140, 141, 142, 143, 146, 171
- Pejabat publik 171
- pemerintah daerah ii, xiii, xvii, xviii, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 24, 26, 32, 44, 45, 46, 48, 49, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 71, 77, 78, 96, 97, 100, 107, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 169, 176
- Perkembangan teknologi informasi 1, 42
- R**
- responsibility 2
- Reviu 8, 177, 178
- S**
- sentralisasi 1
- skor maksimum 97
- skor minimum 97
- Standar Akuntansi Pemerintah xiii, 67, 68, 70, 71, 81, 85, 86, 105, 110, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 144, 145, 155, 156
- Survey i, iii, xvii, 10, 12
- T**
- Teknologi informasi 41, 61, 172
- W**
- wewenang xi, 2, 14, 15, 36, 38, 73, 117, 149

TENTANG PENULIS



Dr. DADANG SUWANDA, SE., MM., M.Ak., Ak., CA. Memulai pekerjaan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan pada Februari 1983, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, dan BPKP Pusat. Diperbantukan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sejak Tahun

2005 sampai 2013 sebagai Auditor Ahli Madya serta berbagai jabatan struktural, yaitu Kepala Bagian Administrasi dan Tata Usaha Pengaduan, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Evaluasi Laporan dan Hasil Pengawasan serta terakhir sebagai pejabat eselon Ila menjadi Inspektur Wilayah III. Pernah pula diperbantukan pada Yayasan Purna Bakti sebagai Staf Ahli dan Direktur Umum pada PT. Selaras Griya Adigunatama (pengelola Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang). Sejak tahun 2007 sampai sekarang, pengajar/widyaiswara tidak tetap pada Badan Diklat/Pusat Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri. Sejak Agustus 2013 sampai sekarang. Sebagai Dosen Tetap di IPDN dengan spesifikasi pada Bidang Keuangan, Audit dan Akuntansi Pemerintah Daerah. Aktif

sebagai pembicara dan narasumber pada acara pelatihan, seminar, dan workshop tingkat nasional dan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Tim penyusun modul di Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN RB pada tahun 2019. Sejak tahun 2019 sampai sekarang menjadi Staf Ahli Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Sejak tahun 2003 sampai sekarang sering menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi terkait tindak pidana korupsi (Tipikor) maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Buku-Buku yang Telah Dipublikasikan

No	Judul	Penerbit	Tahun
1	Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda	PPM Jakarta	2013
2	Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	PPM Jakarta	2013
3	Panduan Praktis Implementasi Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah	PPM Jakarta	2013
4	Menyusun Standard Operating Procedures Lembaga Pemerintah Berbasis SPIP	PPM Jakarta	2014
5	Dana Hibah dan Bantuan Sosial	PPM Jakarta	2014
6	Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Berpedoman pada SAP	PT Remaja Rosdakarya Bandung	September 2014
7	Sistem Akuntansi Akrua Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrua	PPM Jakarta	2015
8	Bagan Akun Standar Sistem Akuntansi Aktual Pemerintah Daerah	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Juni 2015
9	Factors Affecting Quality Of Local Government's Financial Statements	Lambert Academic Publishing Saabrucken Germany	Juli 2015

No	Judul	Penerbit	Tahun
10	Dasar-Dasar Akuntansi AkruaI Pemerintah Daerah	PT Ghalia Indonesia	Maret 2016
11	Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Maret 2016
12	Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD dalam Penyusunan PERDA APBD	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Mei 2016
13	Peningkatan Fungsi DPRD dalam Penyusunan Perda yang Responsif	PT Remaja Rosdakarya Bandung	September 2016
14	Peran Pengawasan DPRD Terhadap LKPJ dan LPP APBD/LKPD <i>Audited</i> Serta TLHP BPK	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Januari 2017
15	Panduan Penerapan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Februari 2017
16	Panduan Penerapan Kebijakan Akuntansi AkruaI Pemerintah Daerah	Penerbit Ghalia Bogor	2017
17	Reviu Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Januari 2018
18	Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Upaya Peningkatan Transparasi dan Akuntabilitas Publik	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Mei 2019
19	Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah	PT Remaja Rosdakarya Bandung	September 2019
20	Manual Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI (e-KEUDA)	PT Remaja Rosdakarya Bandung	November 2019

No	Judul	Penerbit	Tahun
21	Forum Konsultasi Publik	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Januari 2020
22	Sistem Informasi Pelayanan Publik	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Januari 2020
23	Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Februari 2020
24	Teknis Penyusunan Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Maret 2020
25	Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Putra Galuh Publisher	Agustus 2020
26	Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	PT Remaja Rosdakarya Bandung	September 2020
27	Panduan Teknik Aplikasi Sistem Informasi Barang E-KEUDA	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Desember 2020
28	Mal Pelayanan Publik Percepatan peningkatan Kualitas Inovasi Layanan Masyarakat	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Januari 2021
29	Penyusunan Standar Pelayanan Publik	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Pebruari 2021
30	Reviu RPJMD dan Restra SKPD	PT Remaja Rosdakarya Bandung	Agustus 2021
31	Kodifikasi Peraturan Desa: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kewenangan Desa	PT Remaja Rosdakarya Bandung	November 2021

No	Judul	Penerbit	Tahun
32	Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa serta Pengadaan Barang dan Jasa Desa	PT Remaja Rosdakarya Bandung	November 2021
33	Kodifikasi Peraturan Desa: Administrasi dan Aset Desa	PT Remaja Rosdakarya Bandung	November 2021
34	Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Desa	PT Remaja Rosdakarya Bandung	November 2021
35	Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa	PT Remaja Rosdakarya Bandung	November 2021

Publikasi Jurnal Internasional yang Ditulis

No	Judul	Issue	Publisher	Index	Website
1	Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statement To Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK)	Volume 6 No 4 Tahun 2015	Jurnal The International Institute of Science, Technology and Education (IISTE)	OJS	https://www.iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/view/19978
2	Regional Performance Allowances Instrument Improving Performance of Government Employees	Volume 7, Issue 4, April 2019	International Journal of Economics, Commerce and Management (IJECM), United Kingdom	OJS	http://ijecm.co.uk/volume-vii-issue-4/
3	Integrated Career Pattern Hope of Bureaucration In The Future	Volume 8, Issue 05 May 2019	International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR)	Terindeks Scopus	http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-0419-20153

4	The Effect of Sectoral Economic On Employment Absorption and Poverty Level In The West Nusatenggara Province	Volume 9, Issue 01, Januari 2020	International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR)	Terindeks Scopus	http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-0120-27987
5	Recruitment of Prospective Civil Servants Towards World Class Bureaucracy In Indonesia	Volume 9, Issue 01 May 2020	International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR)	Terindeks Scopus	http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-1219-26368
6	Idea Formats for Selection Regional Heads in The Future as a Democracy setherment Requitment in Indonesia	Volume 10, Juni 2020	International Journal of Scientic and Research publication	OJS	http://www.ijsrp.org/research-paper-0620.php?rp=P10210090#citation
7	The Fiscal Capacity of The Autonomous Region (DOB) In Increasing Economic Growth and Eradication of The Poor	Volume 12, Nomor 1, Mei 2020	Jurnal Bina Praja Research and Development Agency Minister of Home Affairs Republic of Indonesia	Sinta 2	http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/681
8	Decentralization of Fiscall Asymmetric for Community Well Being: Evidence From Aceh Propinice, Indonesia	Volume 12, Issue No 06, 2020	Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems	Terindeks Scopus	https://www.jardcs.org/abstract.php?id=5933
9	Risk Management Solution in Local Government Financial Management	Volume 27 No 3 Tahun 2020	Ayer Journal	Scopus Q1	http://ayerjournal.com/index.php/ayer/article/view/116
10	Regional Government Management Control In The Implementation of Risk Governance	Volume 12 No 3 tahun 2020	Oceanide Journal	Scopus Q3	http://oceanidenetne.net/index.php/o/article/view/68

11	Performance Model of Auditors and Supervisors in the Inspectorates Government Indonesia	Volume 13 Issue 3 tahun 2020	Solid State Technology	Scopus Q4	http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=2720&tip=sid&clean=0
12	Human Resource Development in Local Governments: Inscreased Transparency and Public Accountability	Volume 8 No 1 tahun 2021	Jurnal of Asian Finance, Economics and Business	Scopus Q2	www.koreascience.or.kr/article/JAKO202100569475376.view?orgId=kodisa
13	The Implementation of Performance-Based Budgeting Through A money Follow Program in Impressing Budget Corruption	Volume 21 No 2 tahun 2021	Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi	Sinta 4	http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/1576
14	Kepemimpinan dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Daerah	Volume 21 No 3 tahun 2021	Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi	Sinta 4	http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/1751
15	Leadership in the Quality Public Service Improvement	Volume 6 tahun 2021	Jurnal Linguistic and Culture Review	Scopus Q4	https://lingcure.org/index.php/journal/article/view/2027

Publikasi Prosiding yang Ditulis

No	Judul
1	<i>The effect of asset management to increase the local government financial reports</i> (2015, Universiti Selangor Malaysia).
2	<i>Fiscal reform (taxation) on local government and the new administrative duties</i> (2015, 1st APG/Asian Public government forum on local finance management – OECD/the Organization for Economic Co-operation and Development).

Publikasi Artikel Nasional

No	Judul
1	<i>Strategi Pemda meraih opini WTP</i> , Majalah Triwulanan Edisi Khusus HUT ke 30 Warta Pengawasan BPKP, Maret 2014
2	<i>Reformasi Fiskal (Perpajakan) Pada Pemerintah Daerah Dan Tugas Administrasi Yang Baru</i> , Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, IPDN. Juni 2015
3	<i>Mewujudkan Tujuan Desentralisasi</i> , Media online Amunisi News. http://amunisinews.com . Oktober 2017
4	<i>Dari Buku hingga Asas Desentralisasi</i> , Media online Amunisi News. http://amunisinews.com . Oktober 2017
5	<i>Konseptor Administrasi Pemerintah Daerah</i> , Media online Harnas News. http://harnasnews.com . Oktober 2017
6	<i>Menilik Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Desa, deteksi online</i> , http://deteksionline.com , November 2017.
7	Aset Daerah Harus Cermat dalam Pengelolaan, Fakta Hukum. http://www.faktahukum.co.id/dadang-suwanda-aset-daerah-harus-cermat-dalam-pengelolaan/ November 2017
8	<i>Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Desa</i> , Media online Harnas News. http://harnasnews.com . Desember 2017
9	<i>Lampu Kuning Keuangan Pemerintah Daerah</i> , Opini koran Tempo 8 Februari 2021. https://koran.tempo.co/read/462159/lampu-kuning-keuangan-pemerintahan-daerah